

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

# EDUKASI

K E U A N G A N



## Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Edisi 18/2013

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

*Program budaya  
Kementerian Kelautan*



**SATU INFORMASI  
SETIAP HARI**

DUA MENIT  
SEBELUM JADWAL



TIGA SALAM  
SETIAP HARI

rencanakan  
kerjakan  
monitoring  
tindak lanjut



**RINGKAS RAPI RESIK**

**RAWAT RAJIN**

# Daftar Isi



6

Kiprah STAN di  
Indonesia Timur



15

Menjadi Wanita Teladan  
(melalui Jalur widyaiswara)



60

Pemimpin Sebaiknya  
Ditakuti atau Dicintai



56

Khasiat Si Hijau



66

Info Diklat BPPK

---

Galeri BPPK 3

---

Lintas Peristiwa 4

---

Liputan Utama 6

---

Profil 15

---

Serambi Ilmu 19

---

English Corner 47

---

Liputan Khusus 50

---

Mata Air 54

---

Klinik Sehat 55

---

Ornamen 60

---

Pojok IT 63

---

Info Diklat 66

---

Selasar Alumni 68

---

# Salam Redaksi

Terus berkarya diantara sibuknya tugas utama. Triwulan akhir, selalu menjadi masa yang amat menyibukkan. Namun redaksi majalah Edukasi tetap berupaya untuk dapat menghadirkan terbitanya kepada pembaca yang budiman. Berbagai permasalahan dalam liputan, penerbitan dan sejenisnya berusaha untuk dapat diselesaikan, sehingga apa yang telah ditargetkan dapat dipenuhi.

STAN identik dengan Keuangan Negara. Kalimat tersebut tidak berlebihan tentunya, karena sebagian besar PNS dilingkungan Kementerian Keuangan merupakan alumni STAN. Informasi tentang bagaimana kiprah STAN untuk mencetak ahli keuangan negara dan BLU STAN, tersaji dalam edisi kali ini sebagai Laporan Utama. Demikian juga bagaimana prosesi wisuda STAN tahun 2013 yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, diangkat sebagai Liputan Khusus edisi ini.

Serambi ilmu menggelar beberapa tulisan diantaranya terkait dengan *Public Expenditure Analysis*, mengenal Dana Keistimewaan DIY, 'Potret Kecil' Perdagangan Rokok di ASEAN, Mengapa Harus Melaporkan Harta Kekayaan dan beberapa artikel terkait dengan dunia IT dan Komputer. Selanjutnya dirangkai dengan Pojok IT yang mengupas tentang *Digital Forensic*.

Lembar profil kali ini menyajikan profil Widyaiswara Teladan Kementerian Keuangan Tahun 2012. Sedangkan Gerai BPPK menyajikan tulisan tentang kegiatan seputar BPPK serta Artikel Kepemimpinan. Sebagai bahan renungan, Mata Air hadir dengan judul 'Terikat'. Lembar resensi Buku, *English Corner*, dan kesegaran komik "Kang Edu" selalu hadir melengkapi.

Segenap Redaktur Majalah Edukasi mengucapkan Dirgahayu Hari Oeang yang ke 67, semoga kedepannya Kementerian Keuangan semakin maju. Saran yang membangun demi kebaikan majalah Edukasi Keuangan ke depan sangat diharapkan, kami tunggu melalui alamat email [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id). Terimakasih dan selamat membaca.

## Susunan Redaksi

Edisi 18/2013



### Penasehat

Kepala BPPK

### Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

### Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

### Redaktur

Iqbal Soenardi

Tanda Setiyo

Surono

Sumini

Sampurna Budi Utama

Bambang Widjajaro

Noorcholis Madjid

Bambang Sancoko

Daniel Pangaribuan

Indrayansyah Nur

Agus Suharsono

Gathot Subroto

Agus Hekso P.

Efi Dyah Indrawati

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

### Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

### Desain Grafis dan Fotografer

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

### Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id). Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

### Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
12110  
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261875  
<http://www.bppk.depkeu.go.id>



**Dhanapala, 30 Oktober 2013**

**Menteri Keuangan mengunjungi *stand* BPPK pada kesempatan *Gallery Walk* yang merupakan bagian dari Rangkaian Acara Puncak Peringatan Hari Oeang ke-67**

Seminar Nasional Penataan Barang Milik Negara (BMN) Hasil Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel



BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan seminar nasional yang bertema “Penataan Barang Milik Negara (BMN) Hasil Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel”, Yogyakarta 1 Oktober 2013. Sebagai narasumber antara lain Yusrizal Ilyas, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Chalimah Pujihastuti, Kasubdit BMN IV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Agus dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dodi Iskandar, Direktur BMN DJKN, turut hadir memberikan *keynote speech* mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung dengan menggunakan teknologi *Live Streaming* via website BPPK.

1 Oktober 2013

Academic Conference pada Reuni Akbar Ikatan Alumni Kedinasan STAN 2013 (Lambang IKANAS)



Ikanas atau Ikatan Alumni Kedinasan STAN mengadakan *the Second Academic Conference*, Kamis, 3 Oktober 2013 sebagai rangkaian Reuni Akbar STAN 2013. Mengambil tema “Memperkuat Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Publik”, konferensi diisi dengan penyajian beberapa makalah terbaik yang telah lulus seleksi dari sekitar 60 makalah yang masuk. Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, KA. Badaruddin, membacakan *keynote speech* Menteri Keuangan yang berhalangan hadir. “Acara ini merupakan acara yang memberikan kontribusi pemikiran Ikanas keuangan untuk kompetensi keilmuan di bidang ekonomi dari anak bangsa”, kata Sesjen. Konferensi yang berlangsung di Aula BPPK Purnawarman ini, turut dihadiri oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo, mantan Inspektur Jenderal Kemenkeu, Hekinus Manao, serta beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

3 Oktober 2013

### Wakil Gubernur Akmil Hadir Di Tengah Peserta Diklatpim III Angkatan 51



Wakil Gubernur Akademi Militer Magelang, Brigjen TNI Sumedy hadir pada kegiatan Muatan Teknis Substantif Lembaga dalam Diklatpim III Angkatan 51, Kamis, 10 Oktober 2013. Mengangkat tajuk “Kepemimpinan dan Pembangunan Karakter”, beliau dengan penuh semangat mengajak semua yang hadir untuk lebih menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan di tengah-tengah ancaman global dan regional yang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini. 4 pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harus menjadi pegangan dan komitmen seluruh bangsa.

10 Oktober 2013

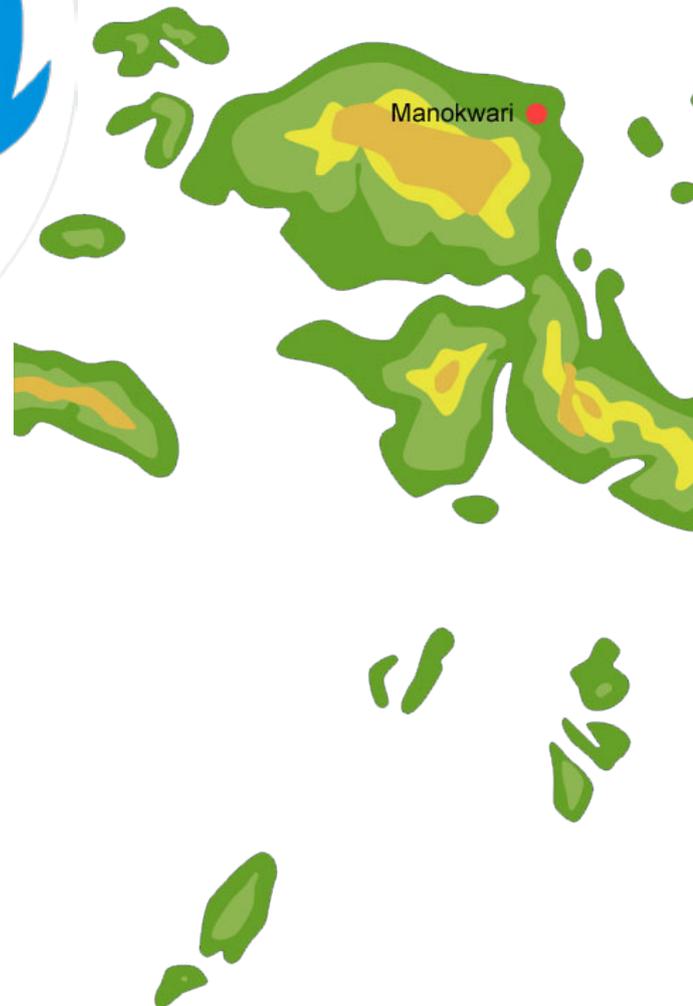
### Diklat Berbasis Kompetensi Eselon II Kementerian Keuangan



Pusdiklat PSDM BPPK bekerjasama dengan Biro SDM Sekretaris Jenderal menyelenggarakan Diklat Berbasis Kompetensi (DBK) untuk eselon II di Jakarta. Diklat yang berlangsung selama dua hari, 17-18 Oktober 2013 ini diikuti oleh 20 orang pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengawali diklat, para peserta diberikan suntikan motivasi dan inspirasi oleh Eko Ramaditya Adikara. Dengan segudang prestasi yang telah ia raih diharapkan dapat menjadi lecutan semangat dan motivasi bagi para peserta diklat.

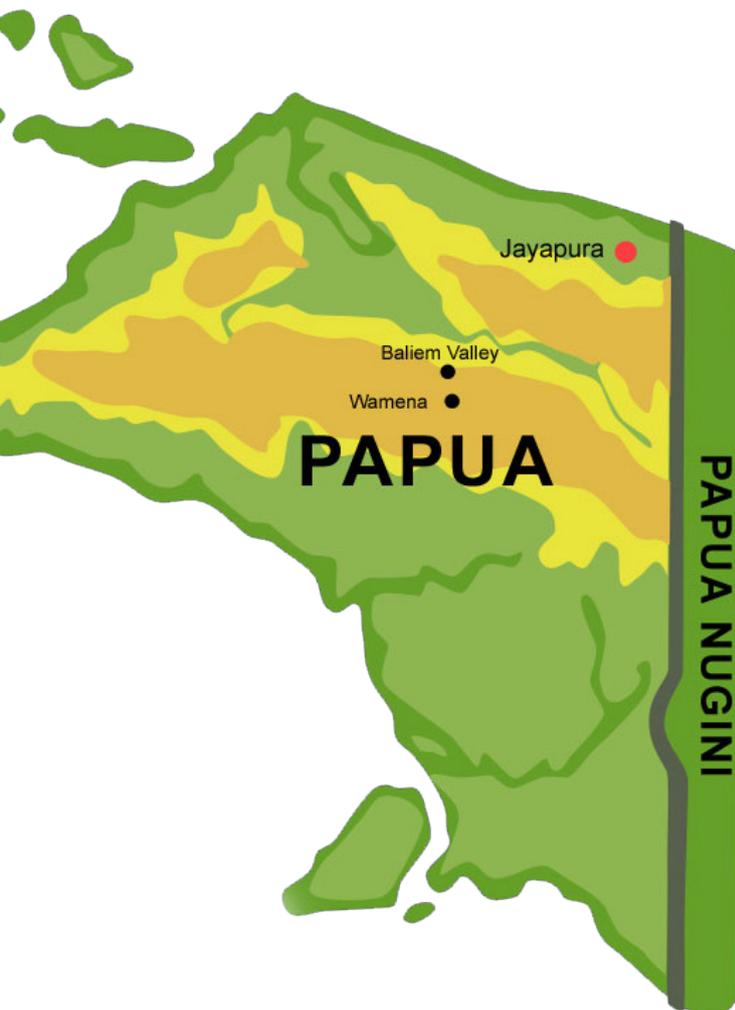
17 - 18 Oktober 2013

# Kiprah STAN di INDO



# NESIA Timur

Oleh : M. Ichsan & Yohana Tolla



Ilustrasi: M. Fath K.

Di tahun 2013 ini, Kementerian Keuangan telah menandatangani *Memorandum Of Understanding* dengan dua lembaga, yaitu Pemda Sumbawa dan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat). Pria yang kerap disapa Pak Akhmad (A) ini pun memberikan penjelasan terkait kerjasama tersebut kepada tim Majalah Edukasi Keuangan (EK).

*EK: Bisa diceritakan latar belakang STAN bisa kerjasama dengan Pemda*

*A: Saat ini kita mengadakan kerja sama dengan beberapa Pemda, seperti Sumbawa dan Papua. Yang pertama dengan Sumbawa dulu. Salah satu tugas Kemenkeu adalah membina Pemda dalam rangka pengelolaan keuangan, karena saat ini sistem keuangan pemerintahan sudah desentralisasi di mana daerah itu diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya dan nantinya Pemda itu juga akan bertanggungjawabkan sendiri keuangannya. Jadi sudah penuh, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya. Terkait dengan kewenangan yang diberikan ke daerah, maka Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk membina mereka. Kita lihat bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang sudah baik adalah laporan keuangan pemerintah. Selama ini bisa dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dan Pemerintah Daerah itu banyak yang dikatakan belum bagus. Hanya beberapa Pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagian besar dari sekitar 400-an Pemda itu masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan ada yang dibawah itu. Terutama untuk wilayah timur ini disinyalir masih banyak yang belum maksimal dalam pengelolaan keuangannya. Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardodjo menginginkan agar Kemenkeu bisa membantu teman-teman yang ada di wilayah timur. Menteri Keuangan mengamanatkan ke STAN untuk membuka program di wilayah timur. Yang dijajaki waktu itu sebetulnya ada 2 center/posisi. Yang pertama ada di Makassar. Untuk program di Makassar, Menkeu sudah menandatangani MoU dengan pemprov Makassar. Secara garis*

besar MoU berisi bahwa Makassar akan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi Pemda yang akan belajar pengelolaan keuangan daerah untuk daerah Makassar dan sekitarnya. Yang kedua, Menkeu menandatangani MoU dengan Pemprov NTB yang menyatakan bahwa di Sumbawa itu akan didirikan pusat untuk pembelajaran bagi teman-teman Pemda yang ada disekitar NTB dan NTT untuk belajar mengenai keuangan daerah ini. Kebetulan memang yang merespon cukup antusias adalah Pemda Sumbawa. Saat ini STAN membuka program diploma Kebendaharaan Negara di Sumbawa, yang penyelenggaraannya dibiayai oleh STAN.

Program Papua dan Papua Barat ini sebenarnya merupakan kewajiban dari Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). UP4B diberikan amanat oleh Presiden untuk mempercepat pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat. UP4B meminta seluruh Kementerian untuk ikut berperan, termasuk Kemenkeu. Kemenkeu bertekad untuk mendidik dan mencerdaskan teman-teman yang di Papua dan Papua Barat sebagai motor penggerak percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Mereka disekolahkan di STAN. Sebetulnya ini sudah dibicarakan dari tahun 2012 tapi baru terealisasi di tahun 2013. Data awal sebetulnya yang akan disekolahkan ini berjumlah 210 orang, tapi ada yang mundur, jadinya 206 orang. Sebanyak 90 orang di Jakarta, sisanya tersebar di BDK, ada 4.

Penyelenggaraannya juga dibiayai oleh STAN. Program untuk Papua ini ada 2 jurusan, yaitu Kebendaharaan Negara dan PBB, terutama untuk penilai. Yang kuliah di Jurangmangu dan BDK Cimahi itu yang jurusan Kebendaharaan Negara. Jurusan PBB itu ada di BDK Medan, BDK Malang, dan BDK Palembang. Pesertanya untuk program ini adalah lulusan SMA yang diseleksi oleh Pemda Papua secara administrasi kemudian kita tes, karena mereka kan harus putra daerah Papua. Setelah diseleksi administrasi oleh Pemda lalu diusulkan ke kita untuk dites, lalu kita terima sesuai dengan kebutuhan.

Nanti kalau sudah selesai akan kita kembalikan lagi ke Pemda Papua dan mereka akan diangkat menjadi pegawai Pemda Papua karena antara UP4B dan Papua Barat itu sudah menandatangani kontrak bahwa nanti lulusan yang disekolahkan itu akan diangkat menjadi pegawai Pemda. Lulusan STAN yang akan ditempatkan di Pemda Papua.

Kalau yang di Sumbawa, mereka yang disekolahkan itu adalah yang sudah pegawai Pemda dan ketika lulus akan dikembalikan ke Pemda. Minimal SMA, tapi pesertanya bervariasi, ada yang lulusan SMA, ada yang D3 ada yang S1. Karena ilmunya adalah keuangan negara jadi banyak sebenarnya peserta yang sudah S1 tapi juga ingin sekolah tentang itu.

*EK: Terkait kiprah STAN di Indonesia Timur, Daerah / Pemda mana saja STAN bekerjasama?*

A: Untuk Program Afirmasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat pada saat pendaftaran diharapkan semua kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat mengirimkan maksimal 15 peserta untuk ikut USM. Sampai batas akhir pendaftaran tidak semua daerah mengirimkan peserta dan beberapa daerah mengirimkan peserta lebih dari batas yang ditetapkan. Setelah berkoordinasi dengan UP4B akhirnya hal tersebut diakomodasi sehingga peserta ujian menjadi 289 orang.

*EK: Dengan mahasiswa yang berasal dari Papua dan Sumbawa ini, apa harapan STAN untuk mereka?*

A: Karena STAN ini adalah perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara, harapannya adalah dengan kita mendidik teman-teman Pemda seperti yang di Sumbawa, Papua dan Papua Barat, kita berharap agar lulusannya bisa menjadi penggerak pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. Paling tidak mereka sudah tahu bagaimana pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga mereka bisa membawa ilmunya dari sini dan bisa diaplikasikan, sehingga sedikit demi sedikit teman-teman Pemda akan jadi lebih bagus.

*EK: Kendala-kendala apa saja yang*

*dihadapi dalam penyelenggaraan STAN Papua dan Sumbawa?*

A: Kalau yang STAN Papua itu kan penyelenggaraannya disini (Jurangmangu), dari proses belajar mengajar di dalam kegiatan sehari-harinya itu tidak ada kesulitan, penunjukan pengajarnya itu tidak terlalu repot. Hanya saja, kita harus lebih sabar dan telaten dalam mendidik mereka. Karena walau mereka lulusan SMA tapi mungkin ada perbedaan kualitas lulusan SMA di Papua. Sehingga kalau saya lihat itu, kemampuan teman-teman yang dari Papua dan yang dari reguler itu berbeda. Apalagi kita tahu bahwa sistem penerimaan yang reguler itu kan ketat ya, yang daftar banyak, tapi yang diterima sedikit, berarti kita bisa menerima yang bagus-bagus. Kalau yang dari Papua kan memang jumlahnya tidak terlalu banyak dan kemungkinan perbedaan kualitas lulusannya ya, jadi kita harus lebih sabar dan telaten. Hal itu kita siasati dengan menggunakan kelas kecil sehingga jadi mereka lebih dekat, lebih mudah untuk diskusi. Ini tantangan bagi STAN, kalau nanti lulusannya bisa menyamai yang reguler, ya itu luar biasa.

Kalau yang Sumbawa kebetulan pesertanya adalah para pegawai. Jadi ternyata di Sumbawa itu yang kuliah bukan hanya lulusan SMA, tapi rata-rata dikatakan mereka sudah pernah kuliah, bahkan ada yang S2 kalau tidak salah. Mereka mau belajar program Diploma 1, karena ada keinginan yang kuat untuk tahu. Mereka antusias sekali untuk tahu, tidak main-mainlah. Itu merupakan keinginan sendiri, jadi mereka sangat antusias. Kendalanya bagi STAN adalah karena tempatnya yang jauh, jadi kita tidak bisa menerapkan sistem belajar mengajar seperti yang di STAN reguler. Misalnya hari ini 2 jam pertama kita belajar pengantar akuntansi, *trus* belajar bahasa inggris *trus* statistik *kan* itu tidak mungkin. Akhirnya kita ambil cara bahwa sekali pengajar datang ke Sumbawa itu mengajarkan materi hingga 1 UTS. Jadi, dari Senin sampai Kamis itu mereka belajar sampai 1 UTS, nanti hari Jumat biasanya UTS. Bisa dikatakan dipadatkan, walaupun dari segi SKS dan jumlah jam

## Rincian Peserta Program Diploma I STAN kerjasama dengan UP4B

itu terpenuhi, hanya saja dari segi waktu (itu), mereka belajar materi setengah semester itu hanya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu mereka belajar 1 mata kuliah sampai UTS. Begitu setiap minggunya. 1 semester itu kita memiliki 2 tahap, ada 8 mata kuliah. Jadi 1 tahap itu isinya 4 mata kuliah. Minggu pertama belajar A, minggu kedua B, ketiga C, dan keempat D, minggu berikutnya kembali ke A lagi. Setiap minggu kita kirim 1 pengajar karena pertimbangan biaya. Untuk mata kuliah yang *core* seperti penatausahaan, akuntansi keuangan daerah kita tidak kirim 1 pengajar, tapi 2 orang. Kelasnya dibagi menjadi 2 kelas kecil atau tetap dalam 1 kelas tapi saling membantu karena biasanya banyak praktek, biar bisa lebih ditangani. Kalau hanya 1 pengajar, misalnya mereka latihan ya mengawas 34 orang itu tidak mungkin, jadi kita kirim 2 pengajar.

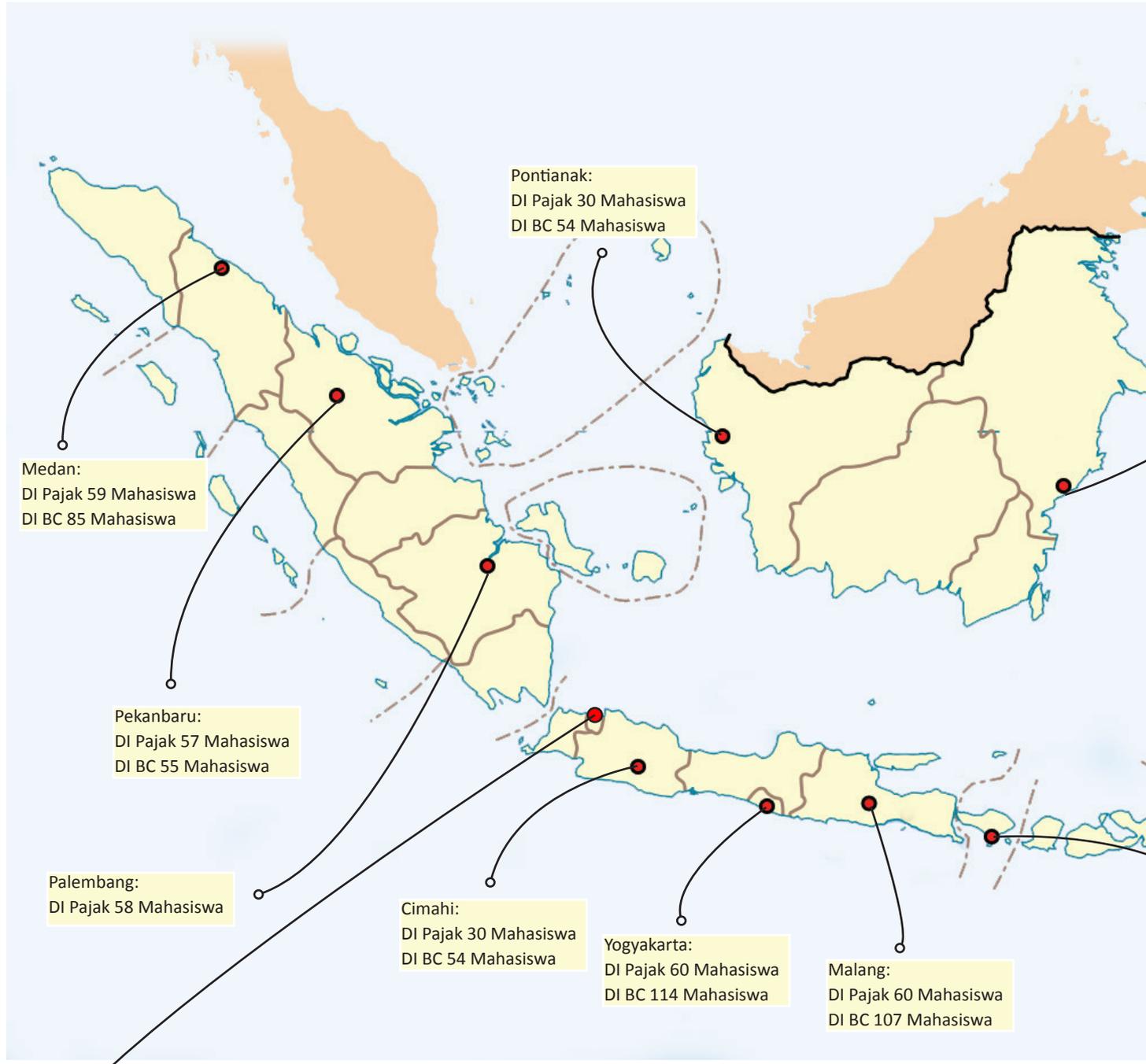
*EK: Melihat antusiasme pegawai yang tinggi, apakah program ini akan dilanjutkan?*

A: Kalau dilanjutkan atau tidak itu tergantung dari Pemda sendiri, apakah ingin pegawainya belajar atau tidak, banyak pendaftar atau tidak. Kalau memang banyak yang mendaftar ya bisa kita teruskan. Tapi kalau kedepannya antusiasnya tidak begitu besar ya tidak kita lanjutkan. Sebetulnya begini, di Jurangmangu inikan kita punya prodip 1 Kebendaharaan yang bekerjasama dengan Pemda, juga prodip 1 Penilai PBB. Nah, mereka kalau hanya mau menyekolahkan 1 atau 2 orang di Jakarta juga tidak apa-apa, tapi ongkosnya ditanggung sendiri.

NO	LOKASI UJIAN	JUMLAH PER LOKASI UJIAN	ASAL DAERAH	JUMLAH PESERTA
<b>PROVINSI PAPUA</b>				
1	JAYAPURA	111	KEEROM	10
			SARMI	10
			MEMBERAMO TENGAH	2
			KOTA JAYAPURA	12
			KABUPATEN JAYAPURA	76
			MIMIKA	1
2	MERAUKE	13	MERAUKE	13
3	BIAK	52	KEPULAUAN YAPEN	11
			SUPIORI	11
			BIAK NUMFOR	19
			WAROPEN	11
4	NABIRE	21	NABIRE	16
			INTAN JAYA	5
5	WAMENA	46	JAYAWIJAYA	2
			PUNCAK	10
			NDUGA	3
			TOLIKARA	19
			PUNCAK JAYA	7
			LANNY JAYA	5
<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>				
6	SORONG	82	KOTA SORONG	46
			KAIMANA	8
			MAYBRAT	5
			FAK FAK	4
			SORONG SELATAN	5
			RAJA AMPAT	14
7	MANOKWARI	64	MANOKWARI	30
			TELUK WONDAMA	19
			TELUK BINTUNI	15
	Total	389		389

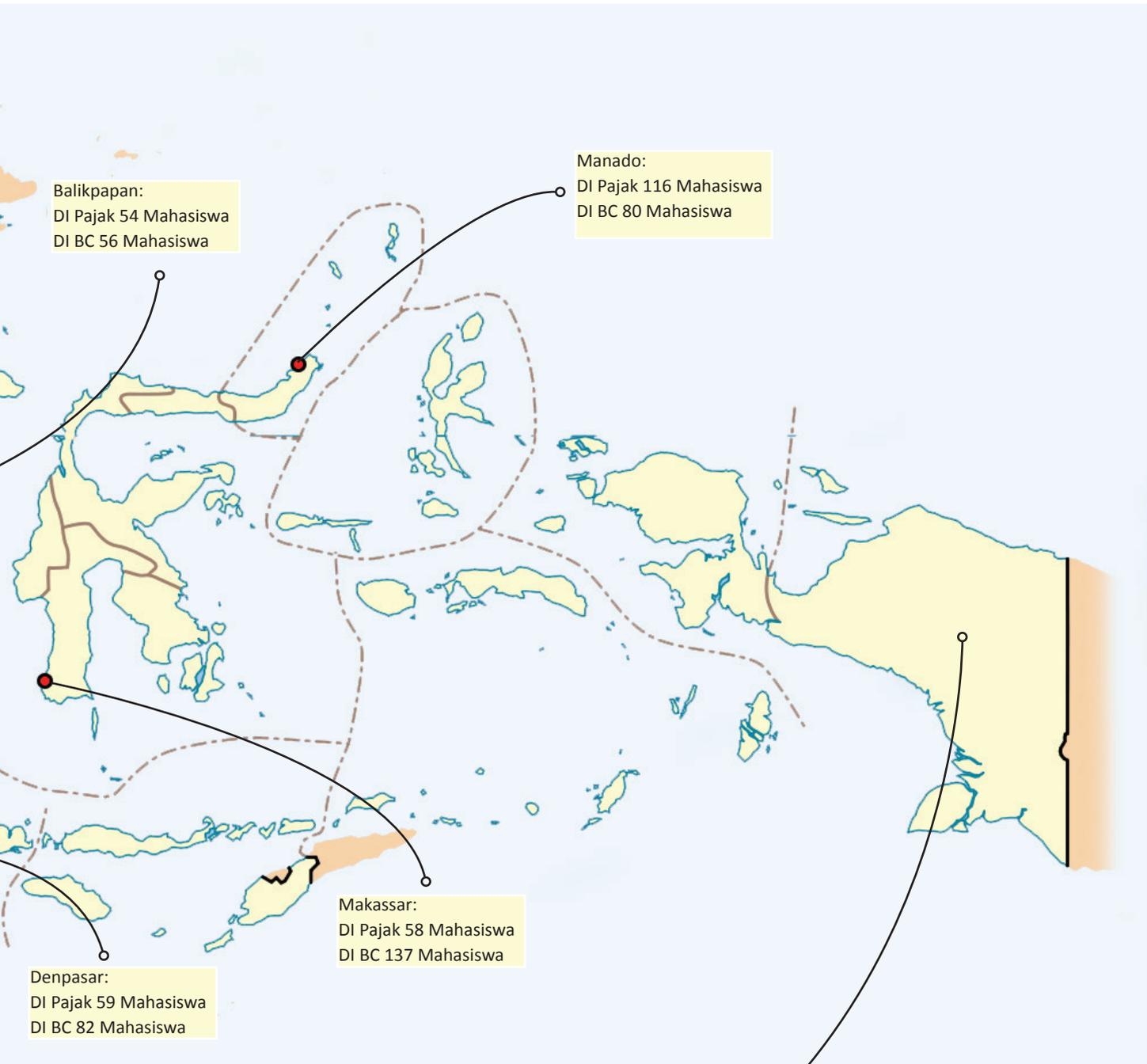
\*Penulis adalah Pranata Komputer dan Pelaksana Pada Bagian TIK Sekretariat BPPK

## Sebaran Mahasiswa STAN Tahun 2013



### Jakarta

DI PAJAK	595
DI BC	363
DIII KN	254
DIII PAJAK	332
DIII PBB	28
DIII PPLN	44
DIII AKT	1,381
DIII BC	154      149



Mahasiswa Prodip I Papua

No.	Lokasi Pendidikan	Jumlah
1	STAN Bintaro	86
2	BDK Medan	30
3	BDK Palembang	30
4	BDK Cimahi	30
5	BDK Malang	30
Total		206

Mahasiswa Prodip I Sumbawa : 34 orang



# Peran STAN dalam Mencetak Pegawai Keuangan Negara

Oleh : M. Ichsan

**Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)** merupakan sekolah tinggi kedinasan penyelenggara Program Diploma Bidang Keuangan yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aturan terbaru terkait ikatan dinas lulusan STAN adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Ikatan Dinas ini merupakan perjanjian antara Menteri Keuangan dan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan mengenai perjanjian wajib kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Lamanya masa ikatan dinas lulusan STAN dihitung menggunakan rumus  $3n+1$ ,  $n$  adalah lamanya masa kuliah. Artinya bahwa jika seseorang menjalani kuliah selama 3 tahun di STAN, maka ikatan dinasnya selama 10 tahun  $((3 \times 3) + 1)$ . Selama menjalani ikatan dinas, lulusan STAN wajib bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan atau instansi Pemerintah lainnya. Dengan berakhirnya masa ikatan dinas atau membayar ganti rugi, lulusan STAN berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilainya.

Saat ini yang menjadikan lulusan STAN berbeda dengan periode awal dan menjadikan seolah-olah tidak ikatan dinas lagi adalah lulusan STAN tidak secara langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, berdasarkan peraturan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) lulusan STAN harus mengikuti mekanisme Tes Kompetensi Dasar (TKD).

## **STAN Mencetak SDM Keuangan Negara**

Program reguler STAN dengan Ujian Saringan Masuk (USM) merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilalui putra-putri terbaik bangsa untuk bisa dididik STAN. Peserta USM dengan jumlah puluhan ribu yang berasal dari berbagai daerah bersaing untuk mendapatkan kesempatan berkuliah gratis di STAN dan berharap langsung dapat bekerja setelah lulus kuliah. Tidak mengherankan jika informasi penerimaan mahasiswa baru STAN selalu ditunggu masyarakat luas.

Jumlah mahasiswa STAN yang begitu besar dan terbagi dalam beberapa program pendidikan, menjadikan daya tampung kampus STAN di Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang

Selatan tak lagi mencukupi. Untuk itu, STAN menyediakan kurikulum dan proses pendidikannya dibantu oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) yang berada di 11 daerah yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Pontianak, Balikpapan, Denpasar, Makassar dan Manado.

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh STAN terdiri dari Program Diploma I, Program Diploma III dan Program Diploma IV. Selain itu mahasiswa STAN juga terbagi dalam spesialisasi-spesialisasi yang mencerminkan keahlian yang dimiliki lulusannya. Spesialisasi tersebut adalah Akuntansi, Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kebendaharaan Negara, Kepabeanaan dan Cukai, dan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara. Oleh karena itu, lulusan STAN dibekali pengetahuan dan keterampilan serta keahlian profesional sesuai dengan spesialisasinya.

Memasuki pendidikan di STAN, mahasiswa diajar oleh para profesional yang berasal dari widyaiswara dan struktural Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pakar atau praktisi



Foto: Eros L. Mursalin

Kategori	Program	Kegiatan
Utama	Prodip Kemenkeu	USM (Reguler dan D-III Khusus/D-IV)
		D-I
		D-III
		D-IV
Ekstensi (Kerja Sama dan Mandiri)	Prodip Kerja Sama	D-I PBB (Penilai dan OC)
		D-I Kebendaharaan Negara
		D-IV Akuntansi (BPKP)
	Diklat	Pelayanan Tenaga
		Kerja Sama
Narasumber	Pelayanan Tenaga	
Lainnya	Penyediaan Barang/Jasa Lain	Kerja Sama
	Investasi/Perbankan	Sewa Aset
		Deposito
	Lain-lain	Giro
Denda Pekerjaan		
		Ganti Rugi

lainnya. Selain itu, serangkaian aturan-aturan yang ketat juga diterapkan guna membentuk tenaga ahli yang handal. Diantaranya, aturan perkuliahan dan Indeks Prestasi (IP) minimal pada tiap semesternya. Mahasiswa dapat melanjutkan kuliah jika memperoleh IP semester ganjil minimal 2,4 dan IP kumulatif pada semester genap minimal 2,75 serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, dinyatakan gugur atau lebih sering dikenal dengan istilah *Drop Out* (DO).

Pada semester terakhir, mahasiswa ditugaskan untuk menyusun karya tulis. Karya tulis ini berupa laporan praktik kerja lapangan (Laporan PKL), Tugas Akhir (TA) atau Skripsi. Dengan penyusunan karya tulis ini diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami teori yang diajarkan di bangku kuliah dan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, dapat dijadikan bekal pengetahuan mahasiswa sebelum terjun di dunia kerja.

### STAN Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Lahirnya BLU tak lepas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Pada Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar bagi STAN untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

Langkah STAN menjadi BLU dimulai sejak tahun 2006. Dalam proses perjalanannya, STAN menemui kendala-kendala, diantaranya: **Pertama**, belum adanya kesamaan pemahaman internal dan eksternal STAN mengenai urgensi perubahan status STAN menjadi BLU. Pemahaman ini dibutuhkan karena perubahan status BLU harus diikuti

dengan perubahan *mindset* pegawai.

**Kedua**, memenuhi persyaratan menjadi BLU. Untuk bisa ditetapkan menjadi BLU, satuan kerja instansi pemerintah harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Secara substantif, STAN bisa memenuhi karena menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penyediaan jasa layanan umum berupa pendidikan, bersifat operasional yang menghasilkan jasa, dan tidak mengutamakan keuntungan. Secara teknis, STAN harus bisa menunjukkan bahwa kinerja keuangan STAN sehat dan kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan. Sedangkan secara administratif dokumen yang harus diajukan adalah: 1) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; 2) Pola tata kelola berupa peraturan internal satuan kerja instansi pemerintah yang menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi; 3) Rencana Strategis Bisnis; 4) Laporan Keuangan; dan 5) Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Dinamika yang dihadapi dan sukses melewati kendala-kendala, membuat STAN resmi menjadi BLU sejak tanggal 31 Maret 2008, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.05/2008 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Departemen Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Namun secara efektif, Pengelolaan Keuangan BLU ini baru dilaksanakan mulai Januari 2009 dengan disahkannya DIPA BLU Tahun 2009. STAN diberikan status BLU secara penuh (100%).

Setelah ditetapkan menjadi BLU, STAN bisa lebih berperan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, bukan hanya menyelenggarakan pendidikan program diploma untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan. Saat ini kegiatan yang diselenggarakan STAN dapat

dikategorikan sebagai berikut:

### Stakeholder STAN

Statusnya sebagai BLU, memungkinkan STAN bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau Swasta. Dengan semakin luasnya layanan yang dapat diberikan tersebut, maka *stakeholder* STAN juga bertambah. Tidak hanya Kementerian Keuangan, namun meluas ke instansi pemerintah lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta. Selain itu, mahasiswa dan peserta diklat juga merupakan *stakeholder* utama STAN.

STAN berusaha memberikan layanan terbaik kepada *stakeholder* STAN dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan petugas dan pengajar, serta kurikulum. Dengan pelayanan yang terbaik tersebut diharapkan lulusan program pendidikan dan pelatihan mempunyai kompetensi yang handal dalam bidang keuangan negara, sehingga bisa menerapkan kinerja terbaik saat kembali ke unit kerja masing-masing.

Sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang berbentuk BLU, STAN bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan *stakeholder*. Mudah-mudahan, STAN dapat diibaratkan seperti *job order* dalam suatu pabrik. Dimana ada permintaan dari *stakeholder*, maka STAN akan menggarap permintaan tersebut dengan sebaik mungkin sehingga menjadi produk unggulan yang siap didayagunakan oleh *stakeholder* tersebut.

\*Penulis adalah Pranata Komputer pada Bagian TIK - Sekretariat BPPK



# Menjadi Wanita Teladan (melalui Jalur Widyaiswara)

Oleh :Tanda Setiya

### Awal Perjuangan

Hari yang cerah, disambut dengan senyuman sumringah seorang Jamila. Bertempat di ruang kerja yang sejuk, tepatnya di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, redaksi majalah Edukasi Keuangan berkesempatan untuk mewawancarai Widyaiswara teladan BPPK tahun 2012. Mengenakan (baju) *blazer* berwarna biru gelap, Bu Jamila, sapaan hangat wanita berkerudung ini, mengawali cerita tentang bagaimana perjuangannya untuk menembus USM STAN. Keuletan dan keteguhannya untuk belajar, membuat Jamila remaja dapat tembus USM STAN pada kesempatan pertama. Tahun 1993 adalah awal studi di STAN pada Spesialisasi Kebendaharaan Negara.

Niat kuat dipasang karena harus meninggalkan kota kelahirannya, Lamongan, untuk belajar hidup mandiri yang lebih dewasa dan berusaha untuk bermanfaat. Tanda-tanda menjadi wanita yang energik telah nampak ketika menjani masa perkuliahan di Jurangmangu. Berbagai kegiatan non akademik diikutinya. Mengasah ilmu pada kegiatan jurnalistik kampus mengantarkannya bergabung di redaksi Ordonatur dan sempat juga di Majalah Purnawarman. Disamping itu kegiatan keagamaanpun tak luput dari keterlibatannya. “Saya juga berusaha mengisi waktu kuliah dengan kegiatan lain yang menurut saya bermanfaat”, kenang PNS yang mengawali kariernya pada BPPK Kementerian Keuangan ini.

Walau demikian, amanah dari orang tua untuk tetap fokus pada kuliah tetap menjadi nomor wahid. Maklum, di STAN ancaman DO adalah momok yang menakutkan. Walau dengan seabreg aktivitas non akademis diikuti namun prestasi akademik Jamila muda waktu itu tidak mengecewakan. “Intinya kalau kita dalam menjalankan sesuatu itu dengan semangat, dan semua itu merupakan perjuangan, maka semua dapat kita kerjakan dengan baik. Itu yang menjadi prinsip saya ketika berjuang di STAN dulu”, imbuh anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Sudjono dan Ibu Sunarti ini.

Berhasil menuntaskan kuliah di STAN Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Jamila muda yang penuh cita ini ditempatkan pada Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang pada tahun 1996. Namun pengabdian di Malang tidak berlangsung lama karena harus hijrah ke Balai Diklat Medan, mengikuti suami tercinta, Harun Rosit, yang bertugas di wilayah Medan.

Setelah menikah dan memiliki 2 anak, bahkan saat mengandung anaknya yang ketiga, ambisinya tidak kendur untuk terus menuntut ilmu. Pada tahun 2005 Jamila berhasil menyelesaikan gelar kesarjanaanya di salah satu universitas negeri di Sumatera Utara yaitu USU (Universitas Sumatera Utara). Dengan tatapan mata yang tajam, ibu dari lima anak ini menuturkan bagaimana perjuangannya ketika kuliah di USU. “Masih ingat betul, ketika itu saya harus ke kampus



Foto: Eros L. Mursalin

malam (karena kuliah malam), saat hamil. Dan puncaknya adalah 2 minggu setelah melahirkan, saya harus balik kampus karena ada ujian. Saya jadi pusat perhatian saat menjadi mahasiwa S1. Bukan hanya karena hamil, juga karena saya tetap mengikuti perkuliahan. Mengikuti kegiatan di kampus dalam kondisi seperti itu. Belum lagi kalau sudah berhadapan dengan cuaca, hujan panas tetap semangat euyy”, kenangnya.

Jamila belum puas dengan S1 Studi Pembangunan, semangatnya untuk selalu menuntut ilmu sangat berkobar di dalam jiwanya. Maklum orang tuanya yang pendidik (awalnya guru kemudian menjadi penilik sekolah) sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu setinggi-tingginya dan yang penting bermanfaat bagi orang lain. Jamila kemudian melanjutkan ke jenjang pasca sarjana di kampus yang sama. Kuliah pasca sarjana dijalani dengan menyenangkan. Bertemu dengan teman-teman baru, suasana baru dan aktivitas baru amat menggembirakan. Kerja keras belajar dan serius penuh kesungguhan akhirnya berbuah amat manis. Jamila menjadi mahasiswa dengan lulusan tercepat dan nilai *cum laude*. Semua itu diraih bukan dengan kebetulan, tapi penuh perjuangan. Siang bekerja di kantor dan malamnya kuliah. Bahkan hari sabtu pun diisi dengan kuliah.

### WI menjadi pilihan

Sejak kecil Jamila sudah terbiasa dengan lingkungan pendidikan. Banyak cerita sang ayah di kala kecil yang kemudian menginspirasi untuk bercita-cita menjadi guru. “Seiring berjalannya waktu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mulianya seorang guru. Setiap lebaran, saya melihat banyak mantan murid ayah saya yang datang ke rumah. Padahal mereka bukan lagi menjadi murid. Bahkan sudah bertahun-tahun lepas dari sekolah, mereka tetap datang”, kenang Jamila.

Dari situlah ia melihat betapa berkharismanya seorang guru. Sangat dihargai oleh murid bahkan mantan murid sekalipun. Hal itulah yang

mendorongnya bercita-cita menjadi guru. Namun ternyata perjalanan hidup membawanya masuk ke STAN. Namun, sekali lagi, syukur Alhamdulillah karena ditempatkan di BPPK yang dekat dengan lingkungan pendidikan. Maka cita-cita masa kecil itu seakan hadir kembali. Walaupun bertahun-tahun menggeluti dunia keuangan, namun keinginan masa kecil itu tetap ada.

Jamila banyak diberi kesempatan untuk mengajar. Sejak dua tahun setelah penempatan, tepatnya di tahun 1998, walaupun belum menjadi widyaiswara (WI), jebolan SMAN 2 Lamongan ini telah banyak diberi peluang dan kesempatan untuk banyak mengajar. Kesempatan mengajar datang dari Kemenkeu, Kementerian lain, lembaga bahkan Pemda. Tahun demi tahun yang dilewati memantapkan dirinya untuk menjadi widyaiswara di tahun 2009.

### Kiprah menjadi WI

“Hari-hari menjadi widyaiswara adalah hari-hari yang sangat menyenangkan”, ungkap perempuan kelahiran Lamongan, 16 April 1975 ini. Jamila melanjutkan ceritanya, “Jika sedang mengajar, saya akan bertemu dengan orang yang baru, pengalaman baru, suasana baru dan energi baru. Jika sedang di kelas, sebenarnya saya juga banyak belajar dari peserta diklat. Diam-diam saya mengambil apa yang bisa saya ambil dari pengalaman orang lain di kelas. Dan itu menjadi bahan bagi saya untuk kemudian saya sampaikan lagi di kelas yang berbeda. Saya mengistilahkan itu adalah *multiplier effect* yang dahsyat dari kesungguhan kita di kelas. Dan itu efeknya akan terasa kepada orang banyak, bukan hanya kepada saya pribadi.”

Saat diluar jam mengajar atau tidak sedang terlibat dalam kediklatan maka Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta ini selalu melakukan hal-hal lain yang bermanfaat. Diantaranya membaca, menulis, bahkan berimajinasi yang konon merupakan kesehariannya.

Widyaiswara dengan nama lengkap Jamila Lestyowati ini memiliki prinsip

dan berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik, dan berusaha untuk menjadi sosok widyaiswara yang dirindukan dan dikenang.

Ketika ditanya apa yang menjadi suka dan duka menjadi WI? Diawali dengan senyum khasnya, Jamila mengisahkan, “saat paling menyenangkan adalah ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain di kelas. Hal ini bisa dilihat dari banyak sisi. Misalnya saya menyampaikan hal-hal yang baru, dan itu diakui oleh peserta sebagai hal yang berguna bagi mereka. Saya merasa sesuatu meyenangkan jika bisa menikmati pekerjaan ini bersama-sama dengan peserta di kelas. Saya bisa melihat senyum dan tawa bahagia dari para peserta.”

“Suatu saat saya pernah mendapatkan status dari peserta diklat yang dulu pernah menjadi mahasiswa saya. Setelah sekian tahun tidak ketemu, kemudian dia berada di kelas diklat saya dan menyatakan ‘Ibu masih semangat full seperti dulu’. Ini membuat saya bahagia, bisa membuat orang lain senang, bahagia dan semoga bisa menginspirasi. Ini yang pingin terus saya pertahankan dan tingkatkan”, ceritanya mengenai kesan salah satu peserta diklat.

Baginya, saat yang tidak menyenangkan adalah ketika mengajar dirasa kurang optimal di kelas. Saat mengajar semaksimal mungkin, namun kelas masih belum bergairah. Tantangan terbesarnya adalah untuk bisa membuat peserta *enjoy* dan nyaman di kelas. Widyaiswara yang mengawali karier WInya di BDK Medan ini menambahkan, pengalaman yang telah dilalui tidak lepas dari cerita yang menegangkan. Tepatnya ketika dalam perjalanan menuju Kabupaten Aceh Utara untuk mengajar. Naik pesawat, lalu naik mobil dinas dan dengan bis umum. Yang mendebarkan ketika naik bis umum bersama seorang teman. Saat itu tahun 2006, ketika Provinsi Aceh masih belum aman benar. Beberapa kali bis dihentikan oleh TNI untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika melewati daerah yang konon rawan, suasana benar-benar mencekam. Tidak ada suara yang keluar. Mungkin hanya

desah nafas sendiri yang terdengar. Benar-benar sepi. Alhamdulillah akhirnya perjalanan bisa lancar sampai tujuan ke Pemda Aceh utara.

#### **A Rising Star of WI**

Baru 2 tahun menjadi WI dan telah menyabet gelar WI Teladan se-Kementerian Keuangan. Bahkan di tahun pertama menjadi WI sudah masuk nominasi WI Teladan BPPK. Ketika ditanya apa rahasianya dalam rentang waktu yang relatif singkat Ibu Jamila bisa meraih semua ini, ia menguraikan "Saya merasa kaget ketika dinobatkan menjadi wi teladan. Karena saya yakin semua widyaiswara adalah teladan. Para widyaiswara memiliki unsur-unsur untuk disebut teladan. Saya mungkin beruntung sekarang. Tapi sekali lagi, setiap wi adalah pantas untuk disebut teladan".

Selanjutnya, WI yang sejak tahun 2012 hijrah ke BDK Yogyakarta ini menuturkan, "Sebenarnya saya tidak kilat kok mendapatkan semua ini. Saya sudah mengajar sejak tahun 1998. Jadi dunia dikjartih (pendidikan, pengajaran dan atau pelatihan) tidak saya mulai saat masuk menjadi WI". Ia menceritakan bahwa mengajar, membuat soal, mengoreksi ujian, menyapa peserta, mendampingi peserta diklat, dan hal-hal yang tak jauh dari dunia WI sudah dilakukannya sejak lama. Bahkan saat SMA, ia sudah membantu ayahnya mengoreksi ujian, menyiapkan bahan pelajaran dan pernah juga mengetik nilai ujian. "Jadi jika ada anggapan saya dapat melalui jenjang yang ada dengan cepat, saya pikir tidak juga. Saya pelan-pelan meniti tangga itu. Mulai dari anak tangga pertama hingga anak tangga sekarang yang saya injak. Kalau menulis? Hmm, sejak kecil saya menulis. Tulisan pertama saya dimuat di majalah saat saya SMP. Saya ingat persis honoranya waktu itu Rp 5.000,00 honor yang besar untuk anak SMP", ceritanya mengenang masa lalu.

#### **Antara Keluarga dan Karir**

Antara Keluarga dan Karir merupakan peran ganda yang dijalani oleh Jamila. Karir sebagai WI menuntut kerja keras dan waktu tersendiri. Prinsip

yang dipegangnya adalah keluarga tidak boleh dikesampingkan. Peran ganda harus bisa disinergikan, bukan dipertentangkan. Walaupun memiliki anak yang terbilang tidak sedikit untuk ukuran kekinian, namun semua dapat berjalan dengan baik. Setiap waktu yang merupakan bagian keluarga harus betul-betul dioptimalkan untuk kepentingan keluarga, apalagi suami juga bekerja maka hari libur adalah hari yang harus berkualitas untuk keluarga. Jamila selalu merasa bersyukur atas karunia yang besar, suami dan anak-anak yang mengerti dan memahami perannya.

#### **Harapan ke depan**

"Harapan saya kedepan sangat banyak" adalah kalimat yang langsung terlontar dari sosok yang memiliki cita-cita yang besar ini.

Masih ada beberapa target dan harapan yang ia ingin wujudkan. Pertama sebagai hamba Allah. Ia ingin menjadi hamba yang *sholihah*. Kedua sebagai istr. Sebagai seorang wanita yang bekerja, Jamila tetap seorang istri yang harus patuh kepada suami. Ketiga, sebagai ibu dari anak-anak. Dengan jumlah anak yang banyak, maka harus bisa membagi rasa sayang secara adil. Walau salah satu anaknya tinggal di pesantren, namun kasih sayang tetap harus selalu diberikan. "Apapun prestasi saya, saya adalah ibu dari anak-anak saya", jelasnya dengan mata menerawang keatas. Keempat sebagai seorang WI dan juga anggota masyarakat, ia berusaha untuk dapat mengemban peranan tersebut sebaik-baiknya. Semua peranan tersebut diupayakan agar setiap tahun terus mengalami peningkatan. "Dan caranya adalah bekerja sajalah, seperti yang diperintahkan dalam agama: *bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang beriman akan melihat hasil pekerjaanmu.*"

Sebuah prinsip yang selalu Jamila pegang adalah, "menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas saya. Tidak lebih. Jika saya mengerjakan tugas dengan baik, maka secara otomatis hal itu akan mempermudah tugas orang lain. Dan jika orang lain itu juga mengerjakan

tugasnya dengan baik, maka orang pada aliran berikutnya yang akan merasakan manfaatnya, sederhana bukan?". Setiap orang mengerjakan porsinya masing-masing dengan baik.

WI yang gemar makanan rumahan ini memiliki harapan kepada BPPK sebagai lembaga diklat. BPPK adalah lembaga yang krusial. Maka, mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkannya adalah tugas yang sangat berat. Tumbuh berarti makin besar, berkembang berarti makin banyak. Lembaga diklat berarti berhadapan dengan peserta diklat. Dan ujung tombaknya adalah Widyaiswara. Maka, tentu saja tugas tumbuh kembang tadi juga harus diinternalisasikan kedalam jiwa WI itu sendiri. Agar WI bisa tumbuh menjadi lebih besar dan berkembang menjadi lebih banyak (terutama kualitasnya). Demikian juga lembaga diklat, harus dapat bekerjasama untuk saling mendukung meraih apa yang telah dicita-citakan bersama seperti yang tertuang didalam Tugas dan Fungsi institusi.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat KNPk

# Serambi Ilmu

- **Siapakah Kita dengan *E-Learning*?**
- **Manajemen Pajak:Efektifkah Penerapan *Corporate Governance*?**
- **Keterlibatan Media dalam Kebijakan Fiskal**
- **Potret Kecil Perdagangan Ilegal dan Alternatif Pemecahannya**
- **Mengapa Harus Melaporkan Harta Kekayaan**
- **Mengungkap Rahasia Logical Test dan Array Operations pada Ms. Excel**
- **Virus VS Antivirus**

# Siapakah Kita dengan e-Learning?

Oleh :Wawan Ismawandi

Beberapa tahun lalu konsep e-learning sudah mulai dikenalkan. Beberapa dari kita, bahkan banyak dari kita, sudah mendengar mengenai e-learning. Ada yang mempersepsikan e-learning itu sebagai belajar dengan internet. Ada juga yang mengira itu adalah perangkat komputer, CD, bahkan sampai ada yang beranggapan bahwa e-learning itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Sepertinya tidak ada yang salah dengan anggapan di atas, namun tidak sepenuhnya benar. Pada dasarnya e-learning pasti berhubungan dengan suatu pembelajaran, karena “learning” berasal dari bahasa asing yang berarti pembelajaran. Huruf “e” di depan *learning* berarti elektronik. Sehingga secara terjemahan harfiah, sing-

katnya, penulis dapat mengatakan bahwa arti tulisan e-learning berarti pembelajaran dengan perangkat elektronik. Apakah sesederhana itu? Bisa ya, bisa tidak.

Membicarakan e-learning, tidak lepas dari belajar jarak jauh atau yang biasa disebut *distance learning*. Disebut demikian karena pada awalnya belajar jarak jauh adalah sebuah model belajar bagi seseorang tanpa perlu hadir di suatu lokasi khusus atau kelas. Banyak contoh sederhana yang menunjukkan bahwa kita sudah menggunakan model belajar ini, yang secara tidak sadar sudah kita lakukan sehari-hari, misalnya kita membaca buku atau melihat video bagaimana memperbaiki kerusakan motor sederhana, atau sekedar untuk membuat makan-

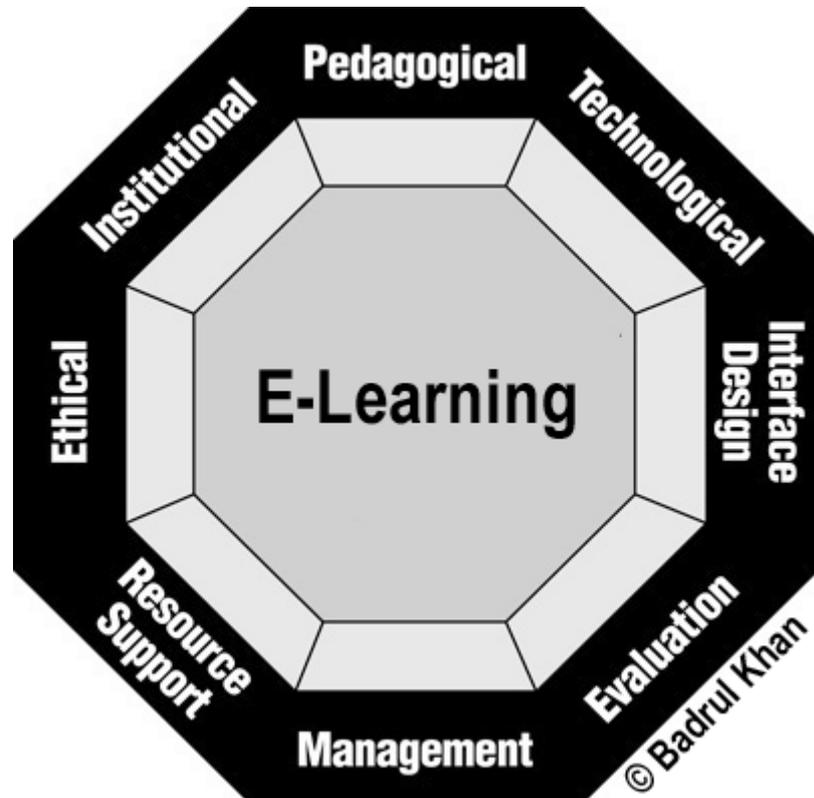
an dari olahan ikan. Banyak dari kita merasa tidak perlu hadir di kelas montir atau kelas memasak untuk bisa melakukan hal-hal tadi. Namun demikian bukan berarti untuk hal-hal yang rumit kita harus hadir di kelas tertentu atau lokasi khusus untuk belajar. Mungkin inilah bentuk paling sederhana dari e-learning. Namun kalau diperhatikan dari contoh sederhana tersebut, ada unsur kebutuhan, sehingga konsep belajar jarak jauh, boleh disebut *distance learning* atau e-learning sekalipun, mempunyai dasar pemikiran yang sama yaitu adanya kemandirian seseorang dalam belajar atas dasar membutuhkan suatu pengetahuan atau ketrampilan.

Pada awal kemunculan dan berkem-

bangnya e-learning, banyak sekali pendidik, *trainer*, fasilitator atau apapun namanya berusaha mengkonversi atau mentransformasikan materinya dari manual (buku, kajian, modul) ke dalam bentuk elektronik, baik berupa file elektronik, dikemas dalam CD, interaktif website, offline website, video dan bentuk-bentuk elektronik lainnya. Sekali lagi penulis katakan, tidak ada yang salah dengan itu, namun tidak juga sepenuhnya tepat. Untuk membuat e-learning benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran dan bukan hanya sebagai bahan bacaan atau transformasi materi, seperti contoh diatas. Desain e-learning harus menginformasikan kepada pembaca materi, apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan terhadap materi tersebut, bagaimana cara mempelajari materi tersebut dan apa yang harus dilakukan setelah materi tersebut selesai dibaca. Sekali lagi, apakah sesederhana itu? Bisa ya, bisa tidak.

Marilah kita lihat kerangka (framework) dari e-learning menurut Dr. Badrul H. Khan dalam salah satu bukunya yang bertemakan *e-learning framework*, mengatakan bahwa terdapat 8 dimensi *e-learning framework* yaitu :

1. Pedagogical, dimensi ini berhubungan dengan proses belajar mengajar, termasuk didalamnya analisis materi, tujuan pembelajaran, analisis pembaca materi, kebutuhan pembaca materi, media belajar yang digunakan, dan strategi pembelajaran.
2. Technological, dimensi ini terkait dengan kesiapan infrastruktur dari hasil analisis dimensi pertama, yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan.
3. Interface design, dimensi ini berhubungan dengan tampilan, tata letak, desain isi, dan kemudahan penggunaan.
4. Evaluation, dimensi yang terkait dengan alat ukur untuk menguji keberhasilan pembaca materi dan mengevaluasi ketepatan proses pembelajaran.
5. Management, dimensi ini berhubungan dengan proses menjaga kesinambungan dari proses pembelajaran dan penyebaran informasi terkait e-learning.
6. Resource Support, dimensi yang terkait dengan dukungan kepada pembaca materi dan segala sumberdaya yang dapat mendukung proses pembelajaran.
7. Ethical, dimensi ini mempertimbangkan proses pembelajaran dengan budaya belajar, perbedaan geografis, perbedaan latar belakang pembaca materi, kemudahan akses



sumber: <http://asianvu.com/bookstoread/framework/>

e-learning, dan aspek hukum.

8. Institutional, dimensi yang terkait dengan pengelolaan administrasi secara umum dan organisasi.

Kalau kita perhatikan kesemua dimensi tersebut, hampir semuanya sudah dilakukan oleh organisasi yang secara tugas fungsinya melaksanakan pendidikan dan pelatihan, khususnya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dengan pendekatan model klasikal (*class room training*). Berbagai kegiatan, mulai dari merencanakan, menyusun program diklat, menyusun kurikulum, sampai dengan pelaksanaan, pasti sudah mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut. Lantas, dimana bedanya dengan model pembelajaran berbasis e-learning? Apakah perbedaannya terletak hanya di media elektroniknya atau media belajarnya saja?

Pada dasarnya e-learning merupakan salah satu model pembelajaran, sehingga seharusnya mempunyai tujuan yang sama dengan proses pembelajaran di dalam kelas atau banyak orang yang menyebutnya dengan model klasikal. Hasil analisis kedelapan dimensi itulah yang akan menentukan, kapan sebuah program diklat menggunakan model pembelajaran yang mana atau bahkan bisa menggabungkan dua model pembelajaran tersebut, antara klasikal dan e-learning. Jadi sekali lagi, tidak hanya sekedar mentransformasikan materi manual ke dalam bentuk elektronik, seperti yang sudah disebutkan pada awal tulisan ini, namun ada peran lebih dari teknologi. Adapun peran teknologi dalam proses e-learning antara lain sebagai media belajar dengan materi yang sudah dikonversi, sebagai media yang dapat membantu mendistribusikan, mencatat, serta mengadministrasikan peserta didik. Saat ini banyak tersedia Learning Management System (LMS) atau Learning Content management System (LCMS) yang merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi menggantikan peran administrasi, ruang diskusi, tempat penyimpanan materi, bahkan ruang kelas sekalipun. Belajar secara *online* dengan menggunakan

*website* khusus, maupun belajar secara *offline* dengan media yang sudah dikonversikan ke dalam bentuk elektronik, merupakan salah satu bentuk e-learning juga, sepanjang desain e-learning sudah mempertimbangkan beberapa dimensi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pertemuan pengajar dengan peserta ajar secara *real time* dapat menggunakan bantuan teknologi, walaupun terdapat kelas yang banyak, berbeda waktu serta berjauhan. Penggunaan video conference dapat menjawabnya.

Jadi, kembali ke pertanyaan pada judul tulisan ini, Siakah kita dengan dengan e-learning? Kalau selama ini sudah melaksanakan puluhan, ratusan bahkan ribuan kelas pelatihan, maka tidak ada yang perlu disangsikan, bahwa kita pasti siap dan bisa. Pada akhirnya penulis melihat bahwa e-learning itu adalah *learning* itu sendiri. Haruskah kita menggunakan e-learning? Apakah tetap pada model klasikal? Atau menggunakan gabungan keduanya? Semuanya kita yang memutuskan, tidak ada yang salah dengan model pembelajaran tersebut, karena semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan ketrampilan seseorang. Satu kalimat yang perlu diingat bahwa "*e-learning is about learning, it's not about an "e"*".

\*Penulis adalah Kasubbag Komunikasi Publik pada Sekretariat BPPK

# Manajemen Pajak: Efektifkah Penerapan *Corporate Governance*?

Oleh : Hendra Putra Irawan

## **Corporate Governance, The Lately Issue**

Isu *corporate governance* (CG) di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Jamie Allan (Sekretaris Jenderal *The Asian Corporate Governance Association*), menyebutkan bahwa penerapan *corporate governance* di setiap negara dapat berbeda-beda. Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan, dan efisien. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah

dengan efisiensi pembayaran pajak.

Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak. Scholes et al (2002), seperti dikutip oleh Phillips (2003), mendefinisikan perencanaan pajak efektif sebagai perencanaan pajak yang meminimalkan arus kas untuk pembayaran pajak perusahaan, mengharuskan manajer untuk memperkirakan manfaat dari keputusan mereka terhadap pembayaran pajak tersebut.

Literatur mengenai pengaruh CG terhadap manajemen pajak telah banyak ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut mengemukakan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Untuk menjembatani konflik agar masalah agensi tersebut dapat dikurangi, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer.

Selain hal itu, penerapan CG yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan manajemen selaku pengelola operasional perusahaan. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemberian kompensasi yang tepat kepada manajemen dapat menjadi sebuah mekanisme penerapan CG yang baik.

**Manajemen Pajak dan Corporate Governance (CG)**

Banyak anggapan bahwa meminimalisasi pajak adalah tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*). Pandangan ini sangat sempit karena pajak merupakan salah satu faktor, meskipun merupakan faktor utama, dalam serangkaian biaya. Faktor lainnya yang menghasilkan jumlah yang sering dikenai pajak, yaitu keuntungan dan kekayaan. Manajemen pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengelolaan pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan

manfaat kepada mereka juga. Sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal. Isu sentral dari CG adalah berdasarkan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Teori Agensi menjelaskan secara komprehensif mengenai konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal, yang biasa disebut sebagai masalah agensi. Seringkali untuk menjembatani konflik tersebut dibutuhkan biaya (*agency cost*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya CG, *agency cost* dapat dikurangi. Pengurangan ini akan lebih mengefektifkan kinerja perusahaan sehingga mampu memaksimalkan marjin laba. Peningkatan kinerja perusahaan juga akan tercermin dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan CG untuk memaksimalkan nilai pemegang saham perusahaan. Minnick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme CG memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak.

Perusahaan (perusahaan publik manufaktur sepanjang tahun 2004 – 2009) rata-rata membayar pajak lebih dari 34% dari nilai laba sebelum pajak. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia dalam rentang tahun 2004 – 2008 menggunakan tingkat tertinggi 30%. Sedangkan untuk tahun 2009 menggunakan tarif 28%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata

pajak efektif 34% tergolong tinggi untuk kondisi di Indonesia. Hanya terdapat 9,3% dari sampel yang membayar pajak di bawah 20%.

Nilai rata-rata total kompensasi yang diterima direksi selama setahun menunjukkan Rp 16,3 Milyar per tahun. Kompensasi terendah adalah Rp 383 Juta per tahun dan kompensasi tertinggi Rp 251 Milyar per tahun. Hal ini menunjukkan jumlah kompensasi antar perusahaan sangat variatif yang sangat mungkin bergantung pada jumlah direksi dan ukuran perusahaan. Persentase kepemilikan saham perusahaan oleh direksi rata-rata sebesar 0,3%. Hal ini berarti kepemilikan saham oleh direksi pada perusahaan rendah. Perusahaan telah menerapkan CG pada semua aspek dalam perusahaan sampai dengan 68%. Hal ini berarti penerapan CG rata-rata masih cenderung rendah karena hanya memenuhi persyaratan minimal dalam CG.

**The Real Record**

Tingkat kompensasi direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kenaikan satu poin dalam tingkat kompensasi direksi akan menghasilkan kenaikan pembayaran pajak sebesar 5,1%. Menurut Desai dan Dharmapala (2006), buruknya kualitas *corporate governance* menyebabkan setiap peningkatan penyalarsan kepentingan antara eksekutif perusahaan dan pemegang saham menjadi alasan utama yang mendorong manajer mengurangi tingkat penghindaran pajak yang menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih tinggi. Tetapi hubungan ini tidak berlaku pada perusahaan dengan *corporate governance* yang baik. Pada perusahaan yang mengelola CG dengan baik, penyalarsan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif melalui peningkatan kompensasi tidak berlaku. Sehingga peningkatan terhadap kompensasi direksi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian pemberian kompensasi yang tinggi terhadap direksi bukan

Tabel Statistik

	Obs.	Mean	Min.	Maks.
CETR	150	0.344231	0.018802	0.696234
KOMPDIR*	150	16,300,000	383,000	251,000,000
SAHAMDIR	150	0.002980	0.000000	0.078769
CG	150	0.676027	0.552330	0.860400

CETR merupakan *cash effective tax rate* dalam setahun yang diperoleh dari perbandingan pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak. KOMPDIR merupakan total kompensasi yang diterima direksi dalam setahun. SAHAMDIR adalah persentase kepemilikan direksi atas saham perusahaan. CG merupakan skor CG oleh IICD. \*dalam ribuan; \*\*dalam jutaan

Sumber: Data Olahan

merupakan suatu cara yang efektif dalam meningkatkan usaha manajemen pajak dengan memperkecil pembayaran pajak. Hal ini disebabkan adanya mekanisme lain yang lebih tepat diterapkan untuk mengelola manajemen pajak perusahaan.

Kepemilikan saham direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam struktur saham perusahaan dianggap mampu menyalurkan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif perusahaan. Hubungan ini awalnya telah dibuktikan oleh Jensen dan Meckling (1976) pada penelitian mereka. Sejak saat itu, telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa dengan adanya kepemilikan saham direksi akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hu dan Zhou (2008) juga menemukan bukti yang signifikan dan positif atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan di China. Hermalin dan Weisbach (1991) serta Core dan Larcker (2002) juga membuktikan hubungan yang serupa. Adanya kepemilikan saham direksi mendorong para eksekutif untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satunya dengan manajemen pajak yang baik melalui pengurangan pembayaran pajak perusahaan. Karena

dengan usaha tersebut, eksekutif tidak hanya menjalankan keinginan para pemegang saham tetapi juga memberi manfaat atas kepentingan mereka sendiri melalui *bottom-line performance* yang baik.

Penerapan CG dalam perusahaan meningkatkan pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut menyimpulkan bahwa penerapan CG dalam perusahaan tidak mempengaruhi usaha manajemen untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan dan mempunyai hubungan sebaliknya. Hubungan positif dan signifikan ini dapat terjadi karena penerapan CG dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak. Perusahaan lebih berhati-hati karena terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak.

#### Evaluasi – Langkah Selanjutnya

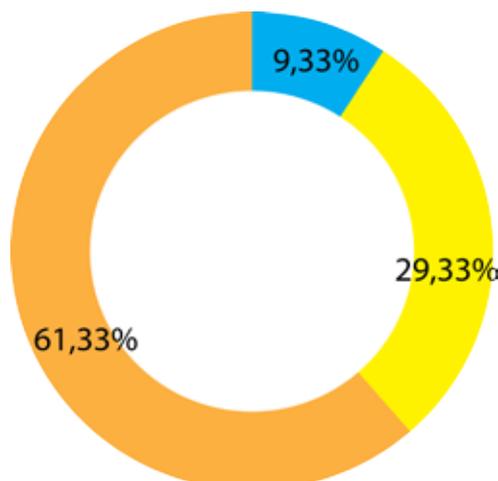
Pemberian tingkat kompensasi direksi yang ada di Indonesia tidak menyebabkan efisiensi manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi bukan cara yang efektif untuk mendorong usaha manajemen pajak perusahaan. Karena terdapat cara yang lebih efektif yang memberikan pengaruh untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan. Kepemilikan saham oleh direksi mampu menyalurkan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan eksekutif perusahaan. Sehingga hal ini mendorong para manajer melakukan upaya efisiensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini mengelola manajemen pajak dengan memperkecil pembayaran pajak perusahaan. Sehingga kepemilikan direksi lebih efektif untuk mendorong usaha manajemen pajak perusahaan.

Penerapan CG mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam terhadap pembayaran pajak. Semakin tinggi skor CG yang diperoleh perusahaan, maka tingkat pembayaran pajak pun semakin tinggi. Skor CG menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan

asas yang disusun oleh OECD. Sehingga penerapan CG dapat mencegah perusahaan melakukan *tax avoidance* yang berlebihan. Perusahaan lebih berhati-hati dalam pengelolaan manajemen pajaknya. Akibatnya usaha tersebut tidak dilakukan secara agresif. Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh atas pajak perusahaan. Sehingga manajemen tidak berfokus pada usaha minimalisasi pembayaran pajak.

Perusahaan harus mengevaluasi kebijakan agar pemberian kompensasi kepada direksi dan kepemilikan direksi dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Melalui Komite Remunerasi, perusahaan dapat mengukur tingkat kompensasi yang sesuai agar mampu menstimulasi manajemen meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak. Hal ini dikarenakan dampak terhadap manajemen pajak akan terasa dalam jangka panjang bagi perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, sebagai regulator penerapan pajak dan CG, hasil tulisan menunjukkan bahwa penerapan CG yang telah ada belum dapat diterapkan secara maksimal oleh perusahaan. Pemerintah perlu mengevaluasi peraturan penerapan CG oleh perusahaan sehingga menjadi lebih baik. Selain itu pemerintah perlu mengatur keselarasan antara penerapan CG dan pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini agar kebijakan CG dan pajak saling mendukung dan menciptakan suatu kondisi yang sehat bagi perusahaan.

\*Penelitian penulis *The Effect of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management* yang dimuat di *The Indonesian Journal of Accounting Research*, Volume 16, No. 1, January 2013



Grafik.

Sebaran Tingkat Pembayaran Pajak Perusahaan

\*Penulis adalah Pelaksana pada Bagian TIK Sekretariat BPPK

# Keterlibatan Media dalam Kebijakan Fiskal

Oleh : Rostamaji Kornawan

## KETERLIBATAN MEDIA DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Keterlibatan pihak eksternal dalam mempengaruhi kebijakan fiskal juga turut mempengaruhi kinerja institusi Kementerian Keuangan selaku pengelola kebijakan fiskal. *Mass Media* berperan sebagai pihak eksternal dari Kementerian Keuangan yang telah mempengaruhi kinerja Kementerian Keuangan terutama dalam mensosialisasikan atau menyampaikan secara luas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk memantau perkembangan media atas pemberitaan yang telah mereka lakukan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebagai salah satu biro yang berada di struktur organisasi Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk memantau perkembangan opini publik yang disampaikan oleh *mass media*.

Melihat perkembangan *mass media* yang semakin kompleks baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, kemampuan menganalisa opini publik saat ini telah menjadi sebuah keharusan dan menjadi bagian dari prioritas fungsi

dan tugas pemerintah, terutama yang terkait dengan kebijakan fiskal yang dimotori oleh Kementerian Keuangan. Prespektif yang disampaikan oleh *mass media* sangatlah beragam sehingga analisa yang diperlukan pun harus memiliki kecermatan, baik dari sisi subyektifitas maupun obyektifitas si pembuat analisa. Untuk menghadirkan analisa tersebut, tulisan ini sengaja ingin memberikan sebuah edukasi yang bermanfaat di kalangan pembuat analisa kebijakan fiskal dimana sumber referensi yang diperoleh adalah *mass media*. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya yang berkecimpung di dunia jurnalistik secara umum. Sasaran penjabaran kerangka kerja manajemen opini publik ini tentunya mengharapkan lahirnya sebuah terobosan baru dimana kebijakan fiskal dapat dipertimbangkan yang salah satunya dengan mendasari pada *public opinion assessment*.

### Menentukan Analisis

Metode sederhana yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum atau

sebagian besar analisis dalam menilai *content* yang ada di *mass media* adalah dengan melakukan analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk menilai sebuah berita berdasarkan tema secara komprehensif dimana para pembaca dan analisis bisa menentukan apakah *tone* berita tersebut positif, negatif, atau pun netral.

Selain analisis tematik, metode analisis lainnya bisa juga digunakan seperti analisis fisik, sintaksis, dan referensial. Analisis fisik didasari pada luas atau pun panjang sebuah berita. Sedangkan analisis sintaksis melihat pada penekanan kata yang menjadi *key indicator* sebuah berita. Demikian pula analisis referensial tidak jauh berbeda dengan analisis sintaksis. Perbedaannya terletak pada kata atau kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kata atau kalimat yang menjadi *key indicator* di dalam berita tersebut.

Bentuk analisis lainnya adalah analisis framing. Analisis framing dilakukan dengan melihat bagian terpenting dari sebuah peristiwa. Bagian terpenting dari peristiwa tersebut

didukung dengan bukti-bukti yang mendukung fakta ataupun peristiwa tersebut. Bukti-bukti tersebut dapat dianalogikan kedalam bentuk seperti foto, kata, kalimat, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang mewakili bagian terpenting dari peristiwa tersebut.

Terkait dengan isu kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi pertengahan tahun 2013 ini, beberapa media menyajikan isu tersebut dari sudut pandang dan *style* yang berbeda-beda. Bagi *mass media*, isu kebijakan fiskal tentang kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan isu yang sangat krusial dimana kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan perekonomian bangsa. Hari-hari menjelang diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut menjadi bahan kajian kami untuk menganalisa pemberitaan *mass media*. Untuk menganalisa pemberitaan tersebut, kami menggunakan analisa sintaksis dan tematik. Kedua analisis tersebut menjadi contoh sebuah analisa *mass media* terhadap kebijakan fiskal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan secara garis besar, substansi analisa ini adalah teknik menganalisa teks yang dimuat dalam sebuah berita.

### **Analisis Tematik Pada Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi**

Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi wacana yang diperdebatkan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, legislatif, masyarakat, maupun pengamat kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Wacana tersebut dikeluarkan setelah kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga BBM di pasaran dunia sehingga mempengaruhi besaran subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Puncak diberlakukannya kenaikan harga BBM tersebut saat *mass media* semakin gencar membahas masalah tersebut. Pada bulan Juni 2013, pemerintah sudah membuat kesepakatan untuk menaikkan harga BBM tersebut.

Kami mencoba mengamati *sample* berita kenaikan harga BBM tersebut yang diberitakan oleh dua surat kabar nasional

yaitu Kompas dan Investor Daily. Berita diambil pada tanggal 18 Juni 2013 dimana pada saat itu pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menyetujui RAPBN-P 2013. Berita yang diambil ditempatkan oleh kedua surat kabar tersebut pada *headline* sehingga isu kenaikan harga BBM menjadi *hot issue* yang berkembang pada hari-hari terakhir di bulan tersebut.

Kompas tanggal 18 Juni 2013 membuat *headline* berita yang tema utamanya masih terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Judul berita tersebut adalah “Harga BBM Segera Naik, Mayoritas DPR Setuju RAPBN-P Tahun 2013” (lihat box 1). Demikian pula Investor Daily menyampaikan berita tersebut dengan tema yang sama dengan yang diungkapkan oleh harian Kompas pada tanggal yang sama. Berita tersebut berjudul “338 Anggota Setuju, 181 Menolak, Mayoritas DPR Setuju BBM Naik” (lihat box 2). Kedua berita diatas menempatkan isu berita tersebut pada *headline* dan keduanya memiliki arah pemberitaan yang hampir serupa. Judul yang ditampilkan pun tidak ada sinyal berita tersebut mengarahkan pada tendensi *tone* yang negatif.

Hasil analisa tematik yang kami lihat pada berita yang diberitakan pada harian Kompas memperlihatkan secara keseluruhan bahwa isu kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi melalui persetujuan RAPBN-P 2013 diberitakan secara informatif. Berita tersebut tidak memiliki tendensi yang mengarah kepada sikap skeptis, oposisi, atau pun negatif. Berita yang tersusun sebanyak 27 paragraf melihat peran DPR sangat menentukan setuju, tidak setujunya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hampir mayoritas DPR yang hadir menyetujui RAPBN-P 2013 dimana di dalam RAPBN-P tersebut tercantum kebijakan kenaikan harga BBM serta alokasi kompensasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dimaksud. Sebagian isi berita pada harian Kompas tersebut sedikit meliput peristiwa demonstrasi yang berlangsung untuk menolak RAPBN-P 2013. Namun, sebagian besar

isi berita mendukung tema utama, yaitu persetujuan RAPBN-P 2013 yang secara eksplisit tidak menyebutkan kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi dukungan untuk kenaikan harga BBM tersebut sudah nampak jelas terlihat dari komentar-komentar, seperti komentar dari Menteri Keuangan M. Chatib Basri, yang dikutip dalam berita tersebut.

Pada berita kedua yang disajikan oleh harian Investor Daily, isu kenaikan harga BBM juga ditampilkan secara positif tanpa ada kecenderungan mengarah kepada *tone* yang negatif, walaupun dalam skema yang ditampilkan menyandingkan dua pendapat yang menyetujui dan menolak RAPBN-P 2013. Pihak yang menolak RAPBN-P tersebut juga memberikan pendapat untuk melaksanakan RAPBN-P secara lebih baik. Berita tersebut juga meng-cover sedikit liputan tentang demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh. Tema terpenting mengenai isu kenaikan harga BBM yang dikaitkan dengan persetujuan RAPBN-P 2013 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan media memberikan berita yang informatif tanpa ada tendensi untuk mendukung atau pun tidak mendukung terhadap kebijakan fiskal.

Dari dua sumber surat kabar yang memberitakan isu tentang kenaikan harga BBM bersubsidi memperlihatkan bahwa berdasarkan analisa tematik dapat disimpulkan *mass media* memberitakan kebijakan fiskal secara berimbang. Kedua sumber berita tersebut disarikan dari hasil liputan dimana peristiwa rapat DPR dengan pemerintah memperlihatkan kesepakatan untuk menyetujui kebijakan fiskal yang disampaikan oleh pemerintah. Hasil liputan tersebut pun diberitakan oleh *mass media* secara positif tanpa ada kecenderungan untuk mengarah kepada perlawanan atas kebijakan tersebut.

### **Analisis Sintaksis Pada Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi**

Dengan menggunakan kedua berita sebelumnya, analisis *mass media* terkait kebijakan fiskal kenaikan harga BBM bersubsidi akan menggunakan teknik

analisis sintaksis. Analisis sintaksis akan menggunakan kata-kata yang menjadi penekanan pada kedua berita dimaksud. Kata-kata tersebut akan menentukan konteks berita apakah positif atau negatif. Langkah awal adalah menentukan kata-kata yang mengarah kepada konteks berita yang negatif. Kemudian langkah kedua menentukan kata-kata yang mengarah kepada konteks berita yang positif. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah berita tersebut memiliki tendensi untuk memberikan paradigma yang buruk kepada kebijakan fiskal atau sebaliknya.

Kami menentukan kata-kata yang memiliki arti konotasi dan denotasi yang negatif adalah “demonstrasi/protes” dan “menolak.” Kata-kata tersebut mewakili suara rakyat yang kecewa atas kebijakan kenaikan harga BBM. Kenaikan tersebut akan mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Selanjutnya kami memilih kata-kata yang memiliki baik arti konotasi maupun denotasi yang positif, yaitu kata “setuju” dan “kompensasi”. Kata-kata tersebut mewakili orientasi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, dengan melakukan pengurangan subsidi akan memperbaiki kinerja APBN sehingga anggaran dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama masyarakat yang membutuhkan.

Dari hasil pencarian kata-kata yang diberitakan harian Kompas, terdapat tiga kata “menolak” dalam berita yang berjudul “Harga BBM Segera Naik, Mayoritas DPR Setuju RAPBN-P Tahun 2013”. Kata “menolak” dalam berita tersebut terdapat pada paragraf 1, 3, dan 4. Sedangkan berita kedua pada harian Investor Daily, kata “menolak” ditemukan sebanyak delapan kali pada judul, subjudul, serta paragraf 2, 3, 5, dan 20. Sementara itu kata “demonstrasi” atau “protes” ditemukan sebanyak dua kata pada berita pertama dan satu kata pada berita kedua. Pada berita pertama, kata “demonstrasi” atau “protes” ditemukan pada paragraf 3. Sedangkan pada berita

kedua, kata “demonstrasi” dan “protes” ditemukan pada paragraf 5.

Dilain sisi, dari hasil pencarian kami pada kedua berita, baik di Kompas dan Investor Daily, kata “setuju” maupun kata “setuju” yang telah mendapatkan imbuhan (*afiksasi*) ditemukan sebanyak lima belas kata. Sepuluh kata ditemukan pada berita di harian Kompas yang ada pada judul, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, dan paragraf 22. Sedangkan lima kata ditemukan pada berita di harian Investor Daily yang ada pada judul, paragraf 1, dan paragraf 25. Selain kata “setuju”, kata “kompensasi” menjadi kata yang memiliki makna positif bagi pemberitaan isu tentang kenaikan BBM bersubsidi. Hasil pengamatan kami, kata “kompensasi” ditemukan sebanyak sebelas kata. Sepuluh kata pada berita yang disajikan pada harian Kompas dan satu kata pada harian Investor Daily. Pada harian Kompas, kata “kompensasi” ditemukan di paragraf 2, 15, 16, 20, 25, 26, dan paragraf 27. Sedangkan kata “kompensasi” pada harian Investor Daily ditemukan pada paragraf 29.

Dari *manifest coding* yang diwujudkan dalam kata-kata yang memiliki makna positif dan negatif, ditemukan bahwa kata-kata yang mengandung makna negatif memiliki jumlah yang sedikit dibandingkan dengan kata-kata yang mengandung makna positif. Jumlah kata “menolak”, “protes” dan “demonstrasi” sebagai kata-kata yang mengandung makna negatif adalah empat belas kata. Sedangkan kata “setuju” dan “kompensasi” yang mengandung makna positif berjumlah dua puluh lima kata. Hal ini menunjukkan berita mengenai isu kenaikan harga BBM yang dilihat melalui berita kesepakatan DPR dengan pemerintah atas RAPBN-P 2013 diberitakan secara positif. *Tone* pemberitaan *mass media* pada tanggal 18 Juni 2013 terhadap kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama-sama dengan kementerian lainnya yang terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, memperlihatkan bahwa media memberitakan isu tersebut

secara aktual tanpa mengarah kepada resistensi terhadap kebijakan fiskal dari pemerintah. Hasil analisis sintaksis memiliki kesamaan atas hasil yang diperoleh dari analisis tematik.

### Kesimpulan

Secara keseluruhan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan fiskal atas perubahan RAPBN 2013 yang diberitakan pada tanggal 18 Juni 2013 memiliki opini yang positif dimata *mass media*. Opini publik yang disarikan dari liputan, interview, observasi, pandangan media itu sendiri maupun opini yang terbentuk secara individual pada surat kabar memiliki nilai yang penting untuk mendukung pengawasan kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Analisis tematik dan analisis sintaksis membantu kerja pemerintah dalam memantau pemberitaan *mass media*. Kedua analisis itu hanya sebagian dari banyak metode yang digunakan untuk membantu proses pengamatan terhadap *mass media*. Dari kedua analisis tersebut diperoleh hasil yang signifikan bahwa kebijakan fiskal mendapat sorotan yang positif.

Opini atau berita yang diambil dari dua media yang mewakili *mass media* lainnya terhadap peristiwa kesepakatan kenaikan harga BBM bersubsidi antara DPR dan pemerintah mencerminkan bahwa kebijakan fiskal memiliki tempat di mata masyarakat luas yang tentunya sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah itu sendiri. Namun demikian, pemantauan terhadap berita maupun opini yang berkembang di *mass media* perlu secara berkala dicermati. Hal ini perlu dilakukan mengingat *mass media* memiliki tugas dan pandangan yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan ataupun pihak yang memiliki harapan terhadap media tersebut. Evaluasi dan pengendalian merupakan kunci terpenting untuk melihat secara kontinyu kebijakan-kebijakan fiskal lainnya yang diberitakan oleh *mass media*.

Harian Investor Daily, Selasa 18 Juni 2013 (Headline)  
338 Anggota Setuju, 181 Menolak

## Mayoritas DPR Setuju BBM Naik

JAKARTA – Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan RUU Perubahan UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 (RAPBN-P2013) menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, mereka juga menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi yang tercantum dalam RAPBN-P tersebut.

Dalam pemungutan suara (voting) terbuka, Senin (17/6) malam di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, sebanyak 338 anggota dari lima fraksi mendukung RAPBN-Perubahan (RAPBN-P) 2013, meliputi Fraksi Partai Demokrat sebanyak 143 anggota, Fraksi Golkar 98 anggota, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 40 anggota, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 34 anggota, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 23 anggota. Tidak ada satupun anggota kelima fraksi tersebut yang menolak RAPBN-P 2013.

Sedangkan anggota yang menolak RAPBN-P 2013 tercatat sebanyak 181 anggota, terdiri atas Fraksi PDIP sebanyak 91 anggota, Fraksi PKS 51 anggota, Fraksi Gerindra 25 anggota, dan Fraksi Hanura 14 anggota. Seluruh anggota empat fraksi ini menolak RAPBN-P 2013. Dari total 560 anggota DPR, 41 anggota tidak hadir.

Rapat paripurna pengesahan RUU Perubahan APBN 2013 tersebut mulai digelar siang hari. Rapat berjalan alot dan diskors tiga jam untuk memberikan kesempatan lobi-lobi antar fraksi.

Di luar Gedung DPR, Inutan masa menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Demo penolakan oleh kelompok mahasiswa dan masyarakat juga marak di berbagai wilayah Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia. Sebagian demo berlangsung rusuh, sehingga terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Chatib Basri berterima kasih kepada seluruh anggota DPR, karena bisa mengesahkan APBN-P 2013 sesuai jadwal Pengesahan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menken menyatakan, Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyemangati sejumlah asumsi dasar dalam RAPBN-P 2013. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6%, inflasi 7,2%, nilai tukar rupiah Rp9.600/US\$, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5%, harga minyak Indonesia (ICP) 108 US\$/barel, lifting minyak 840 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.240 mboepd/hari.

Pendapatan negara dan hibah disepakati sebesar Rp 1.502 triliun, terdiri atas pendapatan dalam negeri Rp1.497,5 triliun dan hibah Rp 4,5 triliun. Belanja negara dipatok Rp 1.762,2 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.196,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 529,4 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementrisn/Lembaga Rp 622 triliun dan belanja non-K/L Rp574,8 triliun.

Subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp199,85 triliun, BLSM Rp9,3 triliun yang disalurkan selama 4 bulan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran, program infrastruktur dasar Rp7,5 triliun, bantuan siswa miskin Rp7,5 triliun, program keluarga harapan sekitar Rp700 miliar, dan program beras untuk masyarakat miskin sebesar Rp4,3 triliun.

### Pandangan Fraksi

Sebelum voting yang dimulai hampir pukul 22.00 WIB, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir dan beberapa catatan.

Ketua fraksi Partai Golkar Satya Yudha menyadari sepenuhnya bahwa perekonomian nasional tidak bisa lepas dari perkembangan ekonomi global yang semakin tidak menentu. Selain itu, kata dia, Fraksi Golkar mengamati dengan cermat usulan pemerintah dalam mengantisipasi gejolak serta bantuan bagi masyarakat miskin.

Itulah sebabnya. Fraksi Golkar bisa menrima RAPBN-P 2013 dengan keyakinan dan ikhlas. Namun dalam proses pembahasannya, Golkar juga ada perbedaan pandangan dengan pemerintah, seperti menyangkut asumsi makro RAPBN-P.

Ketua Fraksi Demokrat Aqsanul Qasai menyatakan, pemerintah sudah mengambil risiko pahit dalam pengajuan RAPBN-P karena berujung pada kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini dimulai memberikan kemudahan bagi bagi pemerintah berikutnya dalam menentukan kebijakan fiskal.

Dia menegaskan, harga keekonomian BBM bersubsidi sudah mencapai Rp10.000 per liter. Artinya pemerintah memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran sebesar Rp5.500 per liter.

Hal yang sama dikemukakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua partai anggota koalisi itu melihat ada upaya pemerintah yang tegas untuk menyelamatkan fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Ketua Fraksi PAN Catur Sapto Edi mendukung RAPBN-P karena kebijakan yang ada merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu dan generasi yang akan datang. Kebijakan subsidi seperti sekarang tidak mendukung ketahanan energi yang berkelanjutan.

“Kami yakin APBN-P mendorong diversifikasi energi sehingga generasi

mendatang tidak tergantung bahan bakar minyak. Ada banyak energi alternatif yang tidak dimanfaatkan jika kebijakannya seperti sekarang,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menyelamatkan anggaran negara dalam jangka panjang, “Jika tidak dinaikan sekarang akan menjadi bom waktu, baik berupa defisit anggaran maupun utang,” ujar Mawan.

Menurut Marwan, harga BBM bersubsidi terlalu muraj bisa memicu distorsi ekonomi. Subsidi yang tidak tepat sasaran, dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah atas, harus dipangkas.

### Menolak

Sementara itu, empat fraksi (PDIP, PKS, Hanura, Gerindra) menolak RAPBN-P 2013, yang berarti menolak kenaikan harga BBM bersubsidi Sekretaris Fraksi PDIP-P Bambang Wuyanto menyatakan keraguannya terhadap kebijakan fiskal pemerintah RUU APBN-P yaitu diajukan pemerintah dinilai mengandung substansi menaikkan harga BBM dalam pasal 8 ayat 1, ditambah tindakan belas kasihan yang tidak mengena masyarakat miskin.

Untuk itu, Fraksi PDIP-P mengajukan postur tandingan APBN yang tidak menaikkan harga BBM. PDIP-P mengusulkan belanja negara sebesar Rp1.734,3 triliun serta subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati (BBN) sebesar Rp242 triliun.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Mariara sirait menegaskan, harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikan jika pemerintah sejak awal tunduk pada efisiensi anggaran. “Intinya, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, serta naikan pendapatan yang belum optimal,” tegas Maruarar kepada Investor Daily. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran (SAL) sekitar Rp 30 triliun. “Potong anggaran dinas sampai 50%, lalu naikan pendapatan dari cukai rokok, royaltas batubara, dan lain-lain,” ujar dia.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro berpendapat, SAL tidak tepat digunakan untuk pembayaran subsidi yang terbuka tidak tepat sasaran. SAL hanya diperbolehkan untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk menutupi defisit.

Pendaftar serupa juga dikemukakan oleh Fraksi PKS, Hanura, dan Gerindra mereka mengangap ketidak mampuan pemerintah mengelola fiskal dan subsidi akhirnya justru membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM.

Gerindra semula menyerahkan rencana kenaikan harga BBM kepada pemerintah dan menyetujui RAPBN-P 2013 dengan catatan. Namun karena Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto tak puas dengan postur APBN-P 2013, fraksi ini berbalik arah menentang harga BBM.

### Kapan BBM Naik?

Setelah pengesahan RAPBN-P, pertanyaan utama adalah kapan harga BBM bersubsidi dinaikan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Armida Alisjahbama menjelaskan, kenaikan akan diumumkan seminggu setelah pengesahan. Kenaikan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Kepada wartawan di DPR, kemarin, Armida menyatakan, usai APBN-P disahkan, pemerintah segera menggelar rapat koordinasi, “Kenaikan bisa dilakukan dalam pekan ini. Namun, kebijakan tersebut merupakan wewenang Presiden,” ujarnya.

Menkeu Chatib Basri menuturkan, pemerintah pasti menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pemerintah masih butuh waktu untuk mengumumkan kenaikan harga BBM, menunggu penyelesaian administrasi.

“Ini akan diputuskan presiden tapi tidak akan lama,” kata Menkeu. Dengan APBN-P disahkan, program kompensasi langsung bisa dijalankan.

Menkeu menekankan, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat dibutuhkan pemerintah untuk menstabilkan kondisi makro ekonomi dan mencegah terjadinya pembalikan modal asing secara tiba-tiba.

Menurut Chatib, jika harga BBM tidak dinaikan, stabilitas makro bisa terganggu dan menimbulkan resiko arus modal keluar. Keluarnya arus modal berdampak pada jatuhnya rupiah dan meningkatkan inflasi yang pada akhirnya yang meningkatkan kemiskinan dan mengurangi penciptaan lapangan kerja.

Anggota komisi VII Satya W Yudha menegaskan semestinya harga BBM dinaikan pukul 00.00 setelah sidang paripurna. Sebab, kebijakan ini sudah terlanjur didengar publik dan harga-harga barang segera naik mengekor rencana kenaikan harga BBM. “Menunda kenaikan itu mengakibatkan ekspetasi inflasi. Makanya setiap kebijakan publik harus segera ditetapkan supaya tidak ada spekulasi harga,” tegasnya.

Sedangkan terkait alasan penyesuaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memproses pencairan BLSM, satya menilai hal itu bisa dilakukan sambil berjalan.

Harian Kompas  
 Selasa 18 Juni 2013 (headline)  
 Harga BBM segera naik

### Mayoritas DPR setuju RAPBN-P Tahun 2013

JAKARTA, KOMPAS- Rapat paripurna DPR hingga Senin (17/6) malam, melalui pemungutan suara menyetujui rencana undang-undang. Tercatat 338 anggota DPR mendukung dan 181 memolak.

Setelah persetujuan DPR, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mewakili pemerintah langsung ditandatangani untuk disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. RUU RAPBN-P tahun 2013 ini juga menyangkut program-program kompensasi kenaikan harga BBM.

Sementara proses persetujuan DPR/MPR terjadi aksi serupa yang dimotori mahasiswa dan buruh juga berlangsung di beberapa lokasi di Jakarta dan di sejumlah kota di tanah air. Aksi prote ini, termasuk di depan gedung DPR, diwarnai bentrokan antara polisi dan pemerotes.

Proses persetujuan DPR berlangsung maraton karena adanya perbedaan pendapat, empat fraksi, yakni fraksi PDI-P, fraksi PKS, fraksi Partai Hanura, dan fraksi Partai Gerindra, menolak RAPBN tahun 2013 sisanya menyetujui RAPBN-P Tahun 2013, yaitu fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai PAN, fraksi PPP, dan fraksi PKB.

Chatib dalam pidatonya menegaskan, persetujuan RAPBN-P tahun 2013 membuka optimisme untuk perbaikan perekonomian nasional jangka menengah ini terutama berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

RAPBN-P tahun 2013 memiliki makna luas, baik bagi kesehatan fiskal tahun ini maupun tahun-tahun mendatang, RAPBN-P tahun 2013 juga akan memperbaiki ekonomi makro Indonesia sehingga memperkuat daya tahan domestik.

Makna RAPBN-P tahun 2013 memiliki makna luas, baik bagi kesehatan fiskal tahun ini maupun tahun-tahun mendatang, RAPBN-P tahun 2013 sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun anggaran revisi tersebut dibangun dengan asumsi harga BBM bersubsidi naik.

"Saya kira kita tidak perlu khawatir pada gejolak global karena ekonomi makronya jauh lebih stabil dan akan ada ruang fiskal." Kata Chatib

Kenaikan harga BBM bersubsidi. RAPBN-P tahun ini, kata Chatib, juga berimplikasi terhadap perekonomian jangka menengah alasannya, langkah menaikkan harga BBM bersubsidi yang diambil tahun ini pasti akan membuat APBN tahun 2014 menjadi lebih baik, definisinya dipastikan berkisar 1,2-1,7 persen dari produk domestik bruto.

Chatib juga optimis transaksi berjalan tahun depan akan membaik. Minimal defisitnya akan menipis. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk surplus.

Chatib menegaskan, dinamakan pembahasan RAPBN-P tahun 2013 bukan soal isu kenaikan harga BBM bersubsidi kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

"Saya engga mau bicara tanggal (dimulainya kenaikan harga BBM bersubsidi). Pokoknya setelah administrasi (APBN-P) beres, pemerintah menaikkan harga BBM." Kata Chatib.

Dengan persetujuan DPR ini, Presiden Yudhoyono telah mengantongi seluruh amunisi yang diperlukan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kenaikan harga premium dan solar bersubsidi kemungkinan akan diumumkan dan diberlakukan pekan ini.

Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sejatinya sudah sepenuhnya kewenangan pemerintah. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 10 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013.

Namun, sebagaimana pernah dikatakan Presiden Yudhoyono, kenaikan harga-harga BBM bersubsidi hanya akan diperlakukan jika ada program kompensasi yang menyertai. Sementara program kompensasi belum dialokasikan anggarannya pada RAPBN tahun 2013.

RAPBN-P tahun 2013, mengusung agenda kompensasi oleh sebab itu, dengan disetujuinya RAPBN-P tahun 2013 pada rapat paripurna DPR, program kompensasi yang dimaksud Presiden sudah mendapatkan kepastian akolasi anggaran

Total akolasi mencapai Rp29,05 triliun untuk lama program artinya, Presiden sudah memiliki amunisi penuh yang diperlukan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi adalah premium naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter dan solar naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter.

#### Pekan ini

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan pemerintah sedianya akan mengumumkan dan memberlakukan harga BBM bersubsidi yang baru pada pekan ini pengumumannya akan dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Pada saat yang sama, Armida melanjutkan, program kompensasi akan segera digelontorkan terutama bantuan tunai, program yang disebut bantuan langsung tunai sementara masyarakat (BLSM) tersebut diakolasi nilai Rp9,3 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran, ini adalah program baru dalam RAPBN-P tahun 2013.

Sementara empat program lain bersifat penambahan skala dan cangkupan dari program yang ada pada RAPBN tahun 2013. Program itu meliputi pembangunan infrastruktur dasar, program keluarga harapan, program bantuan siswa miskin, dan program beras untuk rakyat miskin.

Jero Wacik, Senin di Istana Merdeka, Jakarta, menegaskan, pemerintah berjanji akan secepat mungkin mengumumkan kenaikan harga BBM setelah RAPBN-P tahun disetujui DPR dan ditandatangani Presiden Yudhoyono, pengumuman diharapkan dilakukan pekan ini.

"Kalau selesai hari ini (Senin), perlu beberapa hari untuk administrasi, tanda tangan Presiden," kata Jero ia berharap dalam pekan ini kebijakan kenaikan harga BBM dapat diperlakukan.

"Ini urusan ekonomi, bukan politik jadi, bukan karena menjelang pemilu, lantas harga BBM dinaikan tahun lalu juga harga BBM juga mau dinaikan, tetapi gagal," ujar Jero.

Sugihartatomo, sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, menegaskan pemerintah akan memberikan sejumlah program kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah program itu merupakan perbaikan dari program-program yang sudah berjalan sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, pemerintah membagi dua kelompok program kompensasi itu, kelompok pertama adalah program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S) dari program yang sudah berjalan, seperti beras untuk rakyat miskin, bantuan siswa miskin, dan program keluarga harapan.

Kelompok kedua adalah program kompensasi khusus 2013, yakni bantuan langsung sementara masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar.

\*Penulis adalah Pelaksana pada Biro KLI  
 Setjen - Kemenkeu

# Potret Kecil Perdagangan Ilegal dan Alternatif Pemecahannya

Oleh :Agung Budilaksono

## Perdagangan ilegal Rokok di ASEAN

Perdagangan ilegal rokok memiliki implikasi yang merugikan kesehatan dan secara sosio-ekonomi mengurangi pendapatan pajak pemerintah serta merusak upaya pengendalian konsumsi tembakau. Industri tembakau selama ini telah banyak dimanfaatkan dalam perdagangan ilegal rokok dengan dalih untuk meningkatkan cukai tembakau, namun fakta menunjukkan bahwa pangsa pasar perdagangan ilegal di pasar global tetap stabil (diperkirakan antara 9-11 %) sejak tahun 2000 dan umumnya menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan harga rokok yang lebih murah, sementara pada negara-negara berpenghasilan tinggi menunjukkan kecenderungan tinggi. Pasal 15 FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) membahas ma-

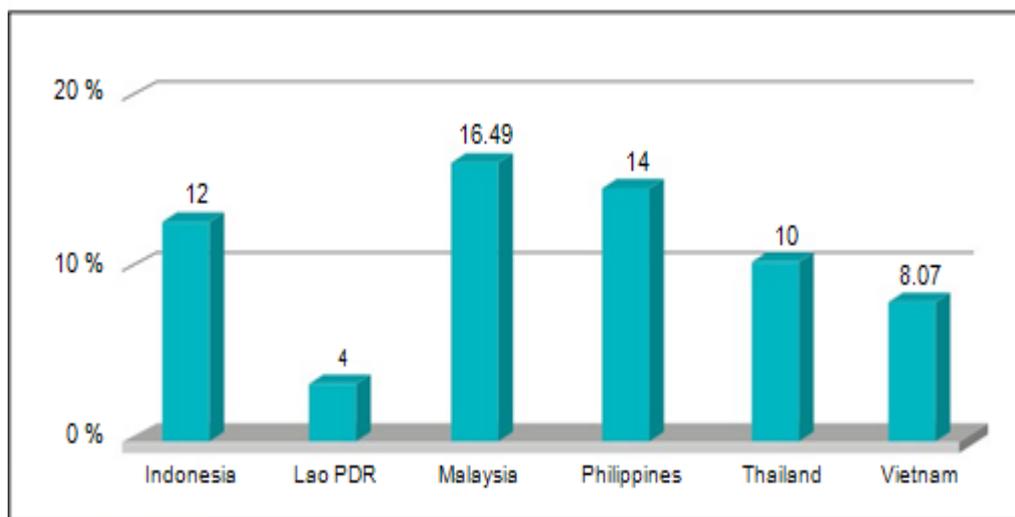
salah perdagangan ilegal produk tembakau, dan untuk ini telah dibuat Protokol untuk Penghilangan Perdagangan Ilegal Produk Tembakau baru-baru ini, yang kemudian diadopsi dalam Konferensi ke-5 FCTC.

Penelitian terbaru NIH Research pada tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan penyelundupan rokok yang tidak terkait langsung dengan peningkatan tarif cukai tembakau pada beberapa negara anggota ASEAN (Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam). Sebaliknya, justru faktor-faktor seperti kontrol perbatasan yang lemah dan sistem adat yang kurang efektif menjadi penyumbang besar tingginya penyelundupan. Di antara enam negara yang disurvei, Malaysia memiliki pangsa pasar perdagangan ilegal yang tertinggi (16,49 %) dari total pasar rokok yang ada, kemudian diikuti oleh

Filipina (14 %) dan Indonesia (12 %) (Gambar.1) .

Demikian juga dengan Kamboja, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah rokok yang diimpor ke Kamboja semenjak tahun 2004-2005. Impor rokok naik dari sebesar 14,2 milyar batang pada tahun 2000 menjadi sebesar 22,7 miliar batang pada tahun 2008. Apabila dipertimbangkan produksi lokal tahunan sekitar 4,5 miliar batang, dan konsumsi tahunan sekitar 7 miliar batang, serta ekspor tahunan sekitar 500 juta batang, maka terjadi surplus domestik rokok sekitar 11,2 miliar batang pada tahun 2000 dan sekitar 20,3 miliar batang pada tahun 2008. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa surplus rokok tersebut hilang dalam perjalanan setelah impor mereka, kemudian diselundupkan ke luar negeri. Hal ini mengindikasikan perlunya tindakan kolaboratif dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah ini.

Di Indonesia, karena masyarakatnya cenderung (dominan) mengkonsumsi rokok kretek, maka perhatian utama tertuju pada jumlah produksi dalam negeri yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan rokok di kalangan laki-laki dan kaum miskin serta besarnya variasi harga antara rokok legal dan ilegal, kemudian diperburuk lagi dengan adanya ribuan



Gambar.1  
Pangsa pasar rokok ilegal terhadap total pasar rokok di Negara-negara ASEAN (%)  
Sumber: NIH Research (SEATCA, 2011)

produsen kecil dan tarif pajak preferensial untuk rokok kretek.

Tingkat penyelundupan rokok di Laos pada tahun 2007, diperkirakan setidaknya sebesar 8,8% dari penjualan resmi, lebih tinggi dari tingkat penyelundupan pada tahun 2002 yang sebesar 6%. Nilai eceran dari rokok selundupan mencapai US\$ 3,6 juta, sehingga mengakibatkan adanya kerugian penerimaan pajak yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,52% dari total penerimaan pajak pemerintah. Diperkirakan sebanyak 1,47 juta batang rokok diselundupkan ke Malaysia pada tahun 2004, yang kemudian meningkat menjadi 3,47 juta batang pada tahun 2006. Penyelundupan ini setara dengan kerugian pendapatan pemerintah senilai US\$ 112 juta pada tahun 2004 dan US\$ 308 juta pada tahun 2006. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja asing di Malaysia bisa menjadi penyebab penyelundupan ke dalam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meneliti sifat dan tingkat penyelundupan rokok dari Singapura dan Indonesia, dua negara yang dengan Malaysia memiliki perbedaan nilai perdagangan tembakau yang terbesar.

Data tingkat penyelundupan rokok di Filipina masih terbatas, tetapi diperkirakan pemerintah Filipina kehilangan pendapatan pajak sekitar US\$ 71 juta pada tahun 2004 akibat perdagangan ilegal produk tembakau. Dengan berlakunya "UU Pajak Dosa" diharapkan dapat menjamin efektivitas Hukum Pajak Dosa sebagai alat bantu pengendalian kesehatan masyarakat dalam mengurangi permintaan terhadap produk tembakau dan mendorong prevalensi merokok yang lebih rendah.

### Konsep Perdagangan Ilegal Rokok

Penyelundup itu beroperasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adanya perbedaan harga memungkinkan penyelundup untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli produk tembakau di pasar dengan harga yang rendah dan menjualnya kembali di pasar ketika harga sedang tinggi. Pergerakan penyelundup produk tembakau antar pasar dalam rangka penghindaran hukum dilakukan melalui kalkulasi penghitungan pajak dan tarif. Kemudahan untuk melakukan penghindaran pajak akan sangat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam penyelundupan tembakau. Pengawasan yang lemah atas terjadinya penggelapan di perbatasan juga merupakan alasan utama terjadinya perdagangan ilegal antar negara, selain karena perbedaan harga yang ada.

*Bootlegging* merupakan transaksi pembelian tembakau resmi di satu negara, tetapi kemudian melakukan konsumsi atau penjualan kembali di negara lain tanpa membayar pajak atau bea yang berlaku. Secara umum, *bootlegging* menggunakan pengangkutan rokok yang jaraknya relatif pendek (misalnya, antar negara-negara tetangga atau yurisdiksi lain di dekatnya). Perbedaan harga yang signifikan diantara yurisdiksi negara menciptakan insentif untuk terjadinya *bootlegging*.

Sedangkan *Wholesale smuggling* merupakan tindakan untuk menghindari pajak dengan cara menjual barang tanpa ada bukti pembayaran seperti pelekatan pita cukai palsu. Tarif cukai yang tinggi akan memberikan insentif untuk melakukan penyelundupan atau produksi rokok dengan pelekatan pita cukai palsu sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar cukai yang terutang.

### Strategi Memerangi Perdagangan Ilegal Rokok

Strategi untuk memerangi penyelundupan rokok perlu dilakukan secara tepat sasaran agar sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tahapan strategi adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan memantau ukuran dan sifat dari masalah perdagangan ilegal rokok. Terdapat beberapa indikator keberadaan dan pertumbuhan perdagangan produk tembakau yang ilegal, seperti:
2. Terjadinya penurunan penjualan pasar;
3. Terjadinya gangguan pada aliran penerimaan Pemerintah;
4. Terjadinya peningkatan produk ilegal - baik dalam frekuensi maupun jumlah;
5. Munculnya merek yang tidak menampilkan tanda-tanda yang benar atau yang tidak legal, didistribusikan dan dijual di dalam negeri, dan
6. Terjadi perubahan dalam hasil survei anti perdagangan terlarang.
7. Mengevaluasi penyebab utama masalah, seperti pada proses pengendalian ekspor dan pembuatan produknya, pada wilayah-wilayah zona bebas dan pelaksanaan transit barang, dll
8. Merancang kebijakan tarif cukai yang seimbang dan efektif dalam mengumpulkan pajak sehingga dapat dioptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Ketika menetapkan tarif cukai, pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat pembangunan

ekonomi, daya beli dari konsumen dan tarif pajak/cukai di negara-negara tetangga. Pengalaman menunjukkan bahwa cukai yang radikal cenderung mengarah pada munculnya perdagangan gelap. Negara harus menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan dan mengendalikan penerimaan perpajakan tembakau. Sistem administrasi cukai biasanya didasarkan untuk memeriksa produksi pabrik, gudang berikat dan volume impor. Hal ini dapat dilengkapi dengan penggunaan penanda fiskal (misalnya kertas perangko pajak kertas atau *digital coding*) yang ditempelkan pada setiap penjualan paket individu.

Tanda tersebut dapat digunakan baik sebagai mekanisme audit tambahan atau sebagai sarana pembayaran pajak itu sendiri (mereka menanggung pembayaran pajak untuk produk yang mereka gunakan). Namun sayangnya sistem cap kertas pajak yang paling canggih saja sulit untuk sepenuhnya melindungi pasar terhadap ancaman produk ilegal dan tentunya juga kegagalan melindungi penerimaan cukai. Seperti rokok misalnya, pita cukai rokok harus memiliki kualitas yang tinggi untuk menghindari pemalsuan.

Pita cukai juga rentan terhadap pencurian dan penggunaan kembali oleh penyelundup. Dengan teknologi yang ada saat ini verifikasi pajak secara digital merupakan alternatif solusi yang menawarkan pendekatan yang jauh lebih aman dalam pelaksanaan pengumpulan pajak. Penggunaan teknologi maju (*coding digital*) yang dapat dicetak langsung untuk menggantikan baik pita cukai atau penanda fiskal. Hal ini mudah dibaca dan juga dapat berfungsi sebagai alat otentikasi sehingga duplikasi kode yang terenkripsi asli hampir dapat dipastikan mustahil terjadi. Pemerintah sendiri memperoleh informasi *real-time* dan aman berkaitan dengan volume rokok yang diproduksi sehingga diharapkan dapat menawarkan transparansi penuh dan kemudahan untuk pengadaan jumlah cukai yang harus dikumpulkan oleh masing-masing produsen dan importir. Verifikasi pajak digital untuk tembakau produk ini sepenuhnya sejalan dengan *e-government* yang sudah dicanangkan pemerintah dan inisiatif *e-customs*.

Verifikasi pajak digital adalah cara maju dan merupakan sistem yang menggunakan biaya yang efisien dan dapat diakses oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

1. Menganalisis undang-undang dan peraturan yang ada untuk memastikan penyelundup memperoleh ancaman hukuman yang memadai dan berfungsi sebagai pencegah tindakan penyelundupan;
2. Memastikan pengadilan menyadari, bahwa penyelundupan merupakan suatu kejahatan yang serius dan diperlukan upaya keras untuk menghancurkan produk dan peralatan ilegal pada waktu yang tepat.
3. Melakukan penegakkan hukum secara bersama dari semua instansi terkait dan memastikan bahwa mereka memiliki dan memastikan mereka memiliki cukup kekuasaan untuk bertindak.
4. Menyediakan sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung kapasitas penegakan hukum yang memadai.
5. Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang implikasi dari penyelundupan rokok.
6. Membangun dan memperkuat kemitraan antara instansi pemerintah terkait dengan lembaga internasional terkait.
7. Bekerja sama dengan pelaku industri yang sah untuk membuat intelijen dan sumber daya gabungan.

### Kesimpulan

1. Penyelundup beroperasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Adanya perbedaan harga memungkinkan penyelundup untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli produk tembakau di pasar dengan harga yang rendah dan menjualnya kembali di pasar ketika harga sedang tinggi;
2. Perdagangan ilegal rokok memiliki implikasi yang merugikan kesehatan yang serius dan sosio-ekonomi, mengurangi pendapatan pajak pemerintah serta merusak upaya pengendalian konsumsi tembakau.
3. Strategi memerangnya dengan memperkirakan tingkat masalah yang ada baru kemudian menetapkan strateginya sesuai dengan alokasi sumber daya yang tersedia.

\*Penulis adalah Auditor Muda pada Itjen - Kemenkeu

# Mengapa Harus Melaporkan Harta Kekayaan

Oleh : Nur Achmad

## Latar belakang

Meskipun reformasi birokrasi telah menghasilkan efek positif yang banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek korupsi masih saja terjadi. Survei yang dilakukan setiap tahun oleh Transparency International (TI) menunjukkan bahwa Corruption Perception Index (CPI) Indonesia masih berada di tingkat bawah. Indeks ini mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Tahun 2012, dengan skor 32, Indonesia berada pada posisi 118 dari 176 negara yang diukur, jauh di bawah sesama negara ASEAN: Singapura (Posisi 5) dan Malaysia (Posisi 54),

Mengapa Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara dengan pelayanan publik yang rentan terhadap korupsi? Sejauhmana tingkat gaji pejabat publik berkaitan dengan jumlah korupsi telah diteliti oleh Rijkceghem dan Weder (1997). Mereka berpendapat bahwa rendahnya gaji PNS memaksa mereka menambah pendapatan secara tidak sah sedangkan PNS yang bergaji tinggi menghindari korupsi karena mereka akan menderita kerugian yang lebih tinggi jika PNS

tersebut tertangkap. Dalam sampel kecil dari 28 negara berkembang, mereka menemukan bahwa meningkatkan gaji PNS sebanyak 2 kali lipat akan meningkatkan indeks korupsi sebanyak 2 poin pada TI index. Rijkceghem dan Weder sangat berhati-hati menyikapi penyebab korupsi, menurutnya negara yang korup cenderung memiliki kinerja anggaran yang buruk atau memiliki pandangan bahwa PNS memperoleh pendapatan yang cukup dari korupsi dan dapat mengurangi PNS-nya sebagai konsekuensinya.

Penelitian Rijkceghem dan Weder tersebut bertolak belakang dengan beberapa fakta yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya pemberitaan di media massa mengenai adanya pejabat publik yang diketahui memiliki harta kekayaan yang sangat besar jauh melebihi penghasilan resminya. Peristiwa terkini adalah terungkapnya asset milik Irjen (Pol) DS sesuai dakwaan jaksa KPK yang dibacakan Selasa, 23 April 2013. Jaksa KPK menyebutkan kekayaan DS periode Tahun 2003 s.d. Maret 2010 sebanyak Rp 53,894 miliar dan US\$ 60 ribu ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)). Belakangan diketahui harta yang dilaporkannya dalam LHKPN hanya

berjumlah Rp 5,6 miliar (per 20 Juli 2010).

Di Kementerian Keuangan, salah satu pegawainya yaitu DW juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp11,41 miliar dan 302.000 USD di rekeningnya serta kepemilikan logam mulia seberat 1.100 gram yang disimpan dalam SDB sebuah bank pemerintah di Jakarta. Di samping itu, harta kekayaan DW dianggap nilainya tidak wajar sebagai PNS Golongan III/C. Setelah ditelusuri ternyata DW hanya melaporkan harta kekayaannya di LHKPN sebesar Rp 440 juta dan Rp 1,21 miliar - per Juni 2011 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi para pejabat publik menjadi semakin menarik perhatian belakangan ini. Beberapa pertanyaan kembali muncul mengenai kegunaan dari kewajiban pelaporan ini. Apakah kewajiban pelaporan ini berperan penting dalam mendeteksi pejabat publik yang terlibat dalam tindakan korupsi? Mungkinkah pelaporan tersebut membantu melacak atau menyelidiki aliran dana ilegal? Apakah sebelumnya tidak dapat diketahui ketidakwajaran isi pelaporan harta kekayaan seseorang?

Sejumlah besar negara-negara di dunia telah mempunyai suatu sistem pelaporan harta bagi para pejabat publiknya, dalam rangka mencegah dan memerangi korupsi serta memenuhi komitmen *good governance*. Sebuah studi yang dilakukan oleh *World Bank* pada Tahun 2006 menemukan bahwa di antara 148 negara, 43 negara (30%) tidak memiliki sistem tersebut sedangkan terhadap 106 negara selebihnya, sepertiganya memiliki sistem pelaporan harta dan dua per tiganya hanya mewajibkan pelaporan harta bagi pejabat pemerintah.

### Peraturan mengenai Pelaporan Harta Kekayaan

Di Indonesia, kewajiban pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam UU ini, istilah pejabat publik menggunakan frasa Penyelenggara Negara (PN) yaitu Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai pasal 5 UU ini, setiap PN berkewajiban untuk

bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; serta melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Sesuai Pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 Komisi Pemeriksamempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan PN yaitu: melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan PN; meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para PN; melakukan Penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan PN berdasarkan petunjuk adanya KKN terhadap PN yang bersangkutan; mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan PN yang diduga melakukan KKN atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan PN yang bersangkutan; jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan PN yang diduga diperoleh dari KKN selama menjabat sebagai PN, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan KPK Nomor: KEP.07/ IKPK/02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN; pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terdiri dari Pemeriksaan Administrasi; Pemeriksaan Substansi dan Pemeriksaan Khusus.

### Isu penting terkait pelaporan harta kekayaan

#### 1. Hubungan Pelaporan Harta Kekayaan Terhadap Akuntabilitas

Transparansi, akuntabilitas publik, kepercayaan dan integritas merupakan tujuan yang paling sering dinyatakan dalam sistem pelaporan harta kekayaan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Mengharuskan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan mereka (aset, pendapatan dan kewajiban/hutang) melalui sistem deklarasi aset secara luas dianggap sebagai

langkah yang efektif untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa kepentingan utama pejabat publik tersebut adalah masyarakat yang mereka layani. Kesimpulan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukherjee, R and O. Gokcekus (2007) yang berjudul *Officials' Asset Declaration Laws: Do They Prevent Corruption?*

Pada Tahun 2011, para pemimpin G20 menegaskan komitmen mereka untuk memerangi korupsi dengan mengadopsi sebuah Rencana Aksi Anti-Korupsi di Seoul dimana mereka berjanji "untuk mempromosikan integritas, transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi, di sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik." Menurut G20, prinsip-prinsip yang dianut dalam menyelenggarakan sistem pelaporan harta kekayaan adalah: *Fair, Transparent, Targeted at senior leaders and those in at-risk positions, Supported with adequate resources, Useful, Enforceable.*

## 2. Hubungan Pelaporan Harta Kekayaan Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kewajiban bagi pejabat publik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan mereka, termasuk penghasilan, aset, usaha yang dimiliki adalah salah satu cara yang relatif sederhana untuk memastikan bahwa mereka harus berpikir panjang untuk mencari keuntungan tidak sah dari tugas publik mereka atau bertentangan dengan tanggung jawab resmi mereka. Ketakutan akan ketahuan adalah kekuatan pendorong dan penguat kewajiban untuk memenuhi kode etik.

Masyarakat meyakini bahwa seorang pejabat yang memperoleh dana ilegal pasti mencari berbagai macam cara untuk menyembunyikan harta yang diperolehnya dari cara yang tidak sah tersebut. Oleh karena itulah lembaga yang bertugas untuk memeriksa laporan harta kekayaan harus bekerja keras untuk memverifikasi kebenaran pelaporan dengan berbagai keterbatasan kewenangan misalnya kerahasiaan nasabah maupun kerahasiaan wajib pajak. Di samping itu adanya keterbatasan lainnya misalnya data properti, keterbatasan akses bahkan keterbatasan yang berasal dari sumber daya mereka sendiri. Patut pula dicermati adanya upaya-upaya secara politis yang berusaha untuk menghambat penegakan anti-korupsi. Untungnya di Indonesia KPK memiliki kewenangan-kewenangan untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas.

## 3. Hubungan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan

Penelitian yang dilakukan *Burdescu et al* (2009) menyimpulkan bahwa sebagian besar negara dengan perkembangan sistem pelaporan harta yang wajar didukung oleh sanksi legal mendefinisikan pelanggaran yang mencakup semua hal di atas. *Burdescu* menambahkan bahwa sanksi untuk kegagalan untuk mengisi suatu pelanggaran ada di lebih dari 80% dari negara-negara dengan sistem pelaporan harta, sementara kesalahan pelaporan harta yang dikenakan sanksi sekitar 65-75% dari sistem.

Dalam penelitiannya, Ranjana Mukherjee dan Omer Gokcekus (2006) menemukan bahwa negara-negara dengan sejarah cukup panjang dalam peraturan pelaporan harta bagi pejabat publik memiliki tingkat korupsi secara signifikan lebih rendah dibandingkan negara-negara yang baru memiliki peraturan pelaporan harta. Selain itu ditemukan tingkat korupsi lebih rendah di negara-negara yang memiliki peraturan yang mengizinkan badan pemerintah atau badan anti-korupsi untuk menghukum pejabat publik yang melanggar ketentuan pelaporan harta. Ranjana Mukherjee dan Omer Gokcekus mengidentifikasi bahwa negara-negara yang melakukan pemeriksaan atas laporan harta memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah daripada negara yang tidak melakukan pemeriksaan atas laporan harta. Ditemukan pula bahwa negara yang memungkinkan akses publik terhadap Laporan Harta Kekayaan secara signifikan mempunyai tingkat korupsi lebih rendah dibandingkan negara yang membatasi atau menutup akses terhadap Laporan Harta Kekayaan. Mukherjee juga berhasil mengidentifikasi bahwa kombinasi dari pemeriksaan isi Laporan Harta Kekayaan dan akses publik terhadap laporan masih lebih besar dengan tingkat korupsi yang rendah.

## Peran Inspektorat Jenderal dalam Pelaporan Harta Kekayaan

Berdasarkan data Laporan Tahunan KPK 2012, jumlah PN yang wajib melaporkan LHKPN adalah 219.274 orang terdiri dari Pejabat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan BUMN/D sedangkan jumlah PN yang melaporkan LHKPN adalah 170.730 orang. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2011, yang wajib melaporkan adalah 185.395 orang sedangkan yang melaporkan adalah 152.264 orang.

Dengan jumlah LHKPN tersebut di atas, diyakini bahwa KPK tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pemeriksaan

terhadap LHKPN. Di sisi lain, sesuai Pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap PN yang melanggar ketentuan pelaporan dan pengumuman kekayaan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mengatasi kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki KPK dalam memeriksa LHKPN perlu kiranya KPK memberdayakan para auditor yang berada di masing-masing Kementerian atau Lembaga. Hal ini dimungkinkan sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Dengan adanya kendala untuk mengetahui kewajaran pelaporan harta kekayaan pegawai, Kementerian Keuangan memiliki sistem tersendiri yaitu memberdayakan pemeriksaan terhadap LP2P yang telah diwajibkan, sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian LP2P Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Pegawai BUMN/D.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan LP2P Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan memberikan tugas kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk mengelola LP2P yang meliputi: menerima dan menatausahakan LP2P; melakukan penelitian dan penilaian LP2P; menyimpan LP2P dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi, keamanan, dan kerahasiaannya; dan melaporkan kepada Menteri Keuangan hasil penelitian dan penilaian LP2P secara berkala. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berwenang untuk meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan unit eselon I atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan LP2P dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pejabat/Pegawai mengenai informasi LP2P yang disampaikan. Untuk keperluan penatausahaan, penelitian, dan/atau penilaian LP2P, Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan Daftar Harta Kekayaan (DHK). Selanjutnya untuk mempermudah pegawai dalam menyampaikan

LP2P, telah dibuat Aplikasi eLP2P berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.09/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan penyampaian LP2P dan DHK secara elektronik, maka penyampaian LP2P dan DHK secara hardcopy tidak diperlukan lagi.

### Kesimpulan

1. Meskipun bukan satu-satunya cara, pelaporan harta kekayaan pejabat publik merupakan sebuah langkah efektif untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban para pejabat publik dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan.
3. Tidak ada peraturan tanpa adanya sanksi sehingga diperlukan adanya ketegasan terhadap pelanggaran atas ketidakpatuhan dalam melaporkan harta kekayaan.
4. Inspektorat Jenderal memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusklat Pajak

# Mengungkap *Rahasia Logical Test dan Array Operations* pada *Microsoft Excel*

Oleh : Iqbal Soenardi

Sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi pengolah *spreadsheet*, yang sangat umum digunakan untuk mengolah data pada tabel. Berbagai fungsi dan formula sudah disediakan di aplikasi tersebut untuk para pengguna Microsoft Excel untuk berbagai tujuan dalam pengolahan data tersebut. Namun jika kita mau mengoptimalkan fungsi dan formula tersebut, ternyata dapat menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan formula untuk menghasilkan berbagai output yang kita inginkan. Pada tulisan kali ini, akan diungkap cara cerdas menggunakan dan mengoptimalkan fungsi *Logical Test* di Excel.

## Logical Test

*Logical test* biasanya kita gunakan saat kita memanfaatkan fungsi IF() dalam menyelesaikan suatu perhitungan. *Syntax* dari fungsi IF() adalah =IF(*logical\_test*,[value\_if\_TRUE],[value\_if\_FALSE]).

Sederhananya, *logical test* kita gunakan untuk membandingkan satu variabel dengan satu variabel lainnya dengan operator: <, =, >, <=,

>=, <>. Selanjutnya, *logical test* juga dapat kita kombinasikan dengan fungsi AND() dan/atau OR() apabila kita ingin membandingkan lebih dari satu variabel.

Adapun keluaran (*output*) dari *logical test* ini adalah pernyataan TRUE atau FALSE.

Contoh, jika A=9 dan B=19, maka *logical test* A>B akan menghasilkan keluaran FALSE karena A kurang dari B, sedangkan *logical test* A<=B akan menghasilkan keluaran TRUE, karena A memang kurang dari atau sama dengan B.

Lalu rahasianya di mana? Jika kita ketikkan kata "true" di Excel atau apabila kita menggunakan *logical test* dengan keluaran TRUE, maka secara otomatis Excel akan mengubahnya menjadi "TRUE" dengan huruf kapital dan justifikasi "CENTER".

*Pertanyaan utamanya adalah berapakah nilai angka dari TRUE dan FALSE menurut Excel?*

Jawabannya: Excel menganggap TRUE bernilai 1 dan FALSE bernilai 0.

Bukti dapat kita peroleh dengan mengalikan keluaran *logical test* tersebut dengan angka 1, misalnya, jika sel A3 bernilai 28 dan sel A4 bernilai

16, maka  $= (A_3 > A_4) * 1$  akan menghasilkan nilai 1, perhatikan bahwa dalam situasi ini  $= A_3 > A_4$  akan menghasilkan nilai TRUE.

Sebaliknya jika formulanya kita ubah menjadi  $= (A_3 < A_4) * 1$ , maka keluarannya adalah 0 (No), perhatikan bahwa dalam situasi ini  $= A_3 < A_4$  akan menghasilkan nilai FALSE, jadi TRUE = 1, sedangkan FALSE = 0.

Jika tadi nilai TRUE kita kalikan 1, sekarang mari kita coba menambahkannya dengan angka 1 dengan formula  $= (A_3 > A_4) + 1$  dan ternyata keluarannya adalah 2.

Kesimpulannya? Keluaran *logical test* ini dapat kita kalikan dan/atau tambahkan dengan angka (*number*).

Lalu bagaimana keluaran dari  $= (A_3 > A_4) + (A_3 > A_4)$ , well... hasilnya adalah 2, dengan demikian, kesimpulan berikutnya adalah

TRUE + TRUE = 2, TRUE + FALSE = 1, FALSE + FALSE = 0, TRUE \* TRUE = 1, TRUE \* FALSE = 0, dan FALSE \* FALSE = 0.

Menarik????

Lalu apa manfaatnya bagi kita? Perhatikan gambar Contoh 1.

MP1	MP2	MP3	MP4	MP5
A	B	D	C	D

Contoh. 1.

Bagaimana Anda merumuskan masalah ini: **Seseorang dinyatakan tidak lulus apabila memiliki nilai "D" lebih dari satu.** Apakah anda akan menggunakan fungsi OR() atau AND() untuk menyelesaikannya? Cara termudah menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan kolom bantuan seperti gambar Contoh. 2.

MP1	MP2	MP3	MP4	MP5		MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	JUMLAH
A	B	D	C	D		0	0	1	0	1	2

Contoh. 2.

Sesuai ilustrasi pada gambar Contoh. 2, jika kolom jumlah (**sel L2**) bernilai lebih dari 1, maka siswa tersebut tidak lulus. Formula yang digunakan di **sel G2** adalah  $=IF(A2="D",1,0)$  yang kemudian kita *copy* ke seluruh baris hingga kolom E. Sekarang mari kita manfaatkan pemahaman baru kita tentang nilai TRUE dan FALSE. Dalam kasus ini, kita menggunakan *logical test* yang sama dengan teknik sebelumnya, yaitu kondisi TRUE jika sebuah sel bernilai "D".

Sesuai persyaratan kelulusan, jika hasil seluruh *logical test* kita jumlahkan, maka seseorang boleh lulus jika total hasil penjumlahan tersebut tidak boleh lebih dari 1. Setuju?

Adapun formulanya adalah:

$= (A_2="D") + (B_2="D") + (C_2="D") + (D_2="D") + (E_2="D")$  dengan keluaran = 2 atau ybs. tidak lulus.

Jika kita kombinasikan dengan fungsi IF untuk pengambilan keputusan, maka formulanya menjadi:

$=IF((A_2="D") + (B_2="D") + (C_2="D") + (D_2="D") + (E_2="D") > 1, "TIDAK LULUS", "LULUS")$

Simple bukan?

Selanjutnya, **jika MP1 ATAU MP5 bernilai "D", maka yang bersangkutan tidak lulus.**

Biasanya anda akan memformulasikannya  $=IF(OR(A_2="D", E_2="D"), "TIDAK LULUS", "LULUS")$

Dengan teknik yang baru formulanya adalah  $=IF((A_2="D") + (E_2="D") > 0, "TIDAK LULUS", "LULUS")$

Berikutnya, jika nilai MP1 DAN MP5 bernilai "D", maka yang bersangkutan tidak lulus.

Biasanya anda akan memformulasikannya  $=IF(AND(A_2="D", E_2="D"), "TIDAK LULUS", "LULUS")$

Dengan teknik yang baru formulanya adalah  $=IF((A_2="D") + (E_2="D") = 2, "TIDAK LULUS", "LULUS")$

Sampai titik ini, Anda dapat mencermati bahwa dengan teknik yang baru, **KITA SEBENARNYA SUDAH TIDAK TERLALU MEMBUTUHKAN FUNGSI OR DAN AND LAGI** – say goodbye to OR dan AND!!!

Sekarang formulasikan kasus berikut ini:

**Seseorang hanya dinyatakan LULUS jika yang bersangkutan berhasil mendapatkan SATU nilai "D", tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.**

Kondisi ini disebut **Exclusive OR** atau **XOR**. Sampai dengan versi 2010, Excel belum menyediakan fungsi XOR, sementara di versi 2013 katanya fungsi ini sudah tersedia.

Jika yang boleh lulus hanya yang berhasil mendapat nilai "D" sebanyak satu buah, maka formula berikut harus menghasilkan nilai 1:

```
= (A2="D")+(B2="D")+(C2="D")+(D2="D")+(E2="D")
```

Atau selengkapnya:

```
=IF((A2="D")+(B2="D")+(C2="D")+(D2="D")+(E2="D")=1,"LULUS","TIDAK LULUS")
```

Terakhir, **MAKSIMAL** seseorang memperoleh **HANYA** nilai "D" **BOLEH** sebanyak **LULUS** satu **jika** buah. Kata para pakar, kondisi ini disebut **NAND** (negatif).

Langsung saja, formulanya adalah:

```
=IF((A2="D")+(B2="D")+(C2="D")+(D2="D")+(E2="D")<=1,"LULUS","TIDAK LULUS")
```

### Array Operations

Sebelum kita mendefinisikan Array Operations ini, mari kita cermati gambar Contoh. 3.

Kolom A	Kolom B	Kolom C	
1	6	6	=A2*B2
2	7	14	
3	8	24	
4	9	36	
5	10	50	
<b>TOTAL</b>		<b>130</b>	

Contoh. 3.

Formula yang kita gunakan di sel C2 adalah =A2\*B2 yang merupakan hasil perkalian isi Kolom A dan Kolom B, sementara sel C7 berisi formula =SUM(C2:C6) yang menampilkan nilai total dari hasil perkalian di Kolom C. Pertanyaan kita adalah apakah angka 130 tersebut dapat kita hasilkan melalui satu formula tunggal saja, sehingga kita tidak membutuhkan kolom bantuan (Kolom C)?

Jawabnya, bisa! Mari kita gunakan formula berikut : =SUM((A2:A6)\*(B2:B6)). Berbeda dari teknik biasa, formula ini harus dieksekusi menggunakan kombinasi tombol **CTRL + SHIFT + ENTER**, jika tidak hasilnya pasti tidak sesuai. Teknik inilah yang disebut sebagai **array operations**, dimana kita dapat menggabungkan beberapa perhitungan menggunakan formula yang serupa dalam satu formula tunggal dengan fungsi SUM() sebagai akumulatornya.

Teknik di atas sebenarnya juga dapat diselesaikan menggunakan fungsi SUMPRODUCT() dengan

formula yang mirip, yaitu =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6), namun kenapa harus menggunakan banyak fungsi?

Contoh selanjutnya adalah kasus yang kita gunakan pada topik **logical test** di atas.

MP1	MP2	MP3	MP4	MP5		MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	JUMLAH
A	B	D	C	D		0	0	1	0	1	2

Contoh. 4

**Kasus I: Seseorang dinyatakan tidak lulus apabila memiliki nilai “D” lebih dari satu**

Formula awal adalah: =IF((A2="D")+(B2="D")+(C2="D")+(D2="D")+(E2="D")>1,"TIDAK LULUS","LULUS")

Sedangkan jika kita menggunakan teknik array operations, maka formulanya dapat kita persingkat menjadi:

=IF(SUM((A2:E2="D")\*1)>1,"TIDAK LULUS","LULUS"),

dengan output “TIDAK LULUS” karena terdapat nilai D sebanyak dua buah.

**Kasus II: Seseorang hanya dinyatakan LULUS jika yang bersangkutan berhasil mendapatkan SATU nilai “D”, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.**

Formula awal adalah: =IF((A2="D")+(B2="D")+(C2="D")+(D2="D")+(E2="D")=1,"LULUS","TIDAK LULUS")

Sedangkan jika kita menggunakan teknik array operations, maka formulanya dapat kita persingkat menjadi:

=IF(SUM((A2:E2="D")\*1)=1,"LULUS","TIDAK LULUS"),

dengan output “TIDAK LULUS” karena terdapat nilai D sebanyak dua buah.

**Kasus III: seseorang HANYA BOLEH LULUS jika MAKSIMAL memperoleh nilai “D” sebanyak satu buah**

Formula awal adalah:

=IF((A2="D")+(B2="D")+(C2="D")+(D2="D")+(E2="D")<=1,"LULUS","TIDAK LULUS")

Sedangkan jika kita menggunakan teknik array operations, maka formulanya dapat kita persingkat menjadi:

=IF(SUM((A2:E2="D")\*1)<=1,"LULUS","TIDAK LULUS"),

dengan output “TIDAK LULUS” karena terdapat nilai D sebanyak dua buah.

Alternatif dari teknik yang kita gunakan disini adalah menggunakan fungsi COUNTIF() dengan formula

Kasus I: =IF(COUNTIF(A2:E2,"D")>1,"TIDAK LULUS","LULUS").  
 Kasus II: =IF(COUNTIF(A2:E2,"D")=1,"LULUS","TIDAK LULUS")  
 Kasus III: =IF(COUNTIF(A2:E2,"D")<=1,"LULUS","TIDAK LULUS")

Dengan tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap **logical test** dan **array operations**, pada dasarnya kita tidak terlalu perlu untuk menguasai banyak fungsi yang disediakan Excel agar dapat bekerja dengan cepat dan efektif. Gabungan keduanya ditambah fungsi SUM() sebagai akumulator dapat digunakan untuk menggantikan penggunaan fungsi SUMPRODUCT(), SUMIF(), SUMIFS(), COUNTIF(), COUNTIFS().

Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, selamat mencoba!

\*Penulis adalah Kepala Bagian TIK - Sekretariat BPPK

# Virus Vs Antivirus

Oleh : Edi Basuki Rakhmad

Menurut terminologi *software*, bahwa antivirus masuk dalam jenis *application software* dan merupakan salah satu paket program komputer yang saat ini menjadi aplikasi wajib bagi para pengguna komputer dengan basis sistem operasi desktop, walaupun saat ini aplikasi ini sudah banyak dapat diinstall pada sistem operasi pada perangkat *mobile*.

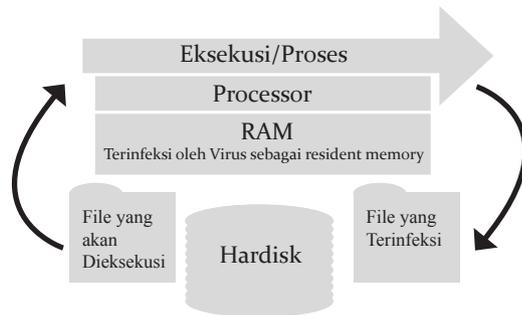
Antivirus *software*, dalam kamus wikipedia diartikan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus disebut juga sebagai *Virus Protection Software*. Aplikasi ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan suatu virus atau tidak. Umumnya, perangkat lunak ini berjalan di latar belakang (*background*) dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses (dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan).

## VIRUS KOMPUTER

Virus komputer adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin sebagian *script* programnya dengan cara menyisipkannya ke program lain atau dokumen yang dipanggil oleh komputer atau pengguna. Pada prinsipnya, virus komputer dibuat untuk mengganggu pengguna komputer atau merusak *file* komputer, bahkan yang fatalnya adalah virus komputer tersebut dapat menghapus data yang pada media penyimpanan komputer bahkan secara tidak langsung dapat merusak *hardware* komputer.

Pada prinsipnya, virus komputer bekerja mengikuti siklus kerja komputer. Secara singkat, komputer bekerja dengan cara memindahkan program komputer yang berada dalam memori sekunder (*harddisk*) yang dieksekusi pengguna atau komputer ke *memory primer* (Random Access Memory – RAM) untuk diproses dan

diolah bersama-sama dengan *processor* (*Central Processing Unit* – CPU), jadi program-program komputer yang berjalan tersebut akan lewat ke RAM untuk diproses dan menggunakan kapasitas/ruang kosong RAM untuk menyelesaikan proses kerjanya, kemudian setelah proses selesai, maka *Graphic User Interface* (GUI) dari hasil prosesnya akan dimunculkan di layar monitor.



Ilustrasi cara kerja virus komputer

Untuk kerja virus komputer, ketika suatu aplikasi/program yang bervirus tereksekusi/terpanggil, maka virus yang telah menempel pada program tersebut akan berdiam di RAM (sebagai *resident memory*) dan ketika program lainnya dieksekusi, program tersebut akan masuk ke RAM untuk di proses, maka seketika itu pula virus akan bekerja dan menginfeksi file-file (biasanya *executing file*) yang sedang diproses. File yang terinfeksi akan mempunyai kapasitas lebih besar dari biasanya akibat ada bagian dari perintah dalam virus komputer yang 'diinjeksi' ke dalam file tersebut (virus akan menyisipkan salinan dirinya ke program). Dalam kesempatan lain, jika file yang terinfeksi tersebut di eksekusi kembali, maka siklus 'menginfeksi' file lainnya akan terulang, sehingga banyak file eksekusi yang sedang dalam proses, akan 'terjangkit' oleh virus komputer. Namun demikian, ada juga virus yang membuat sistem komputer bekerja tidak sebagaimana mestinya, menyebabkan ketersediaan kapasitas RAM menjadi sangat sedikit/penuh atau CPU melakukan kerja terus-menerus (*CPU usage* sampai dengan 100%). Hal inilah yang menyebabkan komputer menjadi sangat lambat dengan performa yang sangat rendah.

Perlu diketahui, bahwasannya virus komputer adalah salah satu jenis dari *malware* (*malicious software*) yang diistilahkan sebagai suatu program komputer/*script* program yang berbahaya dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem

komputer.

### SIKLUS HIDUP VIRUS

Siklus hidup virus dapat dibagi menjadi 4 kriteria :

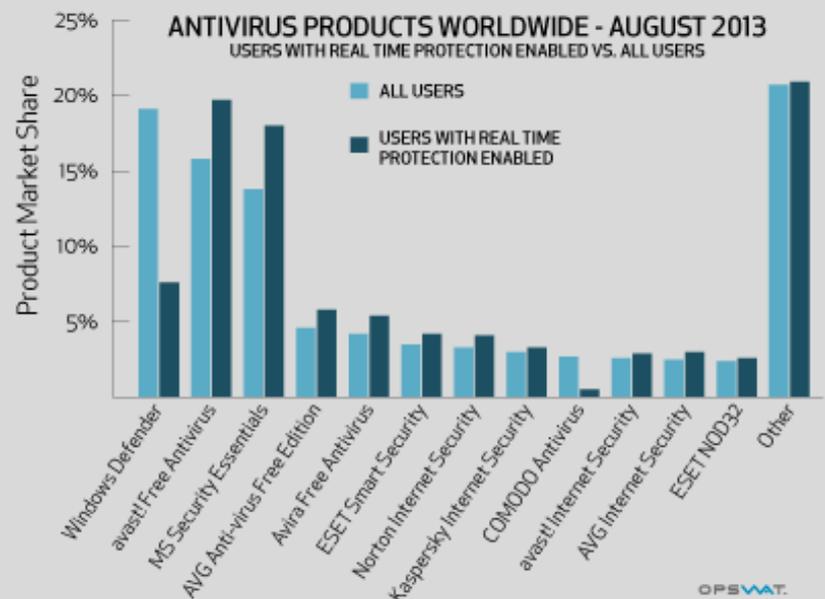
1. *Dormant phase* (fase istirahat/tidur) – Pada fase ini, virus tidak aktif. Virus diaktifkan oleh kondisi tertentu.
2. *Propagation phase* (fase penyebaran) – Pada fase ini, virus akan mengcopikan dirinya pada suatu program atau pada media storage.
3. *Trigerring phase* (fase aktif) – Di fase ini, virus tersebut akan aktif. Hal ini juga dipicu oleh beberapa kondisi pada dormant pase.
4. *Execution phase* (fase eksekusi) – Pada fase inilah virus yang telah aktif akan melakukan fungsinya, contoh: merubah atribut suatu file, membuat shortcut virus ke folder startup

### JENIS-JENIS VIRUS

Istilah virus komputer saat ini memiliki arti yang lebih luas lagi. Virus komputer tidak hanya diistilahkan sebagai suatu program yang menginfeksi file-file saja, tapi juga segala kegiatan yang mengganggu sistem komputer. Istilah virus pun saat ini merupakan bagian dari *Malware* (*Malicious Software*) yaitu perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik. Pembagian/pengklasifikasian jenis *malware* komputer di berbagai literatur sangatlah beragam, ada yang dapat menginfeksi dan merusak file, menggandakan diri, *self-install*, membuka pintu keamanan, mengurangi kekuatan *firewall* dan bahkan dapat mengunduh program yang mengarah pada kerusakan data pada komputer. Namun pada tulisan ini, hanya akan dipaparkan secara singkat beberapa jenis virus komputer yang sering menyerang komputer.

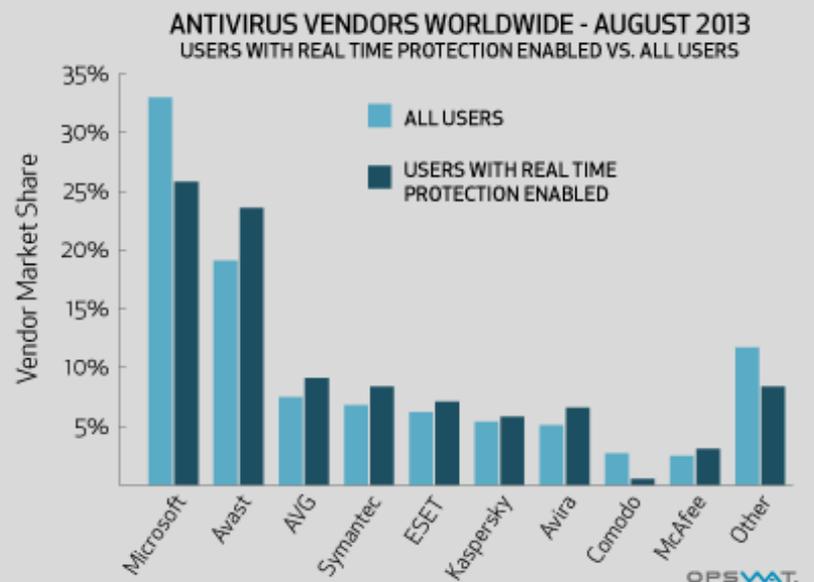
1. Virus Makro, jenis virus ini merupakan jenis yang paling sering ditemui. Virus ini biasanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman, seperti VB atau Bahasa C. Virus ini menginfeksi dokumen seperti normal.dot dan dokumen Ms Word.
2. Virus Polimorphic, jenis virus ini dapat merubah bentuk mereka untuk menghindari deteksi dan disinfeksi dari antivirus dengan cara mengenkripsi bagian dari virus itu sendiri.
3. Virus Stealth, virus ini memiliki kemampuan

Berikut ini adalah beberapa statistik penggunaan antivirus sampai dengan bulan Agustus 2013 yang dipublikasikan oleh OPSWAT.com, sebuah perusahaan software di San Fransisco yang menyediakan teknologi untuk pengamanan dan pengelolaan infrastruktur IT. Menurut upswat.com, publikasi yang dirilis ini bertujuan untuk mendistribusikan data unik yang dikumpulkan untuk menginspirasi diskusi publik.



untuk bersembunyi dari sistem operasi atau antivirus dengan membuat perubahan pada ukuran file atau struktur direktori. Stealth virus memiliki sifat anti-heuristik yang membantu mereka untuk bersembunyi dari deteksi heuristik.

4. Worm, jenis ini akan menduplikatkan dirinya sendiri pada harddisk. Hal ini akan membuat sumber daya komputer (Harddisk) menjadi penuh akan worm tersebut
5. Trojan, jenis virus ini akan mengambil data pada komputer yang telah terinfeksi dan mengirimkannya pada pembuat trojan itu sendiri.
6. Backdoor, diterjemahkan sebagai 'pintu belakang'. Dalam keamanan sistem komputer, merujuk kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan, selain dari mekanisme yang umum digunakan (melalui proses logon atau proses autentikasi lainnya)
7. Spyware, merupakan program yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengirim informasi tentang pengguna komputer itu sendiri tanpa diketahui oleh si pengguna (user), seperti pola pengguna melakukan akses internet, penggunaan kartu kredit saat transaksi, penggunaan PIN pada e-banking atau penggunaan password suatu *account*.



## METODE YANG DIGUNAKAN ANTIVIRUS

Software antivirus adalah perangkat lunak yang dibuat untuk melindungi komputer dari serangan, tidak hanya dari virus komputer, melainkan dari program berbahaya lainnya (malware). Agar pertahanan dapat bekerja secara efektif, software antivirus bekerja di belakang layar / tidak ditampilkan di layar monitor (*background*) secara terus menerus.

Berikut adalah metode yang digunakan oleh antivirus :

1. *Signature Based Detection*, metode ini yang paling sering digunakan. Untuk mengidentifikasi virus dan malware lainnya, software antivirus membandingkan isi file ke sebuah kamus dari virus *signature*. Karena virus dapat menanamkan dan menyamarkan diri dalam suatu file, seluruh file yang ada di komputer akan diperiksa satu persatu
2. *Heuristic*, metode yang dilakukan adalah dengan mendeteksi suatu aktivitas berbahaya. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi virus yang sebelumnya tidak diketahui.
3. *File emulation*, metode ini menggunakan pendekatan heuristic. Emulasi *File* masuk/ikut dalam berjalannya program dalam lingkungan virtual dan mendata aktifitas yang dilakukan program tersebut. Bergantung pada aktifitas yang dilakukannya, software antivirus dapat menentukan apakah program ini berbahaya atau tidak dan kemudian melakukan tindakan disinfeksi yang sesuai.

## ANTIVIRUS: PILIH MANA?

Saat ini sangat banyak *Software* Antivirus yang telah beredar di pasaran, sebut saja diantaranya adalah Network Associates (McAfee Anti-Virus), Symantec (Norton Antivirus dan Symantec Antivirus Corporate Edition), Kaspersky Lab (Kaspersky Anti-Virus), Microsoft (Microsoft Security Essentials), Alwil Software (Avast!), Avira (Antivir), Grisoft (AVG Antivirus), Eset Software (NOD32), dan pembuat antivirus lokal, seperti ARTAV Team (ARTAV Antivirus), Vaksincom (Vaksin Antivirus), PCMedia (PCMAV), dan Zai (SMADAV).

Pada prinsipnya, masing-masing antivirus memiliki pola tersendiri dalam melakukan *scanning*/deteksi dan menghapus virus komputer. Biasanya antivirus akan menginstall programnya dalam residen memory (aktifitas ini akan

membuat ruangan RAM terpakai). Penamaannya bermacam-macam, seperti *active guard*, *real time guard*, *proactive defense*, *resident shield*, *resident protection* dan sebagainya.

Bagaimana dengan penggunaan 2 antivirus sekaligus? Sebenarnya ini dapat dilakukan, namun harus diperhatikan apakah masing-masing antivirus tidak bertentangan dengan yang lainnya (*conflict*), karena boleh jadi pada saat 2 antivirus tersebut melakukan *scanning* bersamaan, antisipasi terhadap *file* yang terkena virus akan berbeda satu sama lainnya dan penggunaan resource pun akan menjadi lebih tinggi. Penggunaannya 2 antivirus ini tetap bisa dilakukan dan akan lebih baik, jika hanya 1 virus yang aktif dalam *memory* dan melakukan *Real Time Protection* (RTP), sedangkan yang lainnya diaktifkan secara manual (*scanning file* dilakukan sewaktu-waktu atau jika dibutuhkan). Biasanya salah satu dari antivirus yang digunakan tersebut adalah antivirus lokal, seperti ARTAV Team (ARTAV Antivirus), Vaksincom (Vaksin Antivirus), PCMedia (PCMAV), dan Zai (SMADAV).

Jadi, sudah selayaknya anda menggunakan antivirus sebagai proteksi komputer anda. Untuk pilihan antivirus, anda yang menentukan.

\*Penulis adalah Kepala Subbagian Sistem Informasi - Sekretariat BPPK

# Are Criminals Rational?

Oleh : Kristian Agung Prasetyo

## Background

We could see criminalities around us. The news on our television networks are full of those, not to mention those appear in newspapers or online media. Well, I loosely define online media as news coverage appeared on the internet. You, of course, might disagree with this definition, I totally would not mind. Getting back to the topic, it is also clear that the news also reveal that many of those criminals are actually caught by the police. The latest would probably the murder of the beautiful wife of a senior officer working for the respectable national auditor office. In this case, the police managed to solve the case and caught some of the hired murderers. We can also see that the national corruption prevention agency caught several high-ranked officials for corruption. There are other various examples, ranging from a judge taking a large sum of monies from the plaintiffs or a tax official blackmailing taxpayers. All of them were caught in action and had been sent to jail.

I myself believe that there are still many (potential) criminals at large. Some have committed wrongdoings but not imprisoned. Others perhaps thinking of committing a crime but have yet to do so. The question is, when it is clear that the authority opens their ears and eyes widely, why are those people still do whatever terrible things they do? What actually happens inside their minds? This article tries to shed light on these questions. Here, I would use the economic reasoning in explaining such

behaviour.

## Rational?

The first thing that I ask you to do, dear reader, is to try to travel back in time. I believe that most, if not all, of you went to a college once. The scariest thing as a college student, if I remember correctly, is the exam. It is scary for a clear reason: you either pass or else. If you pass, things are, hopefully, fine. But if you don't, you have to spend another year doing the same thing (and cost as much). Hence, every normal student has an incentive to pass the exams. Once they do, they could forget the miserable life in college and start a new life as a job seeker.

Let's say that there are two students, Kathy and Paul. Kathy tries to end her college life by studying as hard as she possibly could (which is what all students should do). By studying hard, she would have all the knowledge to pass the exams. However, Paul does not feel he needs to. He believes that he only needs the required marks to pass the test, not the knowledge. All he has to do is, well, cheat. By cheating, with a little luck, Paul believes that he might have a mark which may be higher than Kathy's who studies harder than he does.

But of course, nothing is free in this world. Kathy for example has to sacrifice her party time in order to study. This sacrifice is what economists call an opportunity cost. It basically means something that one has to let go to obtain something else. In this case, Kathy's opportunity cost is the party. What about

Paul? What is his cost?

Paul may have all the tricks in the world for cheating, but his college also has a bag of efforts in tackling it. After all, a college's reputation is at stake. For it to survive, it must produce alumni of high quality. As a result, it has an incentive not to tolerate the students to cheat. If a student is found to do so, that poor student will be fined Rp 10 million in an exam period, regardless the number of units being cheated. With this new fact, I can argue that if Paul is cheating and he is caught when doing so, then he must pay the Rp 10 million fine. This would be his cost of cheating. In addition, he also must bear the cost of the time he has to spend on making possibly tiny notes to be slipped under his shirt and some background research. Paul found out from his buddy who works as a staff – in exchange for a cuppa – that the college has a limited staffs and it has been decided that during exams, every staff is responsible for thirty exam takers. He also added that in the past, for every 100 test takers only 30 students actually caught for cheating.

Now, dear reader, I must ask you to put yourself in Paul's position. The first fact you need to consider is that the penalty is actually based on the exam period. So whether you cheat on one unit or all units, the penalty is the same. You might say that the penalty has a poor deterrent effect. As a result, you probably will decide that you will cheat on all units being tested rather than only on one or two units. If you are a risk-averse student,

the penalty might prevent you from cheating. On the other hand, if you are a risk-taker, you might continue to take the plunge and cheat in all units being examined. In this case, the penalty not only fails to prevent the cheating, but in fact it makes it worse. Here, it can be seen that the severity of the punishment may have an uncertain effect, depending on the risk profile of the person.

Secondly, to make matter worse, for a cuppa, you have the knowledge that it is impossible for a staff to oversee all students at the same time because they have thirty people on their watch at the same time. So, you may conclude that it may be possible to sneak under their nose. Here, you question the certainty of the penalty. You have the information that the college has a limited number of staffs and your mate has told you that the probability of being caught is actually 30%. Here, you can argue that if you cheat, chances are you can get away (70% is quite a good number).

With these two pieces of information, you have basically divided the punishment into two parts: its severity and its certainty. The severity of a punishment refers to the final penalty offender must face. The larger the fine, the more severe the punishment is. For criminal offences, usually the penalties vary from the humble fine to the draconian death sentence.

Once the severity has been taken into account, you also need to see the certainty of the punishment. In this case, we actually talk about the probability for an offence to be caught. Here, your probability of being caught cheating is 30%. In other words, if you cheat one hundred times, it is likely that you will be caught only 30 times, just like what your mate once told you. When caught, that offender will then face the full force of the penalty. A penalty – no matter how severe it is – is nevertheless useless if the offender is not caught. Similarly, a certain conviction does not mean anything if the penalty to be imposed is not high enough to deter the crime.

Let us go back to your situation. To

have a meaningful analysis, you should calculate your expected cost. Remember that we have established that for you to make a criminal offence, you would weigh the benefit of cheating against its cost. The cost here is the punishment. If you think that the benefit exceeds the punishment, then you would certainly decide to cheat, and vice versa. Because the probability of being caught is only 30%, you need to calculate the expected punishment. Remember that if you are caught cheating, you have to pay a penalty of Rp 10 million. As a consequence, your expected cost is It does mean that you actually pay Rp 3 million, but after committing several cheats, in average, you have to pay Rp 3 million. Here, combining the severity and the certainty of the penalty, you arrive at an expected punishment of Rp 3 million, upon which your further analysis is based. You would go ahead with your plan to cheat if you think this amount is not significant. On the other hand, if you believe that Rp 3 million is too much, then you might consider to cancel your criminal intent and start studying instead. In a general term, a supply of criminal offence would decrease if the expected punishment level is increased.

### Some Remarks

It is to be noted that the explanation outlined in the previous section assumes that you are a rational (potential) offender. Unfortunately, this may not always be the case. You may act based on instinct. It is possible that you initially do not have intention to commit an offence but once you see a window of opportunity opens, you simply act spontaneously. It is also possible that you make an offence because someone threaten and force you to do so. This is what lawyers call a duress. Another situation is where you commit a crime because you have been poorly informed about the real situation. Lawyers call this an undue influence. In such situations, the aforementioned way of thinking is simply not applicable.

Secondly, for an offence to be reduced, all we need to do is manipulate

the level of the expected punishment. We do not need to delve deeply to understand the reasons why a person commits a crime. While some people may find it rather disturbing – after all Jean Valjean' stole the bread not to satisfy his own lust – the deterrence model predicts that the supply of crimes would be reduced if the expected punishment can be increased, regardless the cause of the offence.

### Conclusion

In this article, I outlined my attempt to explain the behaviour of a criminal using an economic reasoning. Here, a criminal is assumed to be rational. In essence, it means that a criminal would optimise their own utility. Before committing a crime, a potential criminal has two things in their mind: the severity and the certainty of the punishment. A harsh punishment is meaningless when there is no one to be punished because the authority simply cannot find the offender. On the other hand, a certain conviction is of no use if the penalty is not high enough to prevent someone from committing a crime. These two must be combined for a meaningful analysis to be made. In this case, a combination of certainty and severity produces an expected punishment. The deterrent model predicts that the amount of criminal offence can be reduced if the level of the expected punishment is increased. Nevertheless, it is worth to mention that the model fails to acknowledge that criminals are not always rational. There are situations where rationality is not at the forefront. This can be seen in cases where there are spontaneous criminal actions or where the person committing crimes are under duress or undue influence. In addition, the model does not take into account on why a person commits a crime. It simply concludes that if an authority wishes to reduce the crime rate, the expected punishment level must somehow be manipulated. What do you reckon?

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusklat Pajak

## Business Process

## Mapping



Untuk Meningkatkan  
Kepuasan Pelanggan

GUIDEBOOK

## Judul Buku:

Business Process Mapping Untuk Meningkatkan  
Kepuasan Pelanggan

Penulis: vJ. Mike Jacka dan Paulette J. Keller

Cetakan: Cetakan I – 2010

Penerbit: Penerbit PPM

Jml Halaman: 426

Oleh : Romy Setiawan

Buku ini ditulis oleh dua penulis yaitu: J. Mike Jacka dan Paulette J. Keller. Mereka adalah akuntan yang telah memiliki banyak jam terbang di bidang audit internal. Pada saat ini mereka menangani audit di bidang khusus asuransi audit petani. Di luar kesibukan tersebut, mereka juga menjadi pembicara tentang audit internal.

Bab awal dalam buku ini memberikan jawaban dari pertanyaan “Apa yang disebut pemetaan proses?” Jawaban dari pertanyaan tersebut diuraikan secara lengkap, yang disertai dengan contoh kasus dalam pembuatan film. Tahapan awal dalam memahami nilai pemetaan proses adalah memahami alasan dari evaluasi proses terlebih dahulu. Pemetaan proses adalah cara merekam cerita-cerita dari setiap pelaku usaha dalam suatu organisasi.

Disampaikan juga penjelasan secara garis besar tahap-tahap dari suatu sistem pemetaan bisnis di bab awal ini, yaitu identifikasi proses (mempelajari apa yang menyusun proses yang sedang dikaji); pengumpulan data (mempelajari apa yang ada di dalam proses dan dengan siapa kita akan terlibat); wawancara dan pembuatan peta (mempelajari dan merekam tindakan-tindakan dalam sebuah proses); analisis

data (mempelajari apa yang dapat dilakukan untuk membuat suatu proses menjadi lebih baik); dan presentasi (memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah kita pelajari). Masing-masing tahapan tersebut menjadi judul bab-bab berikut dan pembahasan lebih dalam yang disertai dengan contoh untuk membantu pemahaman pembaca. Keseluruhannya, buku *Business Process Mapping* terdiri dari 12 bab dan setiap bab memiliki ringkasannya serta catatan-catatan yang dijadikan pokok penting untuk analisis.

Hal yang menarik dari penyampaian materi di tiap bab buku ini adalah tidak terlalu serius sebagaimana buku-buku yang membahas masalah manajemen pada umumnya. Setiap pembahasan diawali dengan cerita yang menuntun pembaca untuk memahami situasi dan proses kegiatan, yang pastinya berhubungan dengan materi yang akan di bahas dalam bab tersebut. Penulis menggunakan latar belakang suatu proses produksi/pembuatan film. Suatu proses produksi yang sudah familiar bagi kebanyakan orang, sehingga memudahkan pembaca untuk mencerna dan memahami keterkaitan antara teori yang disampaikan penulis dengan prakteknya di kegiatan usaha sebenarnya.

Ketika melihat *cover* buku *Business Process Mapping*, terlintas akan ada dan banyak gambar ilustrasi berwarna yang menarik, yang tentunya akan sangat membantu bagi pembaca yang membutuhkan penjelasan visual untuk memahami penjelasan-penjelasan yang disampaikan melalui kata-kata. Gambar-gambar berupa *flowchart* dari suatu bisnis proses sangat dominan dalam buku ini. Hal tersebut bisa dimaklumi karena bagaimanapun, buku *Business Process Mapping* merupakan buku yang membahas masalah manajemen dan bukan buku komik yang keseluruhan isinya adalah gambar ilustrasi.

\*Penulis adalah Kepala Subbagian  
Dukungan Teknis - Sekretariat BPPK

# Perayaan 2.794 Wisudawan dan Wisudawati STAN

Oleh : Shera Betania





*Wisuda merupakan acara peresmian dan sekaligus perayaan bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu. Wisuda menunjukkan adanya suatu pencapaian atau keberhasilan, sehingga tidak mengherankan jika suasana wisuda itu membahagiakan dan membanggakan, khususnya bagi peserta didik, para orang tua serta keluarga peserta didik, dan penyelenggara pendidikan.*

***Menteri Keuangan saat memberikan sambutan di depan para wisudawan STAN -Rabu, 23 Oktober 2013-***

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kembali menggelar Sidang Terbuka Wisuda Tahun Akademik 2013. Sidang terbuka ini dilaksanakan pada Rabu, 23 Oktober 2013 di Sentul International Convention Center (SICC). Prosesi wisuda ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, beberapa pejabat eselon I Kemenkeu, widyaiswara, orangtua mahasiswa, termasuk institusi-institusi yang akan menerima lulusan STAN.

Wisuda STAN tahun 2013 semarak dengan suasana kebahagiaan para wisudawan/wati beserta keluarganya. Prosesi wisuda dimulai tepat pukul 08.30 saat para wisudawan memasuki aula utama SICC. Sidang Terbuka dipimpin oleh Ketua Sidang Terbuka, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, KA. Badaruddin. Bersama anggota Senat, yaitu Direktur STAN, para Kepala Pusdiklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta para widyaiswara STAN, sidang terbuka Wisuda STAN tahun 2013 dibuka dengan ketukan palu sebanyak tiga kali. Dalam laporan penyelenggaraan Wisuda STAN 2013, Ketua Senat, Sekretaris Jenderal Kemenkeu,

menyampaikan pada tahun akademik 2012/2013 yang baru saja berakhir, mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan (lulus) dan menjadi wisudawan adalah sebanyak 2.794 orang. Jumlah ini meliputi lulusan dari:

1. Program Diploma IV Akuntansi, sebanyak 275 orang;
2. Program Diploma III Keuangan sebanyak 2.519 orang yang berasal dari enam spesialisasi sebagai berikut:
  - Akuntansi: 1.240 orang;
  - Kebendaharaan Negara: 328 orang;
  - Pajak: 751 orang;
  - Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan: 35 orang;
  - Kepabeanaan dan Cukai: 120 orang; dan
  - Pengurusan Piutang dan Lelang Negara: 45 orang.

Menteri Keuangan, Chatib Basri, hadir memberikan kata sambutan sekaligus mewisuda para wisudawan terbaik. Di awal kata sambutannya, beliau bercerita perihal kehadirannya di acara Wisuda STAN 2013 ini. Sebagai pengguna *social media* twitter, beliau turut memantau perkembangan acara wisuda STAN 2013. Beliau membaca keluh kesah para wisudawan seputar perubahan jadwal wisuda yang menyesuaikan dengan agenda Menkeu. Atas saran Sekretaris Jenderal, Menkeu memutuskan untuk tetap hadir, turut merayakan kebahagiaan bersama para wisudawan/wati STAN. Menkeu pun hadir di SICC menjawab keluh kesah wisudawan/wati.

Menteri Keuangan hadir sebagai tamu istimewa bagi para wisudawan/wati. Di depan para wisudawan/wati, keluarga, serta para undangan yang hadir, Menteri Keuangan menyampaikan harapannya. Wisuda berarti telah menyelesaikan satu tahap pendidikan. Saat itu pula wisudawan/wati memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengemban tugas sesuai lingkup dan jenjang tugas. "Namun saya ingin mengingatkan bahwa pengalaman mengajarkan, untuk bisa menunaikan tugas dan tanggung



jawab dengan baik, selain memiliki dan mampu menerapkan kompetensi teknis, setiap pegawai juga harus memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas dan integritas yang tinggi”, harap Menkeu kepada seluruh lulusan STAN. Sebagai kader-kader Kementerian Keuangan, beliau juga mengharapkan penanaman karakter yang sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Kebahagiaan tak berhenti hingga Menteri Keuangan meninggalkan aula SICC. Seremoni masih berlangsung dengan pemberian tanda kelulusan kepada seluruh wisudawan/wati. Secara bergantian, Ketua Senat dan para anggotanya meluluskan para wisudawan/wati. Acara wisuda juga diisi dengan hiburan nyanyian dan puisi dari para wisudawan/wati. Nyanyian dan puisi untuk orang tua, nyanyian untuk persahabatan serta ungkapan terima kasih kepada STAN diberikan sebagai tanda kebahagiaan dan terima kasih.

Acara wisuda berakhir sekitar pukul 14.00. Wajah bahagia dan tawa tak hentinya mengisi hari wisuda saat itu. Semoga wisuda tidak lagi menjadi seremoni belaka, tapi menjadi awal dari kerja keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

IPK yang dicapai oleh lulusan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

- » Program Diploma IV Akuntansi, IPK rata-rata 3,35. IPK tertinggi 3,65 (Tris Fajar Uji Putra),
- » Program Diploma III Akuntansi, IPK rata-rata 3,36, dan IPK tertinggi 3,82 (Nur Muhlisin dan Wijayani Sari),
- » Program Diploma III Kebendaharaan Negara, IPK rata-rata 3,44, dan IPK tertinggi 3,88 (Gitty Ajeng Triastie),
- » Program Diploma III Pajak, IPK rata-rata 3,34, dan IPK tertinggi 3,81 (Bernadi Vito),
- » Program Diploma III Penilai/Pajak Bumi dan Bangunan, IPK rata-rata 3,40 dan IPK tertinggi 3,66 (Ika Kusumawati),
- » Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai, IPK rata-rata 3,43 dan IPK tertinggi 3,78 (Arief Tirtana),
- » Program Diploma III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, IPK rata-rata 3,41 dan IPK tertinggi 3,81 (Alfian Setya Utama).

*“Untuk menjadi mahasiswa terbaik, harus lebih meningkatkan keinginan untuk belajar dan motivasi, terutama kalau ada dukungan dari orang tua, itu pasti akan meningkatkan motivasi kita untuk belajar.”*

*-Gitty Ajeng Triastie (IPK tertinggi Kebendaharaan Negara 2013)*

\*Penulis adalah Pelaksana pada Bagian TIK  
Sekretariat BPPK

# Terikat

Oleh : Agus Suharsono

## Seorang Anak Kusir

Sebagai seorang anak kusir istana, tataran derajat Karno berada di bawah dalam lingkungan kerajaan Astina. Ketampanan, kegagahan, kecerdasan dan *keprigelannya* dalam olah senjata hanya dipandang sebelah mata oleh semua pihak. Dalam kesehariannya ikut mengurus kuda dan kereta kerajaan, ia melihat bagaimana Guru Besar Durna mengajarkan ilmunya kepada ke seratus empat pangeran putra dua pewaris tahta kerajaan Astina. Lima bersaudara putra Pandu dan sembilan sepuluh sembilan putra Destrarata.

Ketika harus menyiapkan kuda-kuda untuk para pangeran itu, Karno melihat bagaimana Guru Besar Durna mengajarkan ilmu kanuragan. Hanya dengan melihat sekilas, di lain waktu Karno mencobanya di padang penggembalaan kuda. Ia sudah menguasai bahkan dengan lebih baik dibanding semua para pangeran tersebut. Bukan hanya ilmu olah kanuragan, ilmu pedang dan ilmu memanah juga ia kuasai. Wejangan ilmu ketatanegaraan guru Besar Durna yang kadang ia dengar pun ia kuasai. Jika ada yang belum jelas segera ia baca di *pustaka loka* kerajaan tempat menyimpan semua kitab.

Demikianlah Karno muda tumbuh menjadi seorang satria di kandang kuda. Orang-orang di lingkungan kerajaan yang melihat dengan hati jernih heran dengan pancaran aura anak kusir Adhirata tersebut. Ada yang istimewa. Tapi para pangeran muda Duryudana bersaudara maupun Yudistira bersaudara melihatnya hanya sebagai *gedibal*, pembantu yang harus melayani semua keperluan yang berkaitan dengan kuda dan kereta. Para pangeran tersebut seakan hidup

di menara gading yang cukup tinggi sehingga tidak bisa melihat mutiara yang berada tepat di bawahnya.

Hari demi hari, tahun demi tahun Karno hidup dalam tataran *gedibal*, pesuruh. Keadaan ini menumbuhkan rasa iri di alam bawah sadarnya, suatu ketika aku akan seperti mereka bahkan mengalahkannya. Akan kubuktikan. Stempel dan penderitaan sebagai warga kelas dua menumbuhkan rasa dendam yang melekat sampai ia gugur nantinya. Rasa dendam terhadap kemiskinan tadi semakin menguatkan tekadnya untuk terus belajar dan berlatih tiap hari tanpa lelah. Semangat kapok sebagai orang miskin selalu mengobarkan semangatnya. Rasa disepelkan oleh dunia semakin membuatnya untuk membuktikan siapa dirinya.

Saat yang dinantikan tiba. Guru Besar Durna mengadakan ujian akhir ilmu kanuragan di Kampus Sokalima. Ujian itu bukan hanya menentukan lulus atau tidak tapi juga akan dicari siapa murid yang terbaik. Seperti sudah diduga, di akhir ujian Duryudana hanya tinggal berdua dengan adiknya Dursasana. Adik-adik lainnya dinyatakan tidak lulus, karena memang tidak pernah serius dalam belajar. Sedangkan Yudistira bersaudara masih komplit. Ujian terakhir adalah memanah. Yang diujikan bukan hanya ketepatan bidikan tapi juga kecepatannya. Bima sebagai murid pertama yang keluar dari kompetisi, karena semua *gandewo* yang diregangkannya patah, terlalu *roso* menariknya.

Kemudian berturut-turut Yudistira gagal karena tidak tega membidik sasaran yang berupa seekor burung. Dursasana, Nakula dan Sadewa akhirnya juga dinyatakan gagal karena bidikannya tidak tepat. Tinggal Arjuna dan Duryudana di final. Untuk menentukan siapa yang terbaik Guru Besar Durna memasang dua sasaran satu untuk Duryudana satu untuk Arjuna. Dalam sekejap sepuluh anak panah kedua pangeran tersebut melesat tepat mengenai sasaran.

Hasilnya sasaran bidik Duryudana sekarang menjadi seperti seekor landak.

diucapkan. Hari berikutnya sebuah pertempuran besar meledak, menghantar Karno keabadian.

### Cermin Kita

Kisah Karno tersebut hanyalah cuplikan kecil dari kisah yang bisa sangat panjang jika diuraikan. Banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya dari kisah-kisah Mahabarata. Cuplikan kisah ini salah satunya. Kisah bagaikan cermin dimana kita bisa memandangi diri kita sendiri.

Karno, bisa saja hanya kiasan. Yang sebenarnya adalah kita sebagai manusia yang bekerja di Kementerian Keuangan. Sebagai birokrat, sebagaimana halnya Karno, mungkin diantara kita dulu juga bukan siapa-siapa. Bisa saja hanya sederajat dengan Karno anak seorang kusir kuda, bisa juga lebih tinggi sedikit misalnya pegawai negeri rendah. Juga tidak menutup kemungkinan lebih rendah lagi. Hanya seseorang yang tinggal jauh di perbatasan negeri.

Keinginan membuat kita berilmu. Kehendak kuat membuat kita duduk dalam sebuah jabatan. Kapok hidup miskin membuat kita giat bekerja mengejar kemakmuran. Demikian juga Karno yang mempunyai hutang budi kepada Duryudono, mungkin diantara kita juga ada yang hutang budi kepada seseorang sehingga menduduki jabatan yang sekarang.

Bimbang datang ketika pilihan harus diambil, membalas budi seseorang yang pernah berjasa atau mengutamakan kebenaran dan keadilan. Berhikmah dari kisah Karno, sebaiknya boleh kita menerima budi seseorang sehingga kita menduduki jabatan tertentu, tetapi jangan menutup mata hati kita untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, dan mana yang harus dihindarkan. Jangan terikat bagai budak, jadilah pribadi yang merdeka.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusklat Pajak

Sedangkan sasaran bidik Arjuna tidak satupun terdapat anak panah yang menancap. Semua anak Destarata bersorak sorai ia yakin kakak tertuanya keluar sebagai pemenang, sedangkan putra Pandu hanya senyum-senyum. Wajah Duryudana merah padam menahan amarah, kalah. Ia tahu bahwa semua anak panah Arjuna mengenai tepat titik tengah sasaran bidik dan saking kuatnya laju anak panah tersebut satu persatu menembusnya. Saking marahnya Duryudana melempar *gandewo* panahnya ke arah adik-adiknya yang masih bersorak-sorak mengira dirinya yang menang.

### Menjelma Satria

Guru Besar Durna tersenyum puas, ilmu *jemparingnya* telah dikuasai Arjuna dengan sangat sempurna. Arjuna lulus sebagai murid terbaik dengan predikat *summa cum laude*. Ketika akan diumumkan terdengar suara ledakan yang sangat keras, semua kaget. Itu adalah suara *gandewo* yang ditarik oleh seorang yang sangat mahir dalam *olah jemparing*. Itu adalah pesan dari seseorang yang menantang sang pemenang. Sebagai guru yang bijaksana Durna mempersilahkan siapapun yang sudah mengajukan tantangan. Diluar dugaan semua yang ada, Karno si anak juru kusir masuk lapangan menenteng sebuah *gandewo*.

Suara ledakan *gandewo* Karno, mengetarkan hati Arjuna. Ia tahu betul bahwa ilmu *jemparing* Karno ternyata lebih tinggi. Guru Besar Durna menyiapkan dua sasaran, dan siap-siap memberi aba-aba pertandingan. Arjuna tidak mau meladeni tantangan itu dengan alasan ia seorang pangeran putra seorang raja besar tidak pantas bertanding dengan seorang anak kusir.

Merah padam wajah Karno terbakar amarah dan penghinaan yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Semua yang hadir termangu, diam. Duryudana yang kagum dengan potensi kekuatan Karno maju ke depan. Dipeluknya Karno, diumumkannya bahwa Karno sekarang menjadi saudara

angkatnya. Tapi Arjuna tetap *kekeuh* tidak mau meladeni tantangan Karno. Guru Besar Durna menutup acara tersebut dengan hasil Arjuna sebagai murid terbaik. Semua diminta pulang.

Pihak Pandawa senang karena prestasi Arjuna. Sedangkan pihak Kurawa bersorak-sorai karena Karno yang sangat perkasa ada di pihaknya. Sedangkan Karno, bibit dendam dalam hatinya makin membara. Karno menyalahkan kemiskinanlah yang menyebabkan dirinya dihina Arjuna, ia bersumpah tidak akan miskin lagi apapun caranya. Jasa Duryudana yang mengangkatnya menjadi saudara tidak akan pernah ia lupakan sampai nantinya.

### Terikat Budi

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya Duryudana memberi semua yang diperlukan Karno: harta, kekuasaan, dan derajat. Perjalanan karir Karno sangat pesat dalam waktu dekat ia menjadi seorang adipati sekaligus senopati di Astina. Kemudian Karno memperistri Dewi Surtikanthi anak Prabu Salya. Dewi Banowati adik Surtikanthi adalah Permaisuri Duryudana. Terjadi tali temali perkawinan antara Duryudana, Karno dan Salya.

Karena terikat budi, walaupun sedang di puncak karirnya, Karno tetap menjadi *gedibal* (lagi) kehendak Duryudana. Hati Karno sering berontak dengan kebijakan Duryudana yang sewenang-wenang, tapi ia sudah tidak bisa menolak lagi. Duryudanalah yang mengangkat derajatnya dari anak seorang kusir menjadi kesatria utama di jajaran kerajaan Astina. Demikianlah, Karno satria tiada tanding menguasai segala ilmu kesaktian, tidak bisa melepaskan jeratan hutang budi kepada Duryudana.

Di akhir hidup, sebuah pilihan harus diambil oleh Karno. Ia harus melawan Arjuno dalam perang Mahabarata. Pada awalnya ia bahagia, dendamnya tersalurkan. Senja sebelum hari pertempuran Dewi Kunthi mendatangi Karno, sebuah tabir disingkapnya. Karno adalah anaknya, jadi Arjuna adalah adik kandungnya. Sumpah setia sudah

Kita tentu sangat familiar dengan minuman yang satu ini. TEH. Minuman yang bisa disajikan secara panas ataupun dingin. Layaknya yang disajikan dalam iklan, teh mampu membuat suasana makin hangat, bahkan mampu memperlambat silaturahmi. Teh merupakan teman baik dalam segala suasana, maupun itu formal atau non-formal.

Teh sendiri memiliki beberapa jenis. Yang cukup dikenal adalah teh hitam dan teh hijau. Salah satu yang memiliki manfaat tinggi adalah teh hijau. Selain rasanya yang nikmat, ternyata teh hijau juga terkenal dengan khasiat yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh karena teh hijau ini memiliki kandungan anti oksidan yang cukup tinggi. Artikel ini merangkum beberapa khasiat teh hijau yang telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber.

- **Menjaga Kesehatan Kulit**

Teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami. Secara tidak langsung, sering mengonsumsi teh hijau dapat menghindarkan dari penyakit kanker kulit. Selain dapat mencegah penyakit kanker kulit, teh hijau juga terbukti mampu membuat kulit kita tidak cepat keriput. Zat antioksidannya mampu membuat kulit wajah menjadi lebih terlihat segar dan cerah, melembabkan kulit, serta menghindari kulit kering.

- **Meningkatkan kesehatan rambut**

Teh Hijau juga dapat mencegah kerontokan pada rambut, menghilangkan ketombe, serta mengatasi iritasi yang terjadi pada kulit kepala. Kandungan Vitamin C dan E pada teh hijau dapat membuat rambut kita terus tumbuh, ber-regenerasi, menguatkan, dan melembabkan rambut.

- **Sebagai Minuman Penurun Berat Badan**

Teh hijau terbukti dapat mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh sehingga secara otomatis jumlah lemak pada tubuh akan berkurang. Selain itu pada teh hijau juga terdapat katekin polifenol yang menyebabkan intensitas pembakaran lemak. Teh Hijau dapat membakar kalori. Jika diminum secara rutin, metabolisme tubuh meningkat dan penurunan berat badan pun akan terbantu.

- **Mencegah Penyakit Diabetes**

Teh hijau memiliki kemampuan untuk mengatur kandungan kadar gula dalam darah. Bagi para penderita diabetes sangat disarankan untuk sering-sering mengonsumsi teh hijau.

- **Menghambat Pembentukan Plak Gigi**

Mengonsumsi Teh Hijau dapat mencegah munculnya kerusakan pada

gigi. Para peneliti mengemukakan bahwa jika berkumur dengan Teh Hijau dapat mencegah pembentukan karies gigi.

- **Memperbaiki Mekanisme Seluler Di Otak**

Sifat kimia dari Teh Hijau bisa mempengaruhi produksi sel-sel otak yang dapat meningkatkan memori dan pembelajaran spasial. Teh Hijau memiliki zat kimia organik EGCG yang berguna meningkatkan fungsi kognitif dengan mempengaruhi generasi sel neuron (neurogenesis).

- **Mengurangi Resiko Penyakit Kanker dan Jantung**

Antioksidan dari Teh Hijau dapat melawan radikal bebas yang ada pada tubuh. Radikal bebas dapat menyebabkan penggumpalan darah, kanker, jantung, hingga kerusakan DNA. Teh Hijau juga mampu meningkatkan kolesterol HDL (kolesterol baik) dan menurunkan kolesterol LDL (kolesterol jahat).

- **Mengurangi Mata Bengkak**

Kantong teh hijau juga dapat membantu mengurangi mata bengkak. Caranya dengan menyeduh teh, biarkan kantong teh dingin, lalu letakkan ke mata selama 10-15 menit.

# Khasiat Si Hijau

Oleh : Shera Betania



Sumber: intisari-online.com



Sumber: bswllc.com

# Penerapan Pengendalian Internal pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Oleh : Mohammad Iqbal

## DASAR PENGENDALIAN INTERN DI KEMENTERIAN KEUANGAN

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem

pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Undang-Undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan semua Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah untuk menjalankan sistem pengendalian

intern.

Penerapan pengendalian intern di lingkungan kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan landasan aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

#### PENGENDALIAN INTERN DI BPPK

Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pengendalian Intern ini harus dilaksanakan oleh semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan. BPPK sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan juga melaksanakan fungsi pengendalian intern yang dijalankan oleh Subbagian Kepatuhan Internal, Bagian Kepegawaian, Sekretariat Badan untuk lingkup unit pusat dan eselon I keseluruhan, serta Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal (TUKI) untuk lingkup kantor pelayanan (Balai Diklat Keuangan).

Sejak tahun 2011, BPPK telah menyusun perangkat dan melaksanakan pemantauan Pengendalian Intern di Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan. Pada tahun 2012 kuantitas perangkat

pemantauan juga diperbanyak dan meluas hingga ke Sekretariat Badan. Pada tahun 2013 ini, selain menjalankan monitoring berdasarkan perangkat yang telah disusun dan menindaklanjuti hasil monitoring yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, BPPK kembali akan melaksanakan kegiatan penyusunan perangkat pemantauan unit kerja di lingkup pusat dan daerah, dengan menjabarkan lebih banyak SOP dengan mempertimbangkan faktor resiko. Selain itu akan dilaksanakan pula Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR) secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur pemantauan.

Selain itu pada tahun 2013 telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 Tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian.

Perbedaan diantara dua Keputusan Menteri Keuangan tersebut yakni KMK Nomor 152 hanya memberi penekanan pada 2 dari 5 unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yakni *monitoring* dan *control activities*. Sedangkan KMK Nomor 32 sudah mencakup dalam 5 unsur SPIP; *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, dan *monitoring*.

Dalam hal *Pemantauan Pengendalian Utama*, pada tahun 2013 ini pula BPPK setidaknya telah menyusun dan memiliki 9 (sembilan) perangkat pemantauan untuk unit Balai Diklat Keuangan, 6 (enam) perangkat pemantauan untuk Unit Pusdiklat/STAN, dan 2 (dua) perangkat pemantauan untuk ruang lingkup Sekretariat Badan. Keseluruhan perangkat tersebut kini sedang melalui tahap penyempurnaan dan tengah dikonversi agar sesuai dengan peraturan

terbaru yakni KMK Nomor 32/KMK.09/2013.

Yang patut digarisbawahi pada tahun 2013 ini, terdapat rencana agenda pelaksanaan *pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan* di BPPK. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut, di akhir tahun 2013 ini manajemen, sebagai bentuk pertanggungjawaban, didorong untuk membuat pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh pelaksana pemantauan. Pernyataan manajemen dibuat secara berjenjang dari pimpinan kantor pelayanan/operasional sampai dengan pimpinan eselon I.

#### PENUTUP

Penerapan pengendalian intern yang efektif merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya tujuan semua unit kerja, termasuk instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian intern telah dirancang dengan memadai dan dilaksanakan secara efektif, perlu dilakukan pemantauan pengendalian intern.

Dengan adanya komitmen dari manajemen unit-unit eselon I untuk menerapkan pengendalian intern yang efektif serta diiringi dengan adanya suatu pemantauan yang efektif melalui pemantauan pengendalian utama dan pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang. Akhirnya diharapkan Kementerian Keuangan - khususnya BPPK- akan menjadi institusi yang selalu dipercaya oleh masyarakat.

Semoga BPPK dapat menjadi contoh terbaik dalam pelaksanaan pengendalian intern ini!

(Dirangkum dari berbagai sumber dan peraturan terkait pengendalian intern)

\*Penulis adalah Pelaksana Bagian Kepegawaian - BPPK



Sumber: [myleadershiptoolbox.blogspot.com](http://myleadershiptoolbox.blogspot.com)

# Pemimpin Sebaiknya Ditakuti atau Dicintai

Oleh : Agus Suharsono

## PEMIMPIN SEBAIKNYA DITAKUTI ATAU DICINTAI

Pemimpin dalam sebuah institusi mau tidak mau harus berhubungan dengan seluruh anak buahnya. Hubungan pimpinan-anak buah tersebut dapat ditarik garis pemisah yang ekstrem untuk menentukan dua tipe pemimpin yaitu ditakuti atau dicintai. Dalam kenyataan, kita sering melihat dua tipe pemimpin tersebut, meski tidak juga dipungkiri ada juga pemimpin yang ada ditengah-

tengahnya. Tulisan ini akan membahas sebaiknya pemimpin itu ditakuti atau dicintai berdasarkan kajian pustaka yang disajikan secara deskriptif.

### *Machiavellis*

Niccolo Machiavelli adalah seorang diplomat yang hebat pada masa *renaissance*, mengabdikan pada keluarga Medici yang berkuasa di Italia. Sudah jamak waktu itu jika para penguasa selalu mendapat persembahan harta, kuda, dan barang berharga lainnya.

Niccolo Machiavelli tahun 1513 tidak mempersembahkan barang-barang berharga tetapi sebuah buku kecil yang diberi judul *Il Principe* (Sang Pangeran). Isi buku tersebut sering dihakimi dianggap melegalkan tipu muslihat, kelicikan, dusta, serta kekejaman dalam menggapai kekuasaan, namun beberapa orang juga memujinya sebagai buku yang sangat jujur dan realistis untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan.

Keterusterangan dalam *Il Principe*

menjadikan buku tersebut selama berabad-abad dijadikan sebuah sinonim negatif bagi kelicikan dan kepalsuan. Orang yang terlihat ambisius dan selalu berupaya mencapai tujuannya dengan segala cara akan disebut sebagai *machiavellis*. Tapi tidak diragukan hampir semua pemimpin dunia pernah membaca buku tersebut. Kabarnya Napoleon selalu tidur dengan buku tersebut di bawah bantalnya. Begitu pula Hitler, Lenin, dan Stalin. Bahkan Benua Mussolini secara khusus mengkaji buku ini dalam karya tulis doktoratnya. Michael H. Hart menjuluki buku tersebut sebagai *Buku Pedoman Para Diktator*, dan memasukkan Niccolo Machiavelli dalam deretan 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia.

### Dicintai atau Ditakuti

Sedikit mari kita longok pendapat Niccolo Machiavelli yang menanyakan apakah lebih baik pemimpin itu dicintai atau ditakuti? Jawaban terbaiknya adalah ia harus dicintai dan juga ditakuti. Namun, dua hal tersebut sulit untuk bisa jalan berdampingan. Maka, lebih aman apabila pemimpin lebih ditakuti daripada dicintai. Alasannya, manusia pada umumnya tidak tahu berterimakasih, munafik, tamak, takut akan bahaya. Jadi, selama pemimpin memberikan keuntungan pada bawahan, mereka dapat dikuasai. Manusia tidak segan-segan membela pemimpin yang ditakuti daripada yang mereka cintai. Rasa cinta diikat dengan rantai kewajiban, karena pada dasarnya manusia itu egois, maka pada saat manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan, rantai kewajiban tersebut akan putus. Sedangkan rasa takut dipertahankan oleh hukuman-hukuman yang menakutkan, dan tidak pernah gagal.

Selanjutnya, Machiavelli berpesan bahwa pemimpin haruslah menjadikan dirinya ditakuti dengan cara di mana apabila dia tidak dicintai maka tidak boleh dibenci. **Karena rasa takut dan kebencian bisa jalan beriringan, sedangkan rasa cinta dan benci tidak bisa beriringan.**

Ajaran Niccolo Machiavelli memang kejam tetapi harus kita akui ajarannya sangat realistis, Anda setuju atau tidak bukti mengatakan bahwa masih ada pemimpin yang menjalankan prinsip-prinsipnya. Robert Greene tahun 2007 menulis buku *The 48 Laws of Power*. Greene secara terus terang mengungkapkan terima kasihnya kepada sahabatnya Michial Schwars yang mengajarkannya terlibat di sekolah seni Fabrika di Italia dan memperkenalkannya pada Joost Elffers. Mereka berdiskusi tentang ide Machiavelli dan berkesimpulan bahwa ide Machiavelli ternyata kekal. Hasil diskusi tersebut membuahkan buku *The 48 Laws of Power* setebal 656 halaman, sedangkan *Il Principe* hanya 184 halaman. Jika *Il Principe* bertahan ratusan tahun, ada kemungkinan *The 48 Laws of Power* juga akan menatap masa depan yang juga cerah dan panjang. Dalam sampulnya tertera stempel "Buku Terlaris Dunia."

Awalnya memang Machiavelli hanya mengajarkan cara mempertahankan kekuasaan bagi para pangeran. Tetapi ajaran itu juga bisa dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan pemimpin di semua lapisan. Mari kita simak hukum pertama dari 48 Hukum Kekuasaan: *Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda*. Senantiasalah buat atasan Anda merasa superior. Walaupun Anda ingin menyenangkan hati mereka atau membuat mereka terkesan, jangan terlalu berlebihan dalam menunjukkan bakat-bakat Anda. Jika tidak, Anda hanya akan berhasil memancing reaksi sebaliknya, memancing perasaan takut dan perasaan tidak aman pimpinan. Buatlah atasan Anda tampak lebih *brilliant* daripada sesungguhnya, maka Anda akan memperoleh kekuasaan terbesar.

Mungkin Anda tidak setuju dengan ajaran itu, tapi yakinkah bahwa Anda tidak akan mencobanya? Atau, mari kita buka hukum keenam: *Carilah perhatian, berapapun harga yang harus dibayar*. Segalanya dinilai berdasarkan penampilannya. Apa yang tak terlihat tidak berarti sama sekali. Jangan pernah biarkan diri Anda tersesat di tengah

gerombolan massa atau terlupakan. Jadilah manusia yang menonjol. Jadilah manusia yang menarik perhatian berapapun harga yang harus dibayar. Jadikan diri Anda magnet dengan tampak lebih besar, lebih berwarna-warni, dan lebih misterius daripada gerombolan massa yang membosankan dan pemalu. Sekecil apapun peran Anda dalam kegiatan yang diikuti pimpinan, usahakan ikut, apapun harganya.

Keyakinan kaum *machiavellis* tersebut sangat mungkin bisa meningkatkan kinerja dan mewujudkan tujuan institusi. Tetapi jika Anda sebagai anak buah, Anda akan membenci atau mencintai pimpinan Anda? Saya yakin Anda tidak begitu mencintainya, tapi takut. Yakinkan bahwa anak buah yang takut akan mudah disuruh bekerja lebih keras oleh pimpinannya. Tetapi sebagai pemimpin setelah masa kepemimpinan selesai akan segera dilupakan atau diingat sebagai pemimpin yang kejam.

### Pemimpin yang Dicintai

Buku lain tentang kepemimpinan dan sangat bertolak belakang dengan *machiavellis* adalah *The Transparent Leadership* karya Herb Baum dan Tammy Kling, tahun 2004. Herb Baum adalah CEO Dial Corporation, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi sabun dan kosmetik yang bersaing dengan Unilever. Terlepas Anda setuju atau tidak dengan kaum *machiavellis*, Baum mengajarkan sesuatu yang menurut hemat saya lebih baik. Memang, Baum menulis bukunya dalam konteks perusahaan privat bukan publik, namun ada spirit yang dapat kita ambil dari pengalaman-pengalaman perusahaan privat untuk diterapkan pada instansi publik. Hal ini senada dengan pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government, How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, buku ini sudah diterjemahkan menjadi *Mewirauahakan Birokrasi*.

Perusahaan yang transparan dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang berakar pada suatu nilai dasar,

berdasarkan kebaikan terbesar bagi banyak orang, dengan pemimpin yang yakin untuk melakukan hal yang benar setiap saat – apa pun konsekuensinya. Ada tiga prinsip yang harus dimiliki perusahaan yang transparan yaitu: Pertama, pemimpin yang menyampaikan seluruh kebenaran. Kedua, kultur perusahaan berbasis nilai, dan Ketiga, karyawan yang berorientasi pelayanan. Pemimpin yang dapat menjalankan tiga prinsip ini akan dicintai anak buahnya.

Jika, tiga prinsip itu kita pantulkan dalam tubuh Kementerian Keuangan atau BPPK maka nampak persis bawa Kementerian Keuangan sudah sebangun seperti apa yang dipikirkan Baum. Tengoklah apa yang sudah dirumuskan dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Pelayanan. Tujuan penetapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan adalah untuk mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan. Sedangkan tujuan akhirnya adalah sebagaimana dirumuskan dalam visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

Apa dan bagaimana (saat ini) sebuah institusi yang transparan kita sudah mempunyai gambaran. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana selanjutnya?

### Jalan Menuju Pimpinan Yang Dicintai

Pendapat Baum dalam konteks Kementerian Keuangan bisa diringkas hanya menjadi dua prinsip yaitu kepemimpinan dan nilai. Karyawan yang berorientasi pelayanan bisa dileburkan dalam prinsip adanya nilai, karena dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sudah terdapat pelayanan. Peran pimpinanlah memastikan institusi bisa berkinerja berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada tiga kewajiban pemimpin untuk itu yaitu membimbing, mendengar, dan bisa ditemui.

1. *Membimbing*, setiap pegawai

mempunyai kepribadian dan latar belakang yang berbeda sehingga perlu bimbingan untuk mengetahui nilai-nilai yang benar dan salah. Bimbingan bisa dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau mengikuti diklat-diklat di luar institusi. Pemimpin yang melakukan bimbingan anak buahnya mengatasi masa-masa sulit akan dikenang sebagai pemimpin etis dan dicintai, alih-alih pemimpin yang kejam yang lebih memilih melihat orang tenggelam.

2. *Mendengar*, manusia tidak dianugerahi pendengaran yang sensitif seperti anjing atau kucing sehingga perlu mengembangkan keterampilan mendengarkan, dan berpikir bahwa mendengarkan merupakan komponen penting dari pemimpin. Pimpinan puncak yang ingin kebenaran, ia harus turun ke bawah dan mendengarkan. Jika tidak, informasi yang diterima akan tersaring oleh manajer sehingga ketika sampai ketelinganya, informasi itu sudah bersih, jernih dan... menyimpang. Pemimpin tidak akan mendengar masalah yang berpengaruh negatif, tidak mendengar manajer yang merendahkan pegawai sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Mendengar pendapat di semua jenjang akan mendorong pegawai berkomunikasi dengan pimpinan. Beruntunglah, saat ini sudah ada *e-mail* sehingga para pemimpin tidak harus *blusukan* untuk mendengarkan, cukup dengan menginformasikan alamat *e-mail*nya.

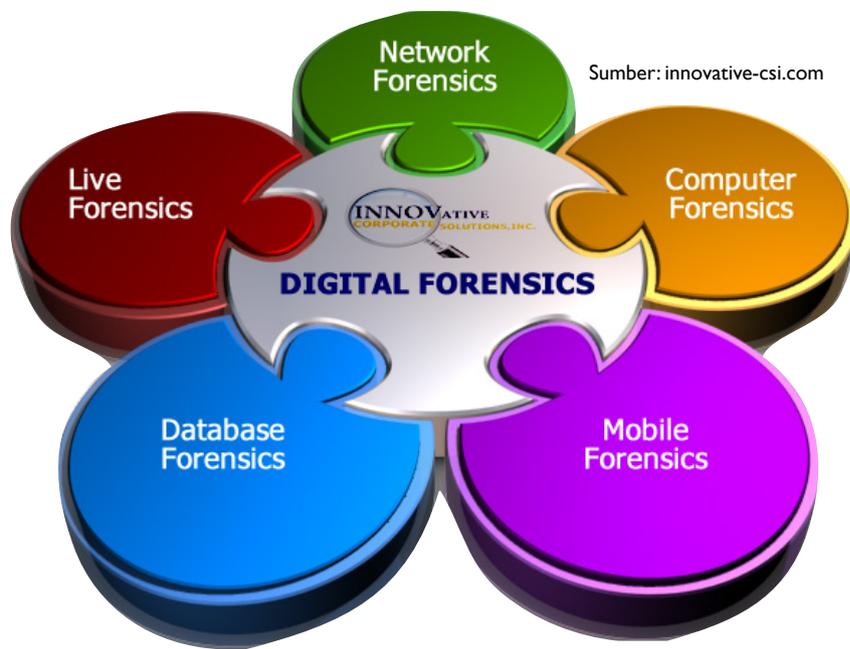
3. *Bisa ditemui*, karyawan harus tahu bahwa mereka dapat menyampaikan pandangan mereka kepada pemimpinnya. Institusi yang transparan tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang menempati ruang khusus di lantai teratas bangunan, dan hanya orang dengan kode rahasia atau kunci rahasia saja yang dapat mencapainya, karyawan lain

yang tidak punya kunci tidak bisa menemuinya. Mungkin karyawan bisa mencapai ruang kerja para pimpinan namun mereka akan dihalangi oleh dinding kaca dan meja sekretaris yang besar. Sangat mungkin meja sekretaris itu lebih besar dari meja kerjanya. Seolah karyawan yang ingin langsung bertemu adalah gangguan. Baum menyarankan pemimpin harus dapat ditemui dimana saja, memiliki ruang yang dekat dengan karyawannya, berjalan melewati lorong yang sama, menjawab *e-mail* karyawan, dan dapat dilihat. Intinya bahwa harus ada komunikasi yang mudah dan terbuka antara pimpinan dengan karyawan.

Pimpinan yang dapat menjalankan tiga prinsip tersebut akan dicintai oleh anak buahnya bukan hanya saat memimpin tetapi juga setelah berakhir masa kepemimpinannya. **Seandainya kita pemimpin dalam semua level, kita mempunyai dua pilihan yaitu ditakuti atau dicintai. Silahkan Anda memilihnya.**

Pemimpin yang ditakuti atau dicintai dapat meningkatkan kinerja institusi mewujudkan tujuannya. Kaum *machiavellis* lebih memilih menjadi pemimpin yang ditakuti karena manusia tidak segan-segan membela pemimpin yang ditakuti daripada yang mereka cintai. Jadi, selama pemimpin memberikan keuntungan pada bawahan, mereka dapat dikuasai. Hanya saja pemimpin yang ditakuti akan segera dilupakan setelah masa kepemimpinannya berakhir. Sebailiknya Herb Baum menasehati agar pemimpin menjalankan tiga kewajiban yaitu membimbing, mendengar, dan bisa ditemui. Pemimpin yang dapat menjalankannya akan dicintai dan dikenang.

\*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



# Digital Forensik: “No Log, No Crime”

Oleh : Suharyadi

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), segala aktivitas digital yang menyangkut informasi dan transaksi elektronik memiliki payung hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu mekanisme pembuktian yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Digital forensik merupakan kombinasi ilmu hukum dan ilmu komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisa data atau informasi dari suatu sistem komputer, jaringan,

komunikasi nirkabel dan perangkat penyimpanan yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam penegakan hukum.

Prinsip kerja dari digital forensik mirip dengan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengusut bukti tindak kejahatan dengan menelusuri fakta-fakta yang ada. Yang membedakan adalah pada digital forensik proses dan kejadiannya terdapat dalam dunia maya atau pada dunia nyata dengan fokus pada aktivitas yang mengarah pada barang bukti digital.

Secara garis besar tujuan utama dari digital forensik yaitu untuk membantu proses pemulihan dan analisa serta mempresentasikan barang bukti digital

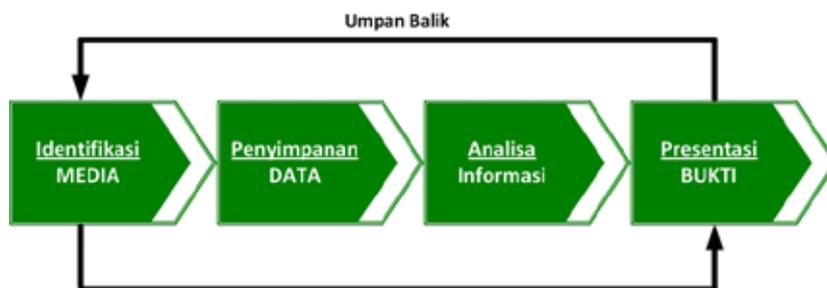
dengan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Selain itu digital forensik juga bertujuan untuk mendukung proses identifikasi barang bukti digital dengan jangka waktu yang singkat.

Dalam dunia kriminal terdapat sebuah istilah “tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak”. Ada banyak sekali hal atau objek yang bisa menjadi petunjuk dalam setiap tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer antara lain:

1. *Log file* atau catatan aktivitas penggunaan komputer yang tersimpan dalam sistem operasi;
2. File-file yang telah dihapus secara sistem namun secara teknikal masih bisa dipulihkan dengan menggunakan cara-cara dan perlengkapan tertentu;
3. Catatan digital yang dimiliki oleh perangkat jaringan komputer seperti IDS (*Intrusion Detection System*) dan IPS (*Intrusion Prevention System*);
4. Berbagai media penyimpanan yang berisi data atau informasi *backup* dari sistem utama;
5. Rekam jejak interaksi dan lalu lintas data melalui jaringan komputer dari satu lokasi ke lokasi lain dan lain sebagainya.

Beragam jenis objek ini selain dapat memberikan petunjuk dapat pula digunakan sebagai barang bukti awal yang dapat dipergunakan oleh penyelidik maupun penyidik dalam penelusuran proses terjadinya suatu tindak kriminal, karena kegiatan digital forensik dapat berupa petunjuk seperti:

1. Lokasi pelaku ketika sedang melakukan tindak kriminal;
2. Perangkat yang digunakan dalam melakukan tindak kriminal;
3. Sasaran atau target dari pelaku tindak kriminal;
4. Waktu dan durasi tindakan kriminal;
5. Modus operandi yang digunakan;
6. Hal-hal apa saja yang dilanggar dalam aktivitas tindak kejahatan tersebut.



Gambar 1 : Tahapan digital

Tahapan pada digital forensik secara garis besar dapat dibagi kedalam empat tahapan, yaitu :

**1. Identifikasi Bukti Digital (Acquisition)**

Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses penyelidikan. Segala bukti yang dapat digunakan untuk mendukung proses penyelidikan dikumpulkan. Proses penyelidikan dimulai dari dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan dan bagaimana cara penyimpanannya. Pada tahap ini biasanya para penyelidik menggunakan tools berupa perangkat lunak seperti *Forensic Acquisition Utilities, Ftime, LiveView, Netcat, ProDiscover DFT, Psloggedon, UnxUtils*, dan lain sebagainya

**2. Penyimpanan Bukti Digital (Preservation)**

Tahapan ini mencakup penyimpanan dan penyiapan barang bukti yang ada, termasuk melindungi barang bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Barang bukti yang digunakan harus asli dan belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk dianalisa. Pada tahap ini diperlukan kemampuan yang tinggi dari seorang ahli digital forensik karena kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat tidak diakui di pengadilan. Pada tahap ini biasanya seorang ahli digital forensik akan melakukan kloning (penggandaan secara persisi, satu banding satu) pada setiap bukti digital dan hasil kloning tersebut yang akan digunakan dalam tahap analisa bukti digital untuk mencegah terjadinya perubahan pada bukti digital.

**3. Analisa Bukti Digital (Analysis)**

Tahapan ini dilaksanakan dengan melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Data-data yang diperiksa dalam tahapan ini dapat berupa alamat website yang pernah dikunjungi, email, file *spreadsheet* dan *wordprocessing*, file gambar dan foto, file yang dihapus maupun di format, *registry*, file yang disembunyikan (*hidden file*), *event viewer*, dan log-log aplikasi. Pada tahap ini biasanya para penyelidik menggunakan tools berupa perangkat lunak seperti *Event Log Parser, Explore2FS, Libpff, Md5Deep, Outport, Pasco*, dan lain sebagainya

**4. Presentasi (Presentation)**

Pada tahapan ini merupakan tahap untuk menyajikan dan menguraikan laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Hasil laporan yang disajikan akan sangat menentukan dalam proses penetapan hukum. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa laporan yang disajikan sudah benar-benar akurat, teruji dan terbukti.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di masa yang akan datang objek penelitian dan cakupan dari digital forensik akan menjadi lebih luas lagi. Oleh karena itu keahlian dalam bidang digital forensik akan sangat dibutuhkan. Untuk menjadi seorang ahli dalam bidang digital forensik, seseorang harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi informasi dan komunikasi baik *hardware* maupun *software*. Seorang ahli digital forensik juga harus memiliki sertifikasi di bidang digital forensik sebelum dapat terjun langsung ke lapangan sebagai pengakuan keahlian yang dimilikinya. Sertifikasi dibidang digital forensik antara lain CHFI (*Computer Hacking Forensic Investigator*) dari EC-Council, GCIH (*GIAC Certified Incident Handler*) dan GCFA (*GIAC Certified Forensic Analyst*) dari SANS *Institute*, dan ENCE (*EnCase Certified Examiner*) dari Guidance Software.

\*Penulis adalah Pranata Komputer pada Sekretariat BPPK

# Kang Edu



Oleh: Bimo



Diklat Pejabat Pembuat Komitmen  
Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi  
Diklat Kuasa Pengguna Anggaran  
Diklat Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal untuk Pegawai Perbendaharaan  
Diklat Budget Analyst bagi Pegawai ITJEN  
Diklat Pejabat Pembuat Komitmen  
Implementing Logic Model in Budget System  
TOT Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Menengah  
Workshop Executive Problem Solving Workshop (Eselon III)  
Capacity Building Penyusunan Database untuk Manajemen Jadwal Diklat  
Workshop Management Training Anggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat  
**AP**

Anggaran dan  
Perbendaharaan



• • • • •  
Pusdiklat  
**BC**  
Bea dan Cukai



Workshop Frontliner Indonesian Airport Customs Ak. III  
Workshop Rules Of Origin Angkatan VI  
Workshop Manajerial Kepala Kantor Angkatan II  
Diklat Penindakan Kepabeanan dan Cukai  
Diklat Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut Ak. III  
Workshop Rules Of Origin Angkatan VII

DTSS Transfer Pricing untuk Widyaiswara

• • • • •  
Pusdiklat



**PAJAK**

Pusdiklat  
**KU**  
Keuangan  
Umum



Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer - Tingkat Lanjutan  
Seminar Anti Money Laundering Dan Asset Tracing  
Diklat Kearsipan Dinamis Angk. III  
Diklat Manajemen Risiko Angk. IV  
Seminar Persiapan Purnabhakti  
Diklat Perencanaan Keuangan Keluarga Angk. II  
Diklat AKSI UKI (Kelas Reguler) Angk. XLII  
Diklat AKSI UKI (Kelas Reguler) Angk. XLI  
Diklat Manajemen Risiko Kelas Manajerial  
Diklat Akuntansi Berbasis PSAK Konvergensi IFRS Angk. III  
Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit Yang Efektif Untuk Ketua Tim  
Diklat Manajemen SDM - Tingkat Tinggi  
Diklat Financial Risk Manager Preparation Program  
Diklat Kewajiban Kontijensi  
Diklat Studi Kelayakan Financial Proyek

Diklat Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan  
Diklat Manajemen Aset Angkatan II  
Diklat Penatausahaan Barang Milik Negara  
Workshop Pengetahuan Penilaian Barang Milik Negara Ak. II  
Workshop Pengetahuan Penilaian Barang Milik Negara Ak. III  
Diklat Penilaian Sumber Daya Alam

Pusdiklat

**KNPK**

Kekayaan Negara dan  
Perimbangan Keuangan



Pusdiklat  
**PSDM**  
Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



Diklat Kompetensi Khas Coaching and Mentoring

**Keterangan**

**DTSD : Diklat Teknik Substantif Dasar**

**DTSS : Diklat Teknik Substantif Spesialisasi**

**DTU : Diklat Teknik Umum**

**DF : Diklat Fungsional**



**Heru Priyono**  
(Nahkoda Kapal Patroli BC20002)

Saya merasa *workshop* ini sangat perlu sekali. Karena apa? Karena *workshop* ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan nantinya sewaktu kita menjalani kewenangan penindakan di laut. Banyak hal yang kami dapatkan, semisal mengenai administrasi penindakan, dan kewenangan dalam hal penindakan di laut yang selama ini adalah wewenang dari pihak P2 sekarang kita sebagai anggota kapal bisa mendapatkan ilmu tersebut.

Banyak hal positif yang kita dapat kita ambil atau kita terapkan nantinya, seperti mengenai administrasi penindakan, kemudian juga perkelahian tanpa menggunakan senjata untuk melawan para perompak di laut, dan juga hal-hal mengenai kewenangan penindakan dan penggunaan senjata api yang selama ini belum pernah kita dapatkan. Hal negatifnya saya rasa tidak ada. Karena ini sifatnya pengetahuan penambahan. 3 kata tentang *workshop* ini: seru, menegangkan dan memuaskan.



**Nyoto isnu Sri Ananto**  
(KKM Kapal VSW)

Ketika mendapat surat tugas untuk mengikuti *workshop*, saya membayangkan saya akan menambah ilmu, dari yang dulu tidak tahu sama sekali sekarang sedikit banyak menjadi tahu. Kita juga mengalami secara langsung di lapangan dalam pencegahan, pemeriksaan, administrasi, dan sampai ke penangkapan. Bagi saya, *workshop* ini semangat, luar biasa dan seru.

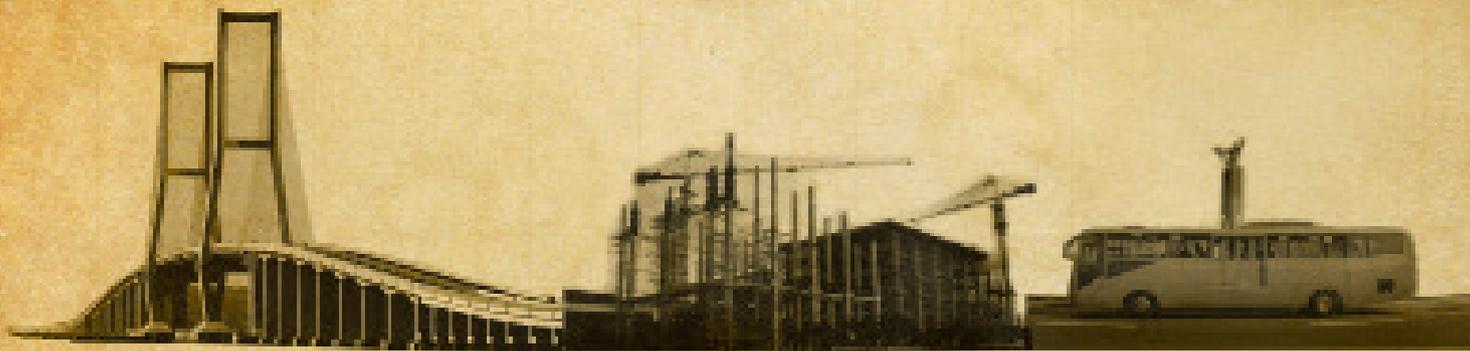


**M. Maryanto**  
(KKM Kapal PSP)

Cukup banyak yang saya dapatkan. Contohnya administrasi penindakan, yang dulunya saya tidak tahu menjadi tahu. Selain itu banyak hal positif yang saya dapatkan dari *workshop* ini, terutama pengetahuan tentang penindakan. 3 kata tentang *workshop* ini: seru, menyenangkan dan luar biasa

# Workshop Marine Customs Tactical Unit

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan empat tugas pilar utamanya yaitu *Revenue Collector*, *Community Protector*, *Trade facilitator*, *Industrial Assistance*, merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mencegah perdagangan ilegal melalui laut (*illegal exportation*). Peran penting tersebut harus dipegang teguh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun (Pangsarops TBK) bekerjasama dengan BDK Pekanbaru menyelenggarakan *workshop* bertajuk *Marine Customs Tactical Unit*. Bertempat di Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun, *workshop* ini berlangsung selama lima hari kerja, mulai 3 Oktober 2013 sampai 9 Oktober 2013. Para peserta *workshop* mendapatkan pembekalan melalui tahapan pelatihan fisik, mental, peningkatan kemampuan intelektual serta meningkatkan kemahiran dan ketangkasan pegawai terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota satuan tugas patroli laut. Simak cuplikan wawancara dengan beberapa peserta terkait jalannya *workshop* ini.



**PEMBANGUNAN INI UNTUK SIAPA? OLEH SIAPA?**

**PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMANG BERBEDA,  
TAPI TIDAK UNTUK DIBEDA-BEDAKAN**

**BERIKAN AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT PEMBANGUNAN  
UNTUK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI  
SECARA ADIL & SETARA**



# CALL CENTER

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA

# HALO BPPK



# 021-29054300



hubungi kami untuk informasi:

#diklat keuangan negara

#beasiswa

#STAN

#pengaduan dan saran

# EDUKASI KEUANGAN

EDISI 18/2013

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7244873

Fax: +62 21 7261875

<http://www.bppk.depkeu.go.id>